

PANGAN LOKAL UNTUK ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM

**Kumpulan Karya Jurnalistik
tentang Keadilan Pangan**

Penerbitan buku ini didukung oleh Oxfam. Semua pandangan dan pendapat dalam buku ini adalah pandangan dan pendapat para penulis serta tidak sekali-kali mencerminkan atau mewakili pendapat atau pandangan Oxfam.

PANGAN LOKAL UNTUK ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM
KUMPULAN KARYA JURNALISTIK TENTANG KEADILAN PANGAN

PENULIS:

Christopel Paino
Nova Daud
Leonard Ritan
Rasyid Azhar
Yohanes Adrianus
Anthony Johanis
Jean Neno
John Seo
Nyongki Mauleti
Kanisius Seda
Obed Gerimu
Palce Amalo
Astrid Tehang
Eras Poke
Labu Nggiku Mbuhang
Maxi Marho
Riflan Hayon
Gerilyawan Putra
Rivol Paino
Saleh iqbal
Syam Terrajana (Syamsul Huda M. Suhari)
Silver Sega
Irwanto Achmad
Arlank Pakaya

DITERBITKAN OLEH

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia
JL KEMBANG RAYA NO.6 KWITANG, SENEN
JAKARTA PUSAT 10240
WWW.AJI.OR.ID • @AJIINDO

DIDUKUNG OLEH



FOOD. LIFE. PLANET.

DAFTAR ISI

Pengantar.....	5
Bujuk Rayu Sawit di Perkampungan Gorontalo, Christopel Paino	9
Bohito di Ladang Tebu (1), Nova daud	19
Malapetaka Ladang Tebu (2), Nova Daud	23
Budi Daya Mangga Kweni Untuk Meningkatkan Ekonomi dan Keamanan Pangan, Rasyid Azhar	27
Perubahan Iklim Dan Ancaman Puso Petani NTT, Yohanes Adrianus	35
Buah Lontar Tak Sekedar Makanan Ternak, Leonard Ritan	43
Jeritan Petani di Musim Tanam, Anthony Johanis	49
Akibat Pergeseran Iklim, Petani Sulit Prediksi Waktu Tanam, Jean Neno	53
Cita Rasa Dodol dari Buah Lontar, John Seo	57
Dodol Lontar Panganan Lokal NTT Yang Tidak Kondang, Nyongki Maleti	61
Buah Lontar, Soku Guru Ekonomi Keluarga, Kanisius Seda	65
Lahan Menyempit, Produksi Pangan dan Penghasilan Petani Merosot, Obed Gerimu	75
Laju Alih Fungsi Lahan Sulit Dibendung, Palce Amalo	81
Buah Lontar pun Bisa Jadi Dodol, Astrid Tehang	85
SPBU Noelbaki Berdiri Diantara Ratusan Hektar Sawah, Eras Poke	89

Semakin Sempitnya Lahan Pertanian di Kota Kupang, Labu Nggiku Mbuhang	93
Bila Alih Fungsi Lahan Pertanian, Apa Pengaruhnya Pada Ketahanan Pangan?, Maxi Marho	101
Curah Hujan, Berpengaruh Bagi Petani Kabupaten Kupang, Riflan Hayon	107
Binde Kiki, Si Kecil yang Terlupakan, Gerilyawan Putra	115
Demi GORR Sawah Ladang Pun Dibelah, Rivol Paino	121
Kasubi, Pangan yang Terpinggirkan oleh Beras, Saleh iqbal	129
Pestisida, Mimpi Buruk Kedaulatan Pangan di Gorontalo (1), Syam Terrajana (Syamsul Huda M. Suhari)	133
Pestisida, Mimpi Buruk Kedaulatan Pangan di Gorontalo (2), Syam Terrajana (Syamsul Huda M. Suhari)	137
Jenis Tanaman Ini Mampu Beradaptasi dengan Iklim di NTT, Silver Sega	143
Cuaca Buruk, Stok Pangan NTT Masih Aman, Silver Sega	145
Prospek Menjanjikan, Petani Beralih ke Jagung Manis, Irwanto Achmad	147
Swasembada Daging di Gorontalo Terbentur Korupsi, Arlank Pakaya	149

PENGANTAR

Kondisi cuaca ekstrem di berbagai belahan dunia telah memicu bencana serta merusak sistem pertanian dunia. Perubahan cuaca ekstrem pada akhirnya menurunkan ketersediaan pangan dunia akibat fenomena kegagalan panen, sekaligus menyebarkan ancaman bencana kelaparan global.

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) yang diwakili komunitas ilmuwan global, mempublikasikan laporan “Fifth Assessment Report on Climate Impacts, Vulnerability and Adaptation” yang memprediksi dampak perubahan iklim terhadap kelaparan global. Laporan Panel Antarnegara Dalam Isu Perubahan Iklim inipun menunjukkan, bencana kelaparan global bisa datang lebih cepat dan lebih buruk dari perkiraan awal – sekitar 20-30 tahun mendatang, terutama di negara-negara paling miskin di dunia.

Temuan lain dari kajian IPCC adalah makin mahal serta makin tidak terkendalinya fluktuasi harga pangan dunia akibat perubahan iklim. Dalam enam tahun terakhir telah beralngsung tidak kurang dari 3 kali kenaikan tajam harga pangan dunia, yakni pada 2008, 2010, dan 2012. Kenaikan dan gangguan stok pangan dunia ini terjadi salah satunya oleh pengaruh perubahan cuaca ekstrem. Kajian Oxfam memprediksikan bahwa harga pangan dunia bisa meningkat dua kali lipat pada tahun 2030 di mana separuhnya disebabkan oleh perubahan iklim

Krisis pangan di Indonesia memang tidak dirasakan, setidaknya belum, oleh masyarakat. Masih jarang terdengar berita tentang kelaparan di negeri ini. Tetapi faktor ketersediaan pangan Indonesia sesungguhnya berada pada fondasi yang lemah. Kelemahan terutama ialah tingginya ketergantungan impor dan keseragaman pangan yaitu beras dan gandum.

Indonesia memiliki lahan persawahan luas, tapi sudah hampir 30 tahun tidak mampu swasembada beras, kecuali pada 1984. Pelan dan pasti, Indonesia bergeser menjadi negara pengimpor pangan. Pada 2013, Indonesia mengimpor 472 ribu ton beras dari negara tetangga seperti Vietnam, Thailand, Myanmar. Belum termasuk bahan pangan seperti garam, kedelai, daging, yang diimpor dari negara lain.

Ironisnya, masyarakat Indonesia sudah terbiasa mengkonsumsi mie-instan yang berasal dari gandum, jenis tanaman yang tidak tumbuh Indonesia. Indonesia tercatat sebagai negara nomer 2 di dunia sebagai pengimpor gandum, setelah Mesir. Tahun 2012, Indonesia mengimpor 6,2 juta ton gandum, yang sebagian besar dari Australia. Jika dibiarkan, kondisi ini bisa memicu krisis pangan dalam negeri karena ketergantungan impor pangan Indonesia dari negara lain.

Pada saat yang sama, jenis pangan lokal lain seperti jagung, sagu, singkong, ketela, justru terpinggirkan. Jenis pangan ini dianggap kurang bergengsi dan berkembang sehingga tidak ada pengembangan varietas, yang terus menyusutkan budi daya pangan tersebut. Padahal di beberapa daerah, tanaman tanaman ini cocok dan bisa tumbuh subur untuk mencukupi kebutuhan setempat.

Menanggapi situasi di atas, sejumlah jurnalis di Indonesia Timur, khususnya di kota Kupang dan Gorontalo telah mengadakan pelatihan untuk mendalami permasalahan

pangan lokal, berlangsung pada Maret 2014. Tujuan pelatihan yang melibatkan kalangan jurnalis dan media ini untuk mendorong munculnya karya-karya jurnalistik yang memiliki perspektif penguatan pangan lokal.

Melalui media masing masing para jurnalis dilatih meliput dan melaporkan berbagai masalah pangan, hingga tulisan para jurnalis ini layak dibukukan. Kumpulan karya jurnalistik para jurnalis ini umumnya mengangkat kembali potensi dan permasalahan pangan lokal di daerah Nusa Tenggara Timur dan Gorontalo. Laporan jurnalistik dan penerbitan buku adalah cara kami agar masyarakat dan pemilik kepentingan makin peduli dan ikut berupaya mengantisipasi dampak perubahan iklim terhadap kondisi pangan dunia.

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) berupaya mempublikasikan ulang semua laporan jurnalis melalui buku. Harapannya isu penguatan pangan lokal dapat tersebar luas, berkesinambungan, dan menginspirasi banyak kalangan.

Jakarta, April 2014

Eko Maryadi

Ketua Umum AJI

BUJUK RAYU SAWIT DI PERKAMPUNGAN GORONTALO

Oleh **CHRISTOPEL PAINO**

<http://www.mongabay.co.id/2014/03/10/bujuk-rayu-sawit-di-perkampungan-gorontalo/>

Perempuan tua itu bermandi peluh. Matahari menyengat dari punggung bukit. Dia terus membungkuk dengan tangan kanan mencabut serabut kacang tanah hingga ke akar. Tangan kiri memeluk tanaman kacang. Setelah itu, dia bergegas menuju sebuah tenda. Tak begitu jauh. Di sana, sudah menunggu enam ibu-ibu dan dua bapak yang bertugas memisahkan buah kacang tanah dari dedaun.

Sejak sepekan ini, di awal Maret 2014, warga di Desa Molanihu, Kecamatan Bongomeme, Kabupaten Gorontalo panen kacang tanah. Tak ada sawah di sini. Mungkin karena hutan begitu dekat. Di kampung berbukit yang berjarak sekitar dua jam dari Kota Gorontalo ini, kacang tanah menjadi komoditas unggulan. Ada juga jagung dan kelapa. "Sampai beberapa waktu ke depan, sekitar satu bulan lagi, panen kacang masih berlangsung di sini," kata Umi Lamara (62), dengan logat khas Gorontalo kepada saya.

Dia beristirahat sejenak. Air putih di jerigen berukuran lima liter dituangkan ke gelas plastik. Cuaca sebegitu panas. Kemarau kian panjang. Hujan belum juga turun. "Panen

jagung sudah selesai minggu kemarin. Tapi ada beberapa warga belum selesai panen. Ada juga yang bersamaan antara jagung dan kacang tanah.”

Keceriaan warga panen jagung dan kacang tanah kali ini sedikit terganggu. Bukan karena hasil tak maksimal. Namun, kehadiran perusahaan perkebunan sawit di kampung. Sawit cukup membuat mereka resah dan mengganggu pikiran. Tak ada seorang pun warga kampung pernah melihat seperti apa bentuk sawit itu. Kecuali lewat film dokumenter yang pernah mereka tonton diputar LSM lingkungan di Gorontalo, satu tahun lalu.

“Di Molanihu, sawit mulai masuk di Dusun Binidaa dan Dusun Malahengo, ” kata Lamara. Dia menunjuk ke timur, ke Dusun Binidaa. Sebagian besar masyarakat di Molanihu, menolak perkebunan sawit. Informasi yang mereka dapatkan, sawit sangat rakus air. Di desa itu, sumber mata air utama dari gunung belakang desa dan menghidupi seluruh kebutuhan rumah tangga di Desa Molanihu. Juga dari Sungai Pilomalula, salah satu anak Sungai Puhu. Ia sumber air bagi produksi pangan di Desa Molanihu dan ratusan hektar sawah di daerah hilir di Kecamatan Bongomeme.

Siang itu, sekitar 15 warga berkumpul. Mereka bergotong royong membersihkan kacang tanah. Dalam percakapan mereka, sawit menjadi topik utama. Selain membahas soal pembelian tanah oleh perusahaan yang tidak sesuai, hingga dampak ekologis yang mereka ketahui. “Kalau sawit masuk di kampung ini, kita akan kesulitan air. Sungai akan kering. Semua mengalami kekeringan, ” kata Iko Luawo, seorang warga, kepada istrinya dan ibu-ibu lain yang sedang bekerja.

Mendengar pernyataan itu, putrinya berumur 10 tahun menimpali. “Kalau begitu sapi juga pasti akan kehausan

karena air di sungai habis.” Semua yang mendengar tertawa. Dalam percakapan siang di kebun itu, warga menyebutkan perusahaan sawit berhasil menguasai desa tetangga mereka, yaitu Desa Liyodu. Desa Liyodu merupakan pemekaran dari Desa Molanihu. Mereka sudah mengingatkan kepada saudara-saudara di Liyodu, namun tanah-tanah sudah dikuasai perusahaan.

Tanah dijual dengan murah kepada perusahaan sawit. Satu hektar tanah beserta tanaman kelapa, paling mahal dihargai Rp3 juta. Harga terendah satu hektar Rp750 ribu. Ada yang menolak, namun banyak terpaksa dan langsung menjual. Bahkan, seorang warga di Desa Liyodu, tanah satu hektar bersama 100 lebih kelapa hanya Rp2, 7 juta. Mereka diiming-imingi menjadi pekerja dalam perusahaan sawit, setelah menjual tanah. Tawaran perusahaan sawit itu juga datang kepada Abdurahman Luawo, tokoh masyarakat di kampung itu. Dia bercerita, sudah 20 kali perusahaan sawit mendatangi dan membujuk menjual tanah. Baik tanah di Desa Liyodu maupun di Desa Molanihu. Tanah dia selalu menjadi incaran. Yang terakhir, tanah seluas satu hektar berdekatan dengan sungai ditawari tempat pembibitan sawit. Sekali lagi, dengan tegas dia menolak.

“Sawit itu tanaman merusak. Pengalaman sudah terlihat, tanah di Kalimantan dan

Sumatera rusak.”

Menurut dia, kampung ini salah satu daerah hulu. Saat ini saja, laju sedimentasi sungai ke hilir di Danau Limboto, cukup parah. “Apalagi kalau sawit merajalela, pendangkalan danau makin cepat, lalu sawah-sawah dan kebun warga di desa hilir akan rusak.”

Perusahaan sawit sudah sosialisasi di dua kampung

tetangga itu sejak 2012. Namun, tak ada sosialisasi resmi kepada pemerintah desa. Sampai kini, mereka tak tahu apa nama perusahaan sawit itu. Tak ada informasi memadai yang mereka dapatkan. Perwakilan perusahaan sawit, baru akan sosialisasi ketika melihat ada warga yang berkumpul di kantor desa. Atau saat kepala dusun dan tokoh masyarakat berkumpul, mereka numpang mampir dan memaparkan rencana penanaman sawit.

“Tapi aparat desa di Molanihu tak ada respon. Akhirnya, mereka turun langsung ke masyarakat dan membujuk. Anehnya, orang perusahaan sawit yang datang berbedabeda. Saat sosialisasi, pengukuran tanah, dan pembayaran tanah semua orang berbeda. Ini mencurigakan!” kata Abdurahman.

Lain hal dengan Linda Pomu, Sekretaris Desa Liyodu. Menurut dia, tak ada masalah dengan perusahaan sawit. Perusahaan berjanji memberdayakan masyarakat desa sebagai pekerja sawit. Daripada banyak masyarakat pergi merantau sampai ke Sulawesi Utara di Bitung dan Manado, atau ke Palu.

“Di kampung ini, sangat sedikit laki-laki yang bisa dilihat karena sebagian besar merantau. Sekitar 50 bekerja di pabrik gula di Paguyaman, Kabupaten Boalemo. Ada perusahaan sawit, para perantau itu bisa kembali dan membangun desa. Apalagi perusahaan berjanji 200 warga desa Liyodu akan diprioritaskan sebagai pekerja.”

Di Desa Liyodu, kurang lebih 100 keluarga telah menjual tanah mereka ke perusahaan sawit seharga Rp750 ribu sampai Rp3 juta per hektar. Lalu warga yang menjual tanah itu harus memasukkan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk.

Alasannya sederhana. Kata Linda, kelak mereka menjadi pekerja dan sebagai warisan. Sebagai contoh, ketika ada keluarga meninggal, yang akan melanjutkan adalah ibu atau

anak-anak. Sama dengan Desa Molanihu, di desa ini mayoritas warga bercocok tanam mengandalkan jagung, kacang tanah, kelapa, cabai, dan sayur-sayuran. Semua jenis pangan itu sebentar lagi hilang berganti sawit. Warga yang menjual lahan kepada perusahaan itu otomatis bekerja di perusahaan sawit.

“Perusahaan berjanji akan mempekerjakan masyarakat yang sudah menjual tanah ke perusahaan dengan gaji Rp1, 3 juta dan akan diberikan Jamsostek, ” kata Linda. Dia mengungkapkan, perusahaan ketika bersosialisasi kepada warga menjanjikan kehidupan lebih baik dari sekarang. Dia mencontohkan, mobil Toyota Avanza yang sering dipakai di Gorontalo, di perusahaan sawit Kalimantan, hanya setara bentor- kendaraan roda tiga khas Gorontalo—alias dinilai tidak begitu berharga.

Mendengar itu, warga sumringah. Ketika ditanyakan soal krisis air yang akan terjadi, perusahaan membantah, bahwa itu tidak betul. Sayangnya, Linda tak mengetahui persis nama perusahaan sawit itu. Padahal, sudah sejak 2012 perusahaan datang ke desa.

“Saya tidak tahu nama perusahaan itu. Yang jelas setelah pemilu mereka mulai pembibitan. Meski tanah untuk tempat pembibitan masih bermasalah.” Pangan Terancam

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Gorontalo menyebutkan, luas wilayah Kecamatan Bongomeme 30, 13 kilometer persegi. Topografi wilayah 54 persen di daerah hamparan, dan 44 persen di lereng gunung. Cukup luas wilayah lereng gunung menjadikan Kecamatan Bongomeme dilintasi 16 sungai.

Salah satu sungai penting yaitu Sungai Alo Puhu, merupakan daerah aliran sungai (DAS) Limboto. Muara sungai ini mengalir sampai ke Danau Limboto dan menjadi

sumber persawahan milik masyarakat di hilir.

Berdasarkan laporan Kecamatan Bongomeme Dalam Angka 2012, penduduk bekerja pada sektor tanaman bahan makanan 7816 orang. Jakfar Dai, Ketua Badan Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (BP3K) Kecamatan Bongomeme, mengatakan komoditas pangan unggulan di kecamatan itu beras, jagung, kacang tanah, cabai, kacang hijau dan kelapa.

Kehadiran sawit di wilayah mereka akan berdampak negatif terhadap ketersediaan pangan di Kecamatan Bongomeme. Sebab, lokasi yang akan ditanami sawit merupakan lahan pangan unggulan. Sawah-sawah dipastikan hilang karena perairan bergantung pada Sungai Alo Puhu. Hal ini juga akan berdampak pada daerah sekitar yang bergantung sumber air sungai.

Dia tak mengetahui nama perusahaan sawit yang berinvestasi itu karena tidak pernah berkoordinasi dengan mereka. "Banyak tokoh masyarakat menolak sawit di sini. Selain rentan pangan, juga gampang erosi dan unsur hara dalam tanah akan hilang," kata Jakfar.

Di Kecamatan Bongomeme, sudah ada empat desa menjadi sasaran sawit, yaitu, Desa Kayu Merah, Liyodu, Molanihu, dan Liyoto. Di Desa Kayu Merah, hampir semua menerima sawit dan telah membentuk tiga kelompok sawit yang tergabung dalam Gapoktan (Gabungan Kelompok Pertanian).

"Kami sampai saat ini belum tahu berapa pendapatan asli daerah yang akan diberikan ke kecamatan ketika sawit ini panen. Kami tidak ingin cari tahu lebih dalam. Karena kami hanyalah pegawai kecamatan. Kami takut. Itu kewenangan mereka (pejabat) di kabupaten."

Menurut Wawan Tolinggi, akademisi dari Universitas

Negeri Gorontalo (UNG), persoalan pangan sangat strategis kini dihadapi masyarakat adalah pengelolaan sumber daya alam tidak ramah lingkungan dan eksploitasi maupun dominasi SDA oleh pemilik modal.

Untuk mengukur suatu wilayah mengalami kerentanan pangan dengan melihat pada angka kekurangan gizi (AKG). Dari data evaluasi kinerja pemerintah Gorontalo tahun 2013, AKG dan gizi buruk pada anak balita di Gorontalo, pada 2009 sebanyak 715 orang, 2010 sebanyak 2.232 orang, tahun 2011 sebanyak 1.073 orang. Tahun 2012 sebanyak 662 orang.

Sri Utami Nadjamudin, Kepala Bidang Perkebunan pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Gorontalo mengungkapkan, ada tiga perusahaan sawit masuk ke Kabupaten Gorontalo, dibawah bendera Palma Group. Namun dua perusahaan tidak serius, PT Heksa Jaya Abadi tancap gas turun mencari lahan masyarakat, di luar kawasan hutan. Mereka mengincar empat kecamatan di Kabupaten Gorontalo, yaitu Bongomeme, Pulubala, Tabongo, dan Tibawa.

“Proses perizinan seperti Amdal dan izin lokasi sudah ada. Izin Usaha Perkebunan belum keluar, karena kami masih menunggu proses perusahaan selesai, yaitu pembebasan lahan milik masyarakat,” ujar Sri.

Dia mengatakan, tak ada lagi istilah inti-plasma. Skema yang dilakukan oleh perusahaan sawit kepada masyarakat merujuk pada Permentan nomor 98 tahun 2013 tentang izin usaha perkebunan yang mengatur pola kemitraan perkebunan sawit yaitu 20 persen untuk pemberdayaan masyarakat.

Sri ketika ditanya mengenai keuntungan perkebunan sawit, agak sedikit ragu. Wajahnya terlihat mengerut. Masyarakat Gorontalo katanya, secara kultur tidak mengenal sawit. Mereka lebih terbiasa dengan tanaman seperti jagung,

cabai , dan kelapa. Sesusah apapun masyarakat Gorontalo, katanya, tetap masih bisa makan.

Namun, dia mengaku sudah berkonsultasi hingga ke Kementerian Pertanian agar lebih hati-hati mengeluarkan izin. Bahkan beberapa pejabat daerah beserta anggota dewan setempat telah studi banding ke perkebunan sawit di Lampung, Sumatera. Tujuannya, mengetahui lebih dekat seperti apa sawit itu.

“Ya, kami melihat perusahaan sawit sangat serius berinvestasi. Lagi pula, di tingkat masyarakat tidak ada pemaksaan menjual tanah. Siapa yang mau saja. Kami melihat sisi positif, karena diuntungkan dengan pembangunan jalan dan infrastruktur lain.” Muhamad Jufrihard, aktivis lingkungan dari Perkumpulan Telapak mengatakan, perusahaan sawit yang masuk di Kabupaten Gorontalo, berdampak besar pada masyarakat sekitar. Juga sistem pengairan sawah di daerah yang berdekatan dengan Kecamatan Bongomeme, seperti Kecamatan Dungaliyo. Selain itu, harus diukur lagi ancaman rill terkait produksi pangan yang berpotensi dihilangkan oleh sawit.

Menurut dia, pelepasan lahan berimbas jangka panjang terhadap hak kepemilikan tanah. Sebab, masyarakat akan kehilangan potensi bercocok tanam. Sedang membuka lahan baru untuk pengembangan pangan, sudah tak ada lagi. Persoalannya, masyarakat tidak pernah sadar ancaman sawit.

“Menurut saya, perusahaan telah membodohi masyarakat. Tanah dibeli Rp3 juta per hektar, itu sama saja Rp300 per meter. Itu harga tanah lebih murah dari harga pisang goreng, ” kata Djufri. Bondan Andrinayu dari Sawit Watch, mengatakan, skenario pembangunan sawit tidak lepas dari cara legal maupun ilegal melalui transfer penguasaan tanah skala besar.

Mereka mengabaikan hak-hak penduduk setempat. Bondan mencontohkan, di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, ada empat faktor dalam proses penggusuran masyarakat setempat atas tanah-tanah, yakni peraturan, pasar, legitimasi politik dan paksaan ataupun melalui penipuan.

“Agenda penting yang mendesak segera dilaksanakan melakukan legal audit dan legal komplain terhadap semua perizinan perusahaan perkebunan dan kehutanan, semacam izin lokasi, HGU, izin-izin kehutanan, dan lain-lain. Juga sangat penting kebijakan daerah tentang perkebunan berkelanjutan.”

Berdasarkan catatan Oxfam, akibat eksploitasi SDA seperti perkebunan sawit ini memperparah krisis pangan di Indonesia. Indeks ketahanan pangan Indonesia tahun 2012 jauh berada di bawah negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand.

Berdasarkan rilis Oxfam, untuk regional Asia Tenggara, dari tujuh negara, Indonesia berada di urutan kelima. Peringkat pertama Malaysia, disusul Thailand, Vietnam, dan Filipina. Indonesia di atas Myanmar dan Kamboja dengan kategori moderat. Sementara di tingkat global, Indonesia berada diperingkat 65 dari 105 negara.

“Praktik eksploitasi oleh perusahaan ekstraktif ini selain memperparah krisis pangan, juga membuat kekacauan iklim dan degradasi ekologis, ” kata Taufiqul Mujib, Koordinator Kampanye Oxfam Indonesia.

BOHITO DI LADANG TEBU (I)

Oleh **NOVA DAUD**

<http://degorontalo.com/bohito-di-ladang-tebu-1/>

Rumah itu tidaklah besar. Dindingnya terbuat dari bambu. Di teras, sekelompok pemuda sedang berkumpul. Mereka duduk bersila membentuk lingkaran. Semuanya bertelanjang d ada. Matahari siang itu cukup membakar kulit. Selain pemuda, tiga orang tua dan seorang ibu hadir di situ. Mereka ikut berkumpul dengan para pemuda itu.

Bohito, menjadi hidangan utama diskusi mereka siang itu. Kecuali sang ibu yang memakai *bate*-sarung panjang-yang ikut menemani suaminya. Bohito adalah nama untuk menyebut tuak ala Gorontalo. Hari itu, Minggu, medio Maret 2014, bukanlah kali pertama mereka berkumpul sembari menengak bohito. Hampir setiap hari, kondisi ini menjadi pemandangan di Desa Batu Keramat, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo.

Di desa ini, hampir 90 persen tanah mereka dikuasai oleh PT Pabrik Gula Gorontalo, di bawah bendera PT Rajawali Nusantara Indonesia. Perusahaan ini beberapa kali berganti nama. Dahulunya, dijamin orde baru, perusahaan ini populer dengan nama PT Naga Manis. Orang tua sampai anak-anak, sangat akrab dengan nama ini.

Jalan utama di Desa Batu Keramat dulunya beraspal.

Namun kini jalan itu penuh lubang dan berbatu. Sejauh mata memandang, desa ini dikelilingi oleh kebun tebu. Tak ada lagi ampun buat lahan kosong. Bahkan, untuk bermain sepak bola saja, para pemuda yang berkumpul itu sangat sulit mencari lapangan.

“Terus mau bikin apa lagi. Kalau hanya kebun, semuanya sudah dimiliki oleh pabrik. Untuk bermain bola saja, lapangannya harus pinjam di perusahaan. Lebih baik minum bohito. Hanya itu yang bisa dilakukan,” Kata-kata itu diucapkan oleh Karim Adam, 32 tahun, kepada saya. Nadanya terdengar frustrasi, namun penuh emosi.

Ka Kucu, panggilan akrab Karim Adam mulai bercerita. Menurutnya, Desa Batu Keramat hanyalah salah satu dari beberapa desa di Kecamatan Wonosari yang lahannya dikuasai oleh pabrik gula untuk ditanami tebu. Bahkan katanya, tidak hanya lahan warga, pabrik gula juga menguasai gunung dan sungai yang tak jauh dari desa.

Untuk menandai bahwa gunung itu tidak boleh menjadi milik warga, maka modusnya, perusahaan menanaminya dengan pohon karet. Itu sebagai awal saja. Kemudian, perlahan-lahan akan berubah menjadi kebun tebu.

“Alasan ditanaminya pohon karet terlebih dahulu untuk menandai bahwa lahan itu adalah milik pabrik gula Gorontalo,” ungkap Ka Kucu.

Hal serupa diucapkan Usman Yusuf, 34 tahun, kepala Dusun Rumbia. Dahulu, kata Podu-panggilan untuk kepala dusun- keseharian masyarakat di Desa Batu Keramat jauh sebelum berdirinya pabrik gula aktivitas semua warganya adalah bertani jagung. Ada juga yang ikut menambang. Sehingga kehidupan mereka tergolong berkecukupan.

“Dulu kami punya kebun sendiri untuk menanam

jagung. Tapi sekarang kebun sudah diambil perusahaan gula. Perusahaan mengklaim sudah membelinya, padahal kami tidak pernah menjual," tandas Usman.

Sekarang masyarakat harus gigit jari. Tak ada lagi lahan untuk menanam jagung, dan aneka pangan lainnya. Yang ada, masyarakat tinggal mengolah lahan yang menjadi pekarangan rumah sendiri. Luasnya tak seberapa. Rata-rata ukurannya sekira 5X8 meter. Itu pun hanya bisa ditanami ubi jalar.

"Di halaman ini, kami biasa menjemur jagung. Tapi sekarang sudah tak ada lagi. Bahkan mesin penggiling jagung tinggal menjadi hiasan di halaman rumah. Apalagi yang mau digiling?" ungkap Usman dengan nada tanya.

Ia mengungkapkan, kondisi ini sudah berlangsung lama. Awalnya mereka menaruh harapan yang besar kepada perusahaan. Tapi kenyataannya sungguh berbeda. Lambat tapi pasti, pihak pabrik dengan leluasa melakukan penyerobotan hak atas tanah masyarakat Desa Batu Keramat.

"Kalau kalian tidak menjual lahan ini kepada kami, maka akan kami ambil dengan cuma-cuma!" kata orang perusahaan, yang ditirukan kembali oleh Usman.

Ia mengatakan, berbagai macam upaya perlawanan telah ditempuh masyarakat dalam mempertahankan hak milik mereka. Mulai dari mengoperasikan tambang rakyat yang pernah ditutup paksa oleh pihak pabrik. Luas tambang yang berada dibalik gunung itu dioperasikan secara diam-diam. Sebab proses perijinannya sedang dalam pengurusan.

Potensi konflik sangat besar terjadi di desa ini. Sebab masyarakat merasa dibuat tidak nyaman oleh perusahaan gula. Masyarakat merasa hak mereka dikebiri. Sementara pemerintah desa yang seharusnya menjadi tempat mereka bernaung, justru dianggap tidak bisa berbuat banyak.

“Bahkan seringkali pemerintah desa terkesan lebih membela perusahaan gula. Ini bisa terlihat dari beberapa kali pemerintah desa mencoba memperingati masyarakatnya yang melakukan aktifitas pertambangan. Kami sekarang pasrah saja. Tidak melawan hak kami diambil. Mau melawan pun hak tetap diambil,” ujar Alex, seorang pemuda di Desa Batu Keramat.

Di desa ini harga gula perkilogramnya tetap sama dengan harga di wilayah perkotaan. Untuk satu kilogram seharga Rp12.000. Masyarakat justru berharap, gula bisa didapatkan dengan murah karena begitu dekat dengan perusahaannya.

Sayang, manisnya gula justru tidak mampu dikecap oleh masyarakat yang setiap harinya bersentuhan dengan tebu. Mulai dari pembibitan sampai dengan pemotongan.

Saat ini profesi masyarakat batu keramat yang dulunya adalah petani dan penambang kini berubah menjadi buruh pabrik atau *tukang paras* dengan upah yang sangat rendah.

“Gaji tukang paras tebu satu hari Rp 150.000 per hektar. Dalam satu hektar ada 10 orang tukang paras. Jadi jika dibagi hasil maka setiap orang hanya dapat Rp15.000,” kata Aliya, 29 tahun.

Tidak hanya kaum lelaki yang menjadi buruh perusahaan. Namun juga kaum ibu seperti Aliya, ikut menjadi buruh. Dan ini menjadi pemandangan yang lazim di masyarakat di Desa Batu Keramat. Upah yang sangat kecil mereka terima, tak sebanding dengan biaya hidup untuk kebutuhan setiap hari. Berbeda dengan ketika masyarakat masih berkebun. Aneka pangan bisa ditanam dan dimakan atau dijual. Sekarang mereka harus menjadi buruh dengan yang sangat rendah.

MALAPETAKA LADANGTEBU (2)

Oleh **NOVA DAUD**

<http://degorontalo.com/malapetaka-ladang-tebu-2/>

Berdirinya pabrik gula awalnya memberikan harapan yang besar bagi masyarakat di Desa Batu Keramat. Sayangnya, manisnya gula justru tidak mampu dirasakan orang sekitar. Masyarakat akhirnya harus merasakan pahitnya hidup berada di kawasan pabrik gula itu.

Verrianto Madjowa, salah satu peneliti senior mengatakan, tanaman tebu atau dalam bahasa Gorontalo disebut *patodu* merupakan salah satu simbol adat di *limo lo pohalaa*. Tebu ini sebagai perlambang rezeki atau makanan kemakmuran. Akan tetapi di Paguyaman, dimana konsensi pertama pabrik gula dilakukan, tebu yang ditanam ribuan hektare itu, bukan perlambang kemakmuran. Pembangunan pabrik dan pembebasan lahan untuk ditanami tebu telah membawa kemiskinan bagi rakyat setempat.

“Lokasi pabrik gula Gorontalo itu termasuk kawasan yang subur untuk pertanian. Lahan ini cocok untuk areal persawahan untuk ditanami padi, jagung dan tanaman lainnya,” ungkap Verrianto.

Verrianto yang juga aktivis lingkungan ini juga menjelaskan, luas Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) perusahaan ini 15.700 hektare. Sebagian lahan ini berbukit-bukit dan tak cocok untuk ditanami tebu.

Awalnya, pemerintah memberikan konsesi bagi PT Naga Manis, nama awal pabrik gula Gorontalo, dengan luas 25 ribu hektar.

“Yang mencoba bertahan tidak menjual tanahnya mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan. Alasan perusahaan dan aparat pemerintah kala itu, pabrik ini akan menyejahterakan rakyat Gorontalo.”

Verrianto mengungkapkan, uji coba dan awal produksi gula dilakukan mulai tahun 1992. Namun hanya bertahan selama tiga tahun yakni 1995. Selama dua tahun produksi gula sempat terhenti. Kemudian pengelolaan perusahaan beralih ke PT RNI (Rajawali Nusantara Indonesia) III. PT Naga Manis Plantation telah menjual sahamnya kepada Rajawali pada Oktober 1997.

RNI adalah badan usaha milik negara yang mengambil alih perusahaan dan berganti nama menjadi PT Rajawali III. Lalu perusahaan terlilit masalah dengan BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional), karena terlilit utang di Bank Bumi Daya senilai lebih kurang Rp400 miliar. Pelepasan saham yang ditangani BPPN sebesar 66,7 persen.

Menurut Verrianto lagi, perusahaan beralih ke PT Deluxe International yang memenangkan proses pelelangan. PT Pabrik Gula Gorontalo unit PG Tolangohula adalah bagian dari PT Deluxe International. Deluxe membeli saham melalui pelelangan yang dilakukan BPPN (66,7 persen). Sisa 33,3 persen masih dikuasai PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI).

Kondisi terkini, katanya lagi, dalam berbagai polemik yang ada, Kejaksaan hanya menghitung kerugian negara. Bagaimana kerugian rakyat setempat yang kehilangan lahan pertanian sebagai penopang kehidupan sejak tahun 1990 tak pernah dihitung. Banyak di antara mereka masuk dan

membuka kebun di hutan. Ada juga yang hanya sebagai petani penggarap.

“Pemerintah perlu melakukan regulasi terhadap proses alih fungsi lahan terutama lahan pertanian yang subur dan produktif. Fenomena yang muncul, yakni menyusutnya lahan pertanian. Setiap tahun tanah garapan ini menyempit atau berkurang. Hilangnya lahan produktif untuk pertanian yang dijadikan perkebunan tebu juga berimbas pada sumberdaya hutan.”

Verrianto menambahkan, setelah lahan pertanian beralih menjadi lahan perkebunan tebu, petani mengalami perubahan maupun pergeseran. Lahan pertanian berkurang sehingga kesempatan untuk mengembangkan usaha dalam bidang pertanian kian terbatas. Keterbatasan pengembangan usaha mempengaruhi penurunan pendapatan petani, serta berbagai hal yang sangat bersentuhan dengan pola kehidupan petani sehari-hari.

Bekerja di perusahaan pabrik gula memerlukan keahlian atau harus memiliki pendidikan formal. Memiliki pendidikan formal sekalipun, untuk masuk dan bekerja di perusahaan tidak mudah karena harus melalui seleksi yang ketat berdasarkan aturan perusahaan. Kalau pun diperbolehkan atau diterima sebagai pekerja di perusahaan, hanya sebagai buruh tebang tebu atau pembersih ladang.

Dan kini, para buruh yang berasal dari desa-desa yang berdekatan dengan pabrik gula Gorontalo itu hanya bisa meratapi nasib, mengutuk kepahitan hidup di ladang tebu, sembari meneguk bohito.

BUDI DAYA MANGGA KWENI UNTUK MENINGKATKAN EKONOMI DAN KEAMANAN PANGAN

Oleh **RASYID AZHAR**

<http://www.jambura-online.com/kategori/gorontalo/budi-daya-mangga-kweni--untuk-meningkatkan-ekonomi-dan-keamanan-pangan-.html#U09ixlWSxe9>

Pasar Minggu Telaga Kabupaten Gorontalo belum usai, waktu menunjukkan jam 10.35 Wita, namun panas terik matahari terasa membakar permukaan kulit.

Sejumlah pedadang memasang terpal plastik, untuk berteduh dan melindungi dagangannya dari udara panas ini.

Mendekati jam 11.00 Wita terik panas mulai mengusir pedagang. Satu-persatu mereka mengemasi dagangannya, membungkus di karung atau dos besar pembungkus rokok seadanya sebelum menaikkannya di bentor dan gerobak, matahari hampir di atas kepala. Pasar telah usai, hanya menyisakan sedikit pembeli.

Bagi Hadijah, hari ini menghadapi kenyataan, mangga kweninya masih satu karung belum dibuka sementara karung satunya masih menyisakan setengahnya. Ia duduk lemas di teras sebuah kios, berderet dengan pedagang pisang. Meski beraroma harum, tidak banyak yang pembeli yang menyinggahinya meski mulut perempuan paroh baya ini

menawarkan kepada pembeli yang lalu lalang di depannya.

“Kweni murah, Kweni murah, Kweni murah, Rp5000 dapat 7 buah” teriak Hadijah. Pengunjung pasar terus berlalu tak hirau, dan ia terus melengkingkan suaranya, bukan hanya untuk mendapat perhatian pembeli, namun terasa menyayat mengadukan nasibnya pada Yang Maha Kuasa.

“Saya sudah tiga pekan ini menjual mangga Kweni di beberapa pasar harian, kemarin saya menjual di pasar Sabtu Liluwo” kata Hadijah, Minggu (2/2).

Bagi ibu 4 orang anak ini, mangga kweni yang tidak laku ini tidak saja menjadi beban berat saat pulang ke rumahnya, ia suda terbayang harus memikul atau meminta bantuan orang lain untuk memindahkan. Hadijah juga harus menghadapi kenyataan lain di rumah, memiikirkan bagaimana menghidupi keluarganya dengan uang yang pas-pasan.

“Mangga Kweni tidak tahan lama, makin makin masak dan akhirnya tidak laku” papar Hadijah sambil mengemasi barangnya kecut.

Siang ini ia memperkirakan tidak ada lagi pembeli yang datang. Ia sudahi berjualan, mengemas mangga di depannya. Peluhnya menetes dari keningnya, membasahi mangga kweninya. Ia tak hirau dan terus mempercepat gerakannya. Hari sudah tua, panas makin menyengat.

Ia mengaku dagangannya kurang diminati pembeli, ia hanya menduga banyak pedagang serupa yang berjualan di pasar. Namun ia juga menjelaskan banyak pembeli buah yang lebih memilih buah-buah asal luar negeri yang dijual di pasar ini.

Hadijah menjelaskan jika buah impor ini sudah dipajang di kios samping stadion 23 Januari depan terminal antar kabupaten, tempat strategis sebelum masuk ke pasar Minggu

Telaga.

Keberadaan pedagang buah di stadion 23 Januari ini memang ditempatkan di area ini oleh Pemerintah Kabupaten Gorontalo, menggenapi keberadaan terminal Telaga yang setiap harinya diramaikan penumpang kendaraan umum.

“Banyak orang yang mengatakan buah apel atau pear dari China lebih enak dan menarik, bisa digunakan untuk oleh-oleh atau dimakan di keluarga, harganya murah dan bisa membeli eceran” jelas Hadijah.

Masuknya buah impor ke Gorontalo tidak hanya memenuhi rak pasar swalayan, tapi juga hingga di pinggiran jalan dan pasar harian.

Buah impor memang menggiurkan dari tampilan fisiknya, berwarna menyolok, bersih, dan dipajang menarik. Tidak ada catatan resmi masuknya buah ini ke Gorontalo. Bahkan pedagang di stadion 23 Januari hanya mengaku setiap minggunya mendapat pasokan 2 kali dari orang yang mengaku dari Manado, Sulawesi Utara.

Bagi Hadijah, dan juga pedagang buah lainnya, ia harus berjuang sendiri menjajakan mangga kweni yang dibeli dari kampung ke kampung. Kweni lokal harus bersaing dengan buah-buah impor luar negeri yang kini sudah masuk di pasar tradisional.

Membanjirnya buah impor di pasar tradisional juga dibenarkan Hamdi, pedagang pisang. Ia menunjukkan lokasi pedagang buah impor di bagian depan pasar Minggu Telaga. Buah yang biasa dijual adalah apel.

“Kamu bisa membeli kiloan atau eceran, semua akan dilayani” kata Hamdi.

Sementara itu di tempat lain, Rahmat, warga Desa Tulabolo Kecamatan Suwawa Timur Kabupaten Bone Bolango

memiliki beberapa pohon mangga kweni di halaman belakang rumahnya.

Menurutnya, mangga ini tumbuh liar. Meski tumbuh sendiri nyaris tanpa perawatan, setiap tahunnya berbuah lebat.

“Mangga kweni memang berbeda dengan mangga jenis lain seperti manalagi. Kweni memiliki buah yang lebih banyak, Cuma sayangnya orang di sini kurang menyukainya” kata Rahmat.

Jika berbuah seperti saat ini, hanya dikonsumsi sendiri atau dibagi kepada tetangga atau saudaranya.

Mangga biasanya dipetik saat masih mengkal, baunya harum dan memiliki tekstur agak berserat.

“Paling banyak dikonsumsi anak-anak, seperti mangga isap” kata Rahmat.

Tahun lalu ia bisa menjual kepada pedagang, seluruh buah yang ada di pohon dijual dengan harga Rp500 ribu. Pedagang memetikinya tanpa menyisakan.

Musim buah kweni yang berlimpah rupanya tidak berpihak kepada Rahmat, buah-buah yang berlimpah itu akhirnya ia bagikan ke tetangga atau sanak saudara yang mengunjunginya.

Desa Tulabolo merupakan desa terakhir di Kecamatan Suwawa Timur yang langsung berbatasan dengan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone. Selain mangga kweni, banyak juga jenis lain yang tumbuh subur.

Durian juga menjadi andalan desa ini meskipun untuk memetikinya mereka harus memasuki kawasan Taman Nasional.

Jika sudah musimnya, aroma durian dan kweni masak yang harum selalu menyebar di pinggiran kawasan terbatas

ini, menggoda setiap pejalan kaki asal desa Pinogu yang melintas.

Mangga kweni juga lazim ditemukan di daerah lain, mulai dari perbatasan dengan Sulawesi Utara bagian Utara, Kecamatan Atinggola ke arah barat, Kecamatan Kwandang, Anggrek, Sumalata, hingga ke Tolinggula di bagian barat yang berbatasan dengan Kabupaten Buol.

Demikian juga kawasan selatan Gorontalo yang berbatasan dengan Sulawesi Utara bagian selatan, Taludaa dan pesisir selatan kabupaten Bone Bolango, kota Gorontalo, Kecamatan Batudaa Pantai Kabupaten Gorontalo, Kecamatan Paguyaman Pantai Kabupaten Boalemo hingga ke Kecamatan Popayato Kabupaten Pohuwato.

Demikian halnya wilayah tengah Provinsi Gorontalo, semuanya ditumbuhi mangga kweni dengan subur.

Saat musimnya, kweni-kweni bergelantungan menebar aroma harum, mengundang orang memetikinya. Di setiap kebun, halaman, atau pinggir jalan, kweni menjadi daya tarik tersendiri.

Kweni adalah buah yang sangat familiar di Gorontalo, sejak anak kecil hingga orang dewasa mengenalnya dengan baik.

Meski sudah sangat umum di Provinsi Gorontalo, namun kweni bukanlah komoditas perkebunan utama daerah ini.

Dalam data yang dirilis situs Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang berasal dari Provinsi Gorontalo, Pemerintah hanya memasukkan komoditas tebu, cengkeh, coklat, kopi, aren, jambu mete, kayu manis, kemiri, vanili, dan kelapa sebagai tanaman utama subsektor perkebunan.

Di subsektor pertanian, selain padi pemerintah Provinsi Gorontalo hanya mengembangkan jagung, kedelai, pisang,

ubi jalar dan ubi kayu.

Pengembangan komoditas lokal memiliki nilai strategis dalam pembangunan ekonomi Gorontalo. Salah satu yang harus dilakukan adalah pengembangan buah lokal, salah satunya adalah mangga kweni.

Sebagai tanaman yang sudah familiar, selayaknya kweni menjadi komoditas unggulan daerah ini. Sikap penerimaan masyarakat terhadap tanaman ini sangat baik, dari sisi hulu mangga kweni sudah dipahami masyarakat mulai pengenalan dan tata cara penanaman hingga perawatan menjadi tanaman dewasa yang siap berbuah.

Sedang di sisi hilir mangga kweni memiliki pasar potensial yang sangat luas, masyarakat selama ini sudah menikmati buah kweni segar sebagai sumber makanan yang bernilai gizi tinggi. Jika digarap dengan serius akan menjadi produk ekspor yang dapat memperkuat ekonomi masyarakat.

Penganekaragaman produk juga member peluang pertumbuhan industri skala rumah tangga hingga menengah.

Selain mangga kweni untuk dikonsumsi sebagai buah segar, juga dapat dikemas sebagai buah kaleng, selai, atau produk lain yang memiliki nilai tambah.

Diharapkan diversifikasi produk olahan mangga dapat memiliki efek multiplier yang mampu menggerakkan ekonomi masyarakat dan sektor lainnya.

Ketersediaan buah ini dalam jumlah yang berlimpah juga akan menjadi kebanggaan masyarakat. Mereka memiliki buah khas yang menjadi penopang ekonomi.

Memajukan dan mengembangkan buah kweni juga diharapkan menjadi alternatif penyeimbang maraknya buah impor seperti pear, jeruk dan apel dari luar negeri. Buah impor ini adalah produk perkebunan skala besar yang dapat

menenggelmakan produk lokal.

Dari sisi kesehatan, masuknya buah impor ke Gorontalo patut diwaspadai. Sinyalemen penggunaan bahan tertentu untuk mengawetkan kesegaran buah, yang dikhawatirkan berdampak pada kesehatan manusia, baik langsung maupun tidak langsung.

Kekhawatiran ini diungkapkan oleh Dr Mario Mulyady, Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pusat Informasi Jagung Provinsi Gorontalo.

“Setidaknya dari panen buah hingga pengepakan, penyimpanan dalam gudang, pengapalan, penggudangan negara tujuan hingga ke masyarakat membutuhkan waktu yang cukup lama, bisa mencapai 3 bulan. Tapi kenapa buahnya tetap terlihat segar? Ini patut dipertanyakan dan kita sebagai konsumen harus kritis melihat masalah ini.” Kata Dr Mario Mulyady.

Kritik pakar pertanian ini juga menyangkut masalah jaminan pemerintah terhadap keamanan mengkonsumsi buah impor. Jika produk industri yang beredar harus memiliki izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), maka peredaran buah impor di tengah masyarakat hingga kini belum diatur dalam pengawasan.

Sehingga masyarakat rentan terhadap masalah kesehatan.

“Kita semua tidak tahu bahan apa yang dicampurkan sehingga buah impor terlihat segar dan awet” kata Dr Mario Mulyady.

Maraknya buah impor yang beredar di masyarakat memiliki dampak bagi masyarakat. Satu sisi mempunyai peran sebagai pelengkap ketersediaan buah segar, namun di sisi lain berpotensi menyingkirkan buah lokal dan mematikan usaha budi daya masyarakat.

Mengangkat kembali potensi ekonomi masyarakat dengan memuliakan dan budi daya mangga kweni tidak saja member penguatan ekonomi dan pangan masyarakat, namun juga melindungi masyarakat sebaai konsumen dan pelaku usaha dari gempuran buah impor yang dikelola industri besar dan eksploitatif.

Hadijah dan juga banyak pedagang buah, pemilik kebun dan semua yang terlibat dalam proses produksi mangga kweni bisa menjadi pelaku ekonomi yang tangguh, berdedikasi menyediakan keamanan pangan untuk masyarakat.

Sedangkan masyarakat konsumen mendapat jaminan untuk mengkonsumsi buah segar dan produk olahan buah sesuatu standar mutu yang disyaratkan.

Saatnya mengangkat mangga kweni sebagai kekuatan ekonomi dan sumber pangan menuju Gorontalo yang berkeadilan.

PERUBAHAN IKLIM DAN ANCAMAN PUSO PETANI NTT

Oleh **YOHANES ADRIANUS**
<http://www.antaranews.com/>

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), memprediksi anomali hujan masih terjadi pada beberapa daerah di Nusa Tenggara Timur, meskipun daerah lain telah memasuki musim transisi atau peralihan dari musim basah ke musim kering.

Anomali hujan yang dimaksud berupa hari kering yang panjang (long dryspell) selama Februari hingga Maret ini dan sangat berpotensi terhadap kekeringan pada beberapa daerah yang berbasis kepulauan seperti di Nusa Tenggara Timur ini.

Hasil pantauan satelit, pada Stasiun Klimatologi Lasiana, menyebutkan, daerah-daerah di NTT yang mendapat dampak dari anomali hujan antara lain Kabupaten Manggarai Timur, sebagian kabupaten Ngada, Ende, Sikka, Flores Timur, Lembata, Sumba Timur, Timor Tengah Selatan, dan kabupaten Malaka.

Curah hujan pada bulan Maret di daerah-daerah itu umumnya kurang dari 100 mm dari idealnya 150 mm per bulan dan hari hujan yang terjadi kurang dari 10 hari. Akibatnya banyak tanaman lahan kering termasuk lahan basah mengalami kekurangan air, bahkan ada yang sama sekali tidak

diairi ketika sedang berbunga atau hendak tumbuh isi dalam buler, sehingga tidak berkembang dengan normal.

Di Kabupaten Malaka, misalnya, sebagian petani lahan kering yang bermukim di wilayah perbatasan RI-Timor Leste itu mulai resah karena sekitar 1.474, 63 hektare lahan yang telah ditanami jagung dan padi gagal panen.

Selain di Kabupaten Malaka, ada sejumlah daerah di provinsi selaksa pulau itu juga mengalami hal senada, kendati masih secara sporadis terjadi di sejumlah lokasi pertanian yang dimiliki.

Data yang lebih ekstrim ditemukan di sebagian besar pantai selatan Kabupaten Lembata, yang sejak 12 Maret sudah tidak lagi diguyur hujan, meski di daerah lain curah hujannya tinggi.

Di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) dan Timor Tengah Utara (TTU) misalnya, dalam sepekan terakhir baru turun hujan ketika tanaman petani sudah gagal karena pada waktunya berbuler tidak disirami air hujan.

Lantas apa yang harus dilakukan oleh para petani, menghadapi kekuatan alam, dengan anomali iklim yang datang, seolah tak menghiraukan peluh dan keringat para petani di daerah ini?

Ternyata, hampir sebagian petani hanya bisa berpasrah dengan kondisi alam yang ada, sembari mengedepankan sejuta asa akan perubahan kondisi pada tahap kedua musim tanam triwulan II tahun ini.

“Para petani yang menyebar di 16 desa dalam wilayah kecamatan yang berbatasan dengan Distrik Kobalima, Timor Leste, sudah pasrah karena kondisi alam belum berpihak, meski tetap berharap kondisi ini berubah pada tahap kedua musim tanam pada triwulan II tahun ini,” kata Camat Malaka

Barat, Kabupaten Malaka Yustinus Nahak.

Dia menyebut dari total luas lahan tanaman petani tersebut sekitar 914, 63 hektare merupakan lahan kering yang ditanami jagung dan sisanya sekitar 560 hektare merupakan lahan basah yang ditanami padi, dan dipastikan gagal panen karena curah hujan tidak beraturan dan kekurangan air untuk mengairi sawah yang ada.

Dari total 914, 63 hektare itu sekitar 390, 02 hektare dalam kondisi terancam karena saat mulai muncul buler terjadi kekeringan hebat, sehingga tidak sampai berkembang normal.

Dalam perkiraannya, jumlah tanaman dan luasan lahan petani masih jauh lebih banyak lagi di wilayah tersebut, dan wilayah lain di Kabupaten Malaka dan Belu yang mengalami nasib serupa, hanya saja belum dirasakan, atau sudah ada tetapi belum dilaporkan.

Dosen Fakultas Pertanian Universitas Negeri Nusa Cendana Kupang, Ignatius Sinu Bataona, berpendapat, merujuk kecenderungan yang siklik, maka daerah-daerah yang mengalami gagal panen tahun 2014 ini, akan terus dilanda kondisi kekurangan pangan, yang bisa juga menyebabkan kaum taninya mengalami kelaparan berkepanjangan, jika musim tanam tahun berikutnya panennya gagal lagi.

Berusaha tani tanaman tahunan padi dan jagung di daerah lahan kering baik di ladang maupun di sawah adalah berurusan dengan ketidakpastian panen. Keberhasilan panen tanaman padi dan jagung sangat bergantung kepada iklim ekstrem daerah ini.

Iklim ekstrem itu sangat berpengaruh pada ketersediaan air yang terbatas, serta serangan hama dan penyakit tanaman. Iklim yang bersahabat akan membentuk kondisi yang kondusif bagi keberhasilan panen tanaman padi dan jagung. Sebaliknya

iklim yang tidak bersahabat akan membentuk kondisi yang merugikan bagi keberhasilan panen tanaman padi dan jagung.

Hujan yang lama, lima sampai enam bulan dalam setahun, dan teratur akan membentuk kondisi kondusif bagi keberhasilan tanaman tahunan. Sebaliknya, hujan yang singkat, tiga sampai empat bulan dalam setahun, dan tidak teratur akan membentuk kondisi yang buruk bagi kegagalan tanaman tahunan.

Gagal panen di beberapa tempat di NTT tahun 2013/2014 ini, bisa menyebabkan kondisi rawan pangan. Maksudnya, petani yang gagal panen padi dan jagung hanya kekurangan padi dan jagung, tetapi masih bisa makan dari kemungkinan-kemungkinan usaha tani lainnya yang digeluti. Seperti usaha tani singkong, ubi jalar, usaha tani hortikultura sayur dan buah, usaha tani kemiri, mente, kakao, usaha ternak babi, kambing dan sapi.

Petani juga bisa meramu hasil hutan baik kayu dan non kayu untuk mendapatkan uang tunai yang bisa digunakan membeli beras, dan aneka kebutuhan lainnya untuk konsumsi.

PEMERINTAH DIMANA?

Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunana Nusa Tenggara Timur Anis Tay Ruba mengatakan telah mengajukan permohonan cadangan benih tanaman kepada Kementerian Pertanian RI, untuk mengatasi gagal tanam (puso) di sejumlah daerah, sebagai akibat perubahan iklim.

Dia mengaku sejumlah daerah di provinsi kepulauan itu, mengalami gagal tananam dan gagal panen, sebagai akibat perubahan iklim yang sangat ekstrem. Selain, karena perubahan iklim, juga telah terjadi serangan hama belalang, yang merusak tanaman padi dan jagung milik petani lahan

sejumlah kabupaten.

Sejumlah daerah yang terancam puso karena kekeringan, antara lain, di Kabupaten Lembata, sebagian Sumba dan Timor tengah Selatan, serta Kabupaten Malak. Hal itu telah mengakibatkan kehilangan harapan petani untuk terus menanam, karena ketiadaan cadangan bibit.

“Karena itu, kami sedang mendata kebutuhan bibit di setiap daerah yang terancam puso untuk selanjutnya kita pastikan jumlah kebutuhan dan memintanya kepada Kementerian Pertanian,” katanya.

Terhadap sejumlah lahan di Kabupaten Malaka dan di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) yang terserang hama belalang, Anis mengaku telah mengatasinya bersama Dinas Pertanian daerah masing-masing, dengan mengirimkan pestisida.

Semua langkah yang dilakukan oleh pemerintah melalui dinas pertanian baik di kabupaten maupun di provinsi, hanya ingin memberikan semangat kepada semua petani untuk tetap melakukan penanaman dan jangan berhenti. Karena lanjut dia, terhadap ketersediaan bibit akan menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah untuk menyediakannya, selain juga ditangkar di setiap daerah.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERTANIAN

Peneliti Pertanian Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, Nusa Tenggara Timur Dr Zet Malelak, mengatakan perlu bagi pemegang kekuasaan di daerah ini, untuk mengimplementasikan sejumlah kebijakan di sektor pertanian demi kepentingan ketahanan pangan masyarakatnya.

Menurut Dosen Fakultas Pertanian Universitas Kristen Artha Wacana Kupang itu, dalam tataran kebijakan,

Pemerintah Nusa Tenggara Timur, sangat memiliki sejumlah perhatian yang cukup, dalam konteks semangat. Namun demikian tidak untuk kepentingan implementasinya.

Sejumlah hasil riset dan penelitian yang dilakukan oleh sejumlah ahli pertanian di Nusa Tenggara Timur, tidak pernah diimplementasikan secara baik oleh pemegang kekuasaan di daerah ini, sehingga berakibat kepada terpuruknya kondisi pangan masyarakat di seluruh wilayah ini.

Pada setiap masa kemarau, pasti akan terjadi kekeringan dan paceklik bagi para petani dan masyarakat di NTT, karena ketiadaan hasil pangan. Kondisi itu, juga berdampak kepada terjadinya busung lapar dan kelaparan bagi masyarakat.

Sebaliknya pada musim hujan, masyarakat akan terkena serangan gagal panen dan gagal tanam, sebagai akibat dari bencana banjir dan lainnya. "Untuk itu perlu implementasi riil semua rekomendasi pertanian dari peneliti dan ahli pertanian oleh pemegang kekuasaan daerah ini," katanya.

Salah satu contoh, implementasi adalah dengan pemberian subsidi pada musim tanam kedua, sebagai salah satu strategi peningkatan pangan (jagung) di lahan kering seperti NTT. Karena hal yang paling rapuh dalam kegiatan pertanian adalah pada kegiatan pertanian primer, dan berisiko pada aspek budidaya. Hal ini, tidak hanya berlaku untuk sektor pertanian pangan, tetapi juga pada sektor lain, seperti kehutanan, perkebunan, perikanan dan peternakan.

Menurut dia, pelaksanaan subsidi yang selama ini terjadi, khusus kepada petani, hanya terjadi jika terdapat proyek dan lainnya, meskipun tidak tersistem, terputus-putus, yang berdampak kepada kesulitan bagi petani, untuk mengukur kemandiriannya.

"Jika hal ini tidak berubah dengan sebuah implementasi

yang baru, sangat tidak mungkin akan ada peningkatan produktivitas hasil pertanian di daerah ini, yang oleh Gubernur telah dijadikan sebagai provinsi jagung dan pangan lokal lainnya,” katanya.

Dia mengatakan solusi subsidi yang harus bisa dilakukan oleh pemerintah pada musim tanam kedua (Mei-Agustus), yaitu pada faktor-faktor produksi yang tidak dapat diakses secara mudah oleh para petani, masing-masing, benih unggul, mekanisasi, pengairan, pupuk obat-obatan, serta pendampingan.

Menurut Zet Malelak, hasil penelitian yang dilakukan menyatakan bahwa produksi jagung yang ditanam pada musim tanam pertama (November-April), akan mengalami banyak kendala, karena hujan tidak menentu, gulma, angin berat yang cukup kencang, pemupukan yang tidak efektif dan kesulitan pengontrolan.

Dalam kondisi itu, lanjut Zet Malelak, produktivitas hasil pertanian khusus jagung akan sangat rendah dan akan kalah bersaing dengan hasil produksi komoditi yang sama (jagung) dari daerah lainnya, yang melakukan hasil produksi dari musim tanam kedua.

“Karena itu harus dilakukan pada musim tanam kedua,” ujarnya.

Nusa Tenggara Timur, kata dia, sangat cocok dan kondusif dengan budidaya jagung, dan komoditas pertanian lainnya, karena memiliki tingkat pemanasan (matahari) di atas 12 jam.

Dalam uji coba yang dilakukan di beberapa lokasi, pada Juli 2011 dan 2012, produktivitas jagung hibrida bisa mencapai delapan ton/hektar pipilan kering, dengan biaya produksi Rp5,6 juta, dengan model irigasi tetes (drip irrigation).

“Sementara hasil untuk jenis jagung manis, mencapai 32

ton/hektar basa dengan kadar gula 16 persen. Suatu hasil yang sangat baik dibanding hasil produksi jagung manis di Mataram dan Bali," katanya.

Dengan begitu, nyata terlihat, bahwa tanah di wilayah Nusa Tenggara Timur, memiliki kemungkinan untuk bisa menjadi basis produksi jagung, menyaingi daerah produksi lainnya di Indonesia. Namun demikian, butuh komitmen yang kuat dari seluruh pengambil keputusan, agar program jagung yang digagas Gubernur NTT, bisa menjadi penarik yang kuat untuk ekonomi rakta daerah ini.

Komitmen dan implementasi yang riil di lapangan oleh pemegang kuasa, dibutuhkan untuk ekonomi masyarakat dan petani di NTT demi ketahanan pangan masyarakat, agar tidak lagi diancam puso, karena terjadi perubahan iklim.

BUAH LONTAR TAK SEKEDAR MAKANAN TERNAK

Oleh **LEONARD RITAN**

<http://www.nttonlinenow.com/component/content/article/76-artikel-ntt/6058-buah-lontar-tak-sekedar-makanan-ternak>

Kampanye Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk mengkonsumsi pangan lokal hanya sebatas jagung, pisang dan ubi- ubian. Mungkin saja kampanye tentang pangan lokal ini berangkat dari kebiasaan masyarakat mengkonsumsi jenis pangan dimaksud, yang oleh masyarakat saat ini mulai ditinggalkan. Padahal NTT memiliki begitu banyak potensi sumber daya alam yang bisa dikelola sebagai makanan alternatif karena memiliki nilai gizi yang sangat tinggi. Salah satu potensi yang luput dari perhatian pemerintah adalah buah lontar.

Hampir semua masyarakat NTT memanfaatkan pohon lontar pada tiga aspek, yakni batang untuk bahan bangunan, daun untuk anyaman, dan diambil niranya. Sedangkan buahnya, terutama yang tua dan jatuh karena masak, dibiarkan begitu saja. Kalaupun dipungut, itu sebatas untuk makanan ternak terutama babi. Padahal kualitas buah yang tidak pernah membusuk, sama seperti buah manggis, memiliki anti oksidan yang sangat tinggi untuk kesehatan.

Penelitian yang dilakukan terhadap lontar, walaupun ada, masih sangat minim. Penelitian yang dilakukan selama ini adalah bagaimana menjadikan olahan nira sebagai salah

satu sumber energi terbarukan. Sementara potensi lain dari lontar, terutama buah yang sudah tua atau masak luput dari penelitian.

Dosen Fakultas Pertanian Nusa Cendana (Undana) Kupang, Nyoman Mahayasa ketika ditemui di kediamannya, Rabu (19/3/2014) menyatakan, sebagai seorang akademisi, dirinya harus melakukan sesuatu untuk masyarakat dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki masyarakat NTT. Komitmen ini terkuak ketika bangsa dan negara ini dilanda krisis ekonomi.

Kaum kapitalis dan borjuis kebingungan dengan kondisi ekonomi yang demikian buruk, sementara kaum marginal dan para petani perdesaan menikmati hidup tanpa berpikir bahwa Indonesia sedang dilanda krisis ekonomi. Masyarakat mengkonsumsi dari apa yang ada di sekitar mereka, seperti ubi- ubian dan kacang- kacang. Sementara buah lontar dibiarkan jatuh tanpa ada kepedulian untuk mengolahnya.

Tergerak dari krisis 1998 itu, Profesor di bidang lontar ini mulai melakukan penelitian terhadap buah lontar, terutama yang jatuh dari pohon karena masak. Hasil penelitian menunjukkan, dalam buah lontar terutama palp lontar (serat) mengandung antioksidan yang sangat tinggi. Juga memiliki kandungan vitamin C yang sangat bagus dan bisa menyembuhkan penyakit kanker, diare, lambung (mag), dan sariawan.

Untuk bisa mengkonsumsi palp lontar, perlu dioleh terlebih dahulu. Hasil olahannya bisa dalam berbagai alternatif, antara lain dodol, slei, kue, kerupuk, dan minuman. "Saya melakukan penelitian dengan berfokus pada buah lontar, karena diabaikan dan dibuang begitu saja," kata Nyoman.

Karena ketekunan terhadap penelitian dan usaha di

bidang lontar, Nyoman telah memiliki dua hak paten, yakni pembibitan lontar dan teknologi lontar dalam menghasilkan dodol dan sirup lontar. Bahkan untuk dodol lontar, Nyoman telah mengantongi izin Departemen Kesehatan (Depkes) SP.No. 03/24. 13/99. Izin Depkes ini juga ditulis di kemasan dodol lontar. Saat ini sedang dalam proses untuk mendapatkan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) terhadap usaha lontar.

“Saya mungkin satu- satunya yang mengusahakan buah (palp) lontar untuk diolah jadi makanan dan minuman. Karena perhatian orang terhadap lontar hampir tidak ada, kalupun ada jumlahnya sangat minim, ” tandas Nyoman.

Karena khasiat untuk kesehatan yang dimiliki palp lontar sangat tinggi, Nyoman tergerak untuk melatih kelompok-kelompok masyarakat agar bisa mengolah palp lontar untuk dijadikan makanan dan minuman (sirup). Dari sekian banyak kelompok masyarakat yang dilatih, di Kota Kupang hanya ada satu kelompok yang nota bene satu keluarga yang konsisten mengolahnya.

“Awalnya saya bina kelompok di Kolhua, Kota Kupang, tapi tak jalan. Saya juga sudah coba latih kelompok masyarakat di Rote Ndao, tapi tetap jalan juga, ” ujar Nyoman.

Melihat kondisi demikian, sebagai peneliti, Nyoman juga mengusahakan Dodol Lontar dengan mempekerjakan lima orang tenaga kerja. Pemasaran masih sebatas dalam daerah. Ada sejumlah toko kue di Kota Kupang menjadi langganan membeli dan memasarkan Dodol Lontar, seperti toko Sukiran, Sudimampir, dan Mitra Agung. Pemasaran ke luar daerah, bila ada permintaan dalam jumlah yang sudah pasti. Harus diakui, Dodol Lontar lebih banyak digemari orang luar, sedangkan orang NTT sangat minim.

Kendala yang dihadapi dalam mengolah buah (palp)

lontar antara lain, tenaga kerja dan bahan baku. Untuk mendapatkan buah lontar yang berkualitas untuk diolah, dirinya harus mencari keliling Kota Kupang dan sekitarnya. Apalagi, pohon lontar saat ini sudah mulai berkurang dan tak semua pohon lontar menghasilkan buah yang berkualitas untuk diolah. Karena itu, dibutuhkan keseriusan dan ketelatenan dalam mengusahakan palp lontar. Sedikitnya, ada delapan jenis atau produk yang bisa dihasilkan dari olahan palp lontar, selain untuk pembuatan keset.

Tentang harga jual dodol, Nyoman katakan, sangat terjangkau. Setiap kemasan yang diisi sembilan biji dodol, dijual dengan harga Rp5.000, -. Masyarakat atau konsumen tak perlu khawatir untuk mengonsumsi dodol, karena sudah memiliki label halal dan mengantongi izin Depkes. Dodol lontar sangat cocok untuk dijadikan sebagai makanan cemilan, baik di kantor atau hendak bepergian.

Salah satu pengrajin Dodol Lontar, David Djeke Mata mengakui, usaha Dodol Lontar yang digelutinya bersama isteri, Eni Astuti kelahiran Jawa Tmur sejak tahun 2004, dikenalkan oleh Nyoman Mahayasa. Sistem kerja yang diterapkan adalah, Dodol Lontar yang dihasilkan dijual ke Nyoman dengan harga setiap kemasan yang diisi 9 (sembilan) biji dodol senilai Rp3.000. Sementara pendistribusian lanjutan, menjadi tanggung jawab Nyoman sebagai pemegang hak paten.

“Saya bersama isteri mengusahakan Dodol Lontar ini dan dibantu oleh anak-anak. Jadi kami tidak mempekerjakan orang lain. Hasilnya, saya bisa menyekolahkan keempat anak kami dan sulung sudah mengenyam pendidikan perguruan tinggi,” terang David.

Pria kelahiran Pulau Sabu, Kabupaten Sabu Raijua ini menjelaskan, untuk mendapatkan dodol lontar yang bisa

dikonsumsi, tentunya melewati proses yang cukup panjang dan memakan waktu yang lama. Karena pohon lontar tidak terkonsentrasi di suatu daerah atau areal, maka David harus berkeliling hampir seluruh Kota Kupang untuk mendapatkan buah lontar yang jatuh dari pohon karena sudah masak. Prinsipnya, untuk menghasilkan dodol lontar yang siap dikonsumsi, membutuhkan waktu sekitar dua sampai tiga hari. Sehingga dalam seminggu, hanya bisa menghasilkan dodol lontar satu sampai dua kali saja. Setiap kali diproses, menghasilkan 80 kemasan.

David menyampaikan, karena ketekunannya, pada tahun 2007/2008, dirinya dilibatkan oleh Badan Bimas Ketahanan Pangan untuk kegiatan pameran makanan cemilan di Flobamora Mall dan diberi uang Rp5 juta. Sedangkan pada tahun 2013 lalu, Pemerintah Kota Kupang memberi bantuan peralatan. Peralatan yang digunakan untuk menghasilkan Dodol Lontar pun sangat sederhana, antara lain kompor, wajan besar untuk memasak, pisau potong plastik dan alat penggiling ukuran meja serta dacin.

David menambahkan, kunci kesuksesan adalah ketekunan dan kerja keras. Walau pendapatan yang diperoleh dari usaha Dodol Lontar ini terbilang kecil, tapi karena tekun dan telatan, David mampu menyekolahkan empat anaknya. Janganlah bermimpi untuk mendapatkan keuntungan besar, kalau tidak dimulai dari hal-hal kecil.

JERITAN PETANI DI MUSIM TANAM

Oleh **ANTHONY JOHANIS**

Harian Victory news

Petani di wilayah Kota Kupang, bahkan di seluruh NTT selalu menjerit kekurangan stok pupuk setiap musim tanam tiba. Namun kelangkaan pupuk tetap menjadi persoalan dari tahun ke tahun, karena tak kunjung ditangani pemerintah. Akibatnya, produksi pertanian pun seret setiap tahun. Melkianus Lisnahan Ketua Kelompok Tani Fajar Harapan Kelurahan Kolhua, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang yang ditemui, Senin (10/3) mengaku, sudah dua tahun kesulitan mendapatkan pupuk subsidi, walaupun dapat tidak sebanding dengan luas lahan yang dimiliki.

Menurut dia, Kelompok Tani Fajar Harapan memiliki 10 anggota dengan luas lahan basah 5 hektare dan lahan kering 3 hektare dengan rincian satu hektare membutuhkan 300 Kg pupuk urea, ditambah pupuk jenis lainnya. "Musim ini hanya dapat 54 karung pupuk urea tapi tidak cukup dibandingkan dengan luas lahan yang dimiliki," ujarnya.

Dia mengaku, untuk mendapatkan pasokan pupuk dari Kios Mitra Tani Oebufu pun mereka harus menunggu karena ketiadaan stok. Namun demikian mereka tidak pernah

melupakan kewajiban untuk melampirkan rencana defenitif kebutuhan kelompok (RDKK) pupuk bersubsidi dan

mendapat restu dari lurah serta petugas penyuluh lapangan (PPL) berupa surat rekomendasi.

Keluhan petani akan sulitnya mendapatkan pupuk ini tidak berakhir pada mendapatkan pupuk usai menunggu begitu lama. Mereka juga harus meratap menyaksikan hasil panen yang menurun. “Kalau pupuk lancar, satu hektare lahan basah bisa menghasilkan 4 ton gabah kering, tapi kalau pupuk kurang maka produksi turun dari 4 ton per hektare,” pungkas Lisnahan.

Keluhan akan kelangkaan pupuk datang juga dari Hutri Adonis, anggota kelompok tani Sumber Berkat Kelurahan Fatukoa. Ia mengaku kesulitan mendapatkan pupuk saat musim tanam tiba, walau harus berkeliling ke sejumlah pengecer dalam wilayah Kota Kupang. Kalaupun dapat ia harus menunggu tiga minggu. “Selama 21 hari masa tanaman padi ladang seluas 1 hektare wajib ditaburi pupuk, tapi mesti pesan duluan baru bisa dapat stock pupuk,” ungkapnya.

Jeritan akan kelangkaan pupuk ini diakui salah satu pengecer pupuk bersubsidi Fred Sengge. Pemilik Kios Anugrah, Kelurahan Naikoten ini mengaku, biasa mendapatkan stock pupuk sebanyak lima sampai tujuh ton setiap tahun tetapi musim barat sulit mendapatkan stock dari distributornya, CV Wisata.

Pimpinan PT Pupuk Kaltim Cabang NTT Supryadi mengaku, total alokasi pupuk tahun 2014 untuk NTT mencapai 18.000 ton atau menurun 7.000 ton dari tahun sebelumnya yakni 25.000 ton.

“Khusus Januari 2014 telah disalurkan 138 persen dari kuota 18.000 ton setelah kami berkoordinasi dengan dinas,” ungkapnya.

Diakui Supryadi, dalam pengiriman pupuk ke NTT

biasanya terkendala cuaca. Petani juga dinilainya salah menerapkan penggunaan pupuk sehingga mengalami kelangkaan pupuk.

“Pupuk NPK harusnya menjadi pupuk dasar, tapi yang terjadi urea dijadikan pupuk dasar sedangkan NPK menjadi pupuk kedua. Karena itu perlu dilakukan sosialisasi lagi kepada masyarakat,” jelasnya.

Kabid Penyelenggaraan Penyuluhan Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluh Kota Kupang Filomeno Hornay mengatakan, total kelompok tani di Kota Kupang mencapai 200 kelompok dan 14 gabungan kelompok tani dengan 44 orang PPL. Sesuai SK Wali Kota Kupang Nomor: 34/KEP/HK/2014 kebutuhan pupuk urea mencapai 299,33 ton; SP 36 mencapai 78,48 ton; NPK mencapai 179,31 ton; ZA mencapai 10,59 ton.

Dia mengaku, kelangkaan pupuk di Kota Kupang terjadi karena stock untuk Kota Kupang dibawa ke luar. “Misalnya pupuk satu wilayah tertentu dipakai oleh petani dari tempat lain, atau petani setempat membeli pupuk tapi dipakai di tempat lain. Dengan adanya persoalan itu, maka para penyuluh selalu diminta untuk memantau,” ujarnya.

Selain itu, kata dia, kelangkaan pupuk bisa juga disebabkan suplai terlambat dari pabrik karena masalah cuaca. Aktivis LSM Pikul NTT Un Weo menegaskan, untuk mengantisipasi masalah kelangkaan pupuk bisa dilakukan dengan jalan menggunakan pupuk organik dan tidak perlu tergantung dengan pupuk an organik.

“LSM Pikul sendiri telah melakukan pendampingan di sejumlah desa di Kabupaten Kupang dengan menerapkan penggunaan pupuk organik dari bahan lokal dan hasilnya lebih meningkatkan produksi pertanian ketimbang menggunakan pupuk an organik,” ujar Un.

AKIBAT PERGESERAN IKLIM, PETANI SULIT PREDIKSI WAKTU TANAM

Oleh **JEAN NENO**

<http://nttonlinenow.com/berita-ntt/daratan-timor/6052-akibat-pergeseran-iklimpetani-sulit-prediksi-waktu-tanam>

Perubahan iklim dunia dapat memacu gagal panen, termasuk Indonesia sebagai negara penghasil panen. Akibatnya, potensi kekurangan stok pangan terus mengintai. Pertanian merupakan sektor yang mengalami dampak paling serius akibat perubahan iklim. Cuaca yang tidak menentu membuat petani tak lagi mudah menentukan waktu yang tepat untuk mengelola lahannya.

Sebagian petani di Nusa Tenggara Timur (NTT) mengeluh, akibat pergeseran musim yang terjadi belakangan ini, membuat mereka kesulitan memprediksikan waktu atau musim yang tepat untuk menanam padi di ladang sawah milik mereka.

Kebanyakan yang dikeluhkan para petani adalah bahwa mereka kesulitan dalam mengantisipasi curah hujan, menyebabkan mereka ragu-ragu untuk menanam lebih awal. Sementara itu, sebagian lainnya terlampaui memaksakan diri untuk menanam padi dua kali setahun, padahal kemudian ternyata mengalami kekeringan.

Dominggus Lende, salah satu petani sawah di Kupang mengaku, baru hendak menyiapkan lahan sawah miliknya

untuk ditanami pada pertengahan bulan Maret 2014 ini. Hal itu disebabkan karena dirinya belum yakin dengan curah hujan yang turunnya tak menentu akhir-akhir ini.

“Hujan tidak menentu begini, kadang dua sampai tiga minggu tidak turun hujan, sehingga saya ragu untuk tanam, takut padi nanti tidak jadi karena kurang air, kalau sudah begitu kita rugi, baik tenaga, waktu dan juga benih yang kita punya terbatas,” ujar Dominggus.

Meski demikian, petani padi lainnya telah menanam sawah mereka sejak bulan Februari, bahkan ada pula yang menaman sejak akhir Januari lalu, dan masih pada area persawahan yang sama. Mereka mengaku, memberanikan diri menanam lebih awal dan jika nantinya gagal maka mereka akan kembali menanam pada musim tanam berikutnya.

Untuk meningkatkan produktivitas petani sehingga pendapatan usaha taninya meningkat, tentunya pemerintah memiliki peranan penting dalam rangkaantisipasi perubahan iklim yang terjadi di Indonesia khususnya di NTT.

Lantas, apa yang dilakukan pemerintah dalam mengambil langkah antisipatif?

Kepala Dinas Pertanian Provinsi Nusa Tenggara Timur, Anis Tay Ruba mengatakan, Pemerintah daerah melalui Dinas Pertanian, saat ini menjalankan program nasional yaitu Sekolah Lapang Iklim, yaitu petani dilatih untuk mengantisipasi atau mempersiapkan diri, atau paling tidak mengamati gejala alam, sehingga dapat mengambil tindakan tepat untuk budidaya tanaman atau melakukan usaha tani.

“Ini merupakan program nasional melalui kementerian pertanian, dan pelatihan tersebut dilakukan di kelompok-kelompok masyarakat yang ada sekaligus melakukan sosialisasi kepada masyarakat soal perubahan iklim,” kata

Kepala Dinas Pertanian Provinsi NTT, Anis Tay Ruba.

Selain itu, dalam langkah antisipasi dilakukan sosialisasi yang disampaikan melalui surat secara berjenjang dari Kementerian Pertanian, dinas pertanian provinsi dan juga kabupaten/kota untuk memberikan informasi tentang data-data perubahan iklim berdasarkan informasi yang disampaikan oleh BMKG. Hal ini dimaksud guna menyiapkan kondisi masyarakat agar mempercepat proses penyiapan lahan serta menggunakan benih yang adaptif.

Ada pula program lainnya yakni, Sekolah Lapangan Pengendalian Hama Terpadu. Di setiap daerah atau kawasan potensial endemis hama atau penyakit tanaman, disitu disediakan unit sekolah lapangan. Ini dimaksudkan untuk memperkenalkan kepada petani tentang hama-hama dan penyakit potensial atau yang sering muncul, agar tepat dalam mengambil tindakan baik itu langkah pengendalian secara biologis, mekanis maupun pengendalian secara kimiawi.

Guna mengatasi persoalan hama penyakit, pemerintah menyediakan stok pestisida. Dengan demikian, bila tanaman diserang hama penyakit maka didistribusikan ke kabupaten/kota yang mengalami hal tersebut.

Secara nasional, disediakan dana cadangan benih nasional untuk digunakan apabila terjadi bencana banjir, kekeringan dan hama penyakit, atau memanfaatkan benih tersebut, paling tidak untuk ditanam pada musim tanam berikutnya.

“Tanaman yang rusak akibat dilanda bencana banjir, kekeringan dan hama penyakit atau masyarakat mengalami kekurangan bahan pangan, maka dinas pertanian bersama-sama instansi terkait, seperti dinsos dan BNPBD mengidentifikasi keperluan yang menjadi kebutuhan masyarakat saat ini. Misalnya, dinsos dengan bantuan beras,

BNPBD dengan bantuan tanggap darurat lainnya, sedangkan dinas pertanian menyediakan atau menangani benih padi untuk ditanam pada musim kering atau musim tanam ke dua, ” papar Anis.

Dia menjelaskan, akibat perubahan iklim yang terjadi maka terjadi pula pergeseran musim tanam. Jika menanam di musim tanam pertama (MT I) tidak berhasil, maka petani pun didorong untuk bisa tanam di musim tanam ke dua (MT II). “Musim tanam ke dua ini dilakukan di daerah yang memang cukup tersedia air, baik itu air irigasi, air dari sumur pompa maupun dari air alternatif lainnya, ” jelas Anis.

Sementara itu, pakar pertanian dari Universitas Kristen Satya Wacana Kupang, Zet Malelak mengatakan perlu dicarikan strategi yang tepat agar dapat meningkatkan produktifitas pertanian guna menjawab persoalan ketahanan pangan akibat perubahan iklim yang terjadi.

Menurut dia, subsidi pada musim tanam ke dua (MT II) perlu dilakukan karena dana yang diberikan oleh negara kepada publik adalah demi tercipta multi player efek (MPE) adalah subsidi. Dan tujuan dari subsidi sendiri adalah memberikan stimulan-stimulan atau insentif agar pelaku bisnis yang akan melakukan kegiatan tersebut tertarik dengan kegiatan tersebut.

“Karena risiko terbesar dari suatu usaha tani adalah pada bagian budidaya, dan ini berlaku bukan saja pada sektor pertanian pangan tetapi juga pada sektor kehutanan, perkebunan, perikanan dan peternakan. Dari berbagai informasi bahwa hampir seluruh negara yang pertaniannya kuat dan maju karena adanya subsidi yang kuat juga pada sektor budidaya, ” paparnya.

CITA RASA DODOL DARI BUAH LONTAR

Oleh **JOHN SEO**

<http://www.nttterkini.com/cita-rasa-dodol-dari-buah-lontar/>

David Djemata, 48 tahun bersama istrinya Eni Astuti, 43 tahun mengumpulkan buah lontar (Saboak- biasa disebut orang Kupang) yang jatuh di bawah pohon di sekitar kampungnya di kelurahan Airnona, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT). Mereka mengumpulkan buah lontar yang jatuh dan masih layak dipakai itu untuk membuat dodol buah lontar.

Limbah buah lontar yang terkumpul sebanyak dua karung besar lalu dijemur selama kurang lebih 2-3 jam. Selanjutnya bersama istrinya, Erni Astuti memeras buah pohon lontar untuk mengambil lemaknya yang dijadikan sebagai bahan baku pembuatan dodol. "Limbah pohon lontar yang kami gunakan membuat dodol, " kata David yang ditemui dikediamannya belum lama ini.

Lemak yang dihasilkan kemudian dikumpulkan hingga mencapai 6 kilogram (kg). Lemak buah lontar itu, lalu dicampur dengan gula air (gula dari pohon lontar) dan santan kelapa, campurannya harus sama rata, jika 6 kg, maka gulanya harus 6 kg juga. Setelah itu lemak buah kelapa yang telah dicampur dimasak hingga kental atau sekitar 4 jam lamanya. Usai dimasak, lemak yang telah dicampur itu kemudian

dibiarkan selama sehari. “Kami buat sesuai kemampuan kami sebanyak 6 kg saja,” katanya.

Setelah didiamkan sehari, lemak pohon lontar yang telah dicampur kemudian diproses untuk pembuatan dodol, dengan cara memotongnya sesuai ukuran dodol, lalu dikemas dalam plastik. Satu plastik kemasan berisi sebanyak 9 buah dodol yang dijual Rp 3000 per plastik. Dalam sekali masak sebanyak 6 kg, biasanya David hanya menghasilkan 80 bungkus. Dalam seminggu David hanya bisa membuat dodol sebanyak 2 kali atau sebanyak 12 kilogram (kg). “Tenaga yang terbatas dan prosesnya yang cukup lama, maka kami hanya mampu buat dua kali seminggu,” katanya.

Untuk pembuatan dodol dalam sekali masak biasanya menghabiskan biaya sebesar Rp 240 ribu, sehingga keuntungan yang diraih pun tidak besar hanya sekitar Rp 30 ribu sekali masak. David mengaku telah menekuni bidang ini sejak tahun 2004 lalu, sejak mendapat pelatihan dan tergabung dalam kelompok dodol buah lontar di wilayahnya. Namun, hingga kini hanya dirinya yang masih menekuni bidang ini, sedangkan anggota kelompok lainnya yang berjumlah lima orang. “Kami hanya diberikan bantuan berupa peralatan dan dana awal sebesar Rp 5 juta,” katanya.

Sekali produksi dodol, katanya, dibutuhkan limbah buah lontar sebanyak 50 buah. Kasiat dari dodol buah lontar ini, katanya, bisa menyembuhkan penyakit maag/lambung. Dodol yang dihasilkannya didistribusikan ke pemegang hak paten, Wayan Mahayasa sebagai pemegang merk dodol buah lontar ini.

Wayan Mahayasa yang ditemui terpisah mengisahkan melalui satu penelitian yang dilakukannya, pohon lontar tidak pernah busuk, sehingga bisa dihasilkan untuk pembuatan

dodol. Dari situ, Wayan memberikan pelatihan ke sejumlah masyarakat untuk menekuni pekerjaan ini. “Memang tidak banyak yang tertarik, tersisa David dan beberapa orang lagi,” katanya.

Pohon lontar sangat banyak di wilayah NTT, namun sangat kurang yang mengetahui manfaat dari pohon lontar itu. Karena pohon lontar mulai dari daun, buah dan batangnya bisa menghasilkan banyak kerajinan. Selain untuk membuat tuak, buahnya juga bisa dibuatkan dodol. Batangnya juga bisa digunakan untuk bahan bangunan rumah.

Dia mengaku telah mengembangkan usaha ini sejak tahun 1998 lalu, saat Indonesia mengalami krisis moneter. Hal ini bisa dijadikan sebagai lahan pengerjaan baru. Dia lalu memberikan pelatihan kepada sejumlah warga untuk menekuni bidang ini. Sambil melakukan pembibitan pohon lontar, sehingga tidak punah. “Buah ini sering diabaikan masyarakat, karena sebagai pakan ternak. Namun, saya manfaatkan untuk membuat dodol,” katanya.

Dia mengkuatirkan pohon lontar akan punah, sehingga terus melakukan pembibitan sehingga pengelolaan dodol buah lontar bisa terus berkembang. Dia mengatakan telah hak paten dodol buah lontar, sehingga distribusinya harus melaluinya. Dodol yang dikemas itu kemudian dimasukan dalam dos sebelum didistribusikan ke toko di wilayah Kota Kupang. “Dalam dos berisi 9 buah yang dijual Rp 5000 per dosnya,” kata Wayan.

Salah satu konsumen dodol buah lontar, Kanis mengaku cita rasa dodol sangat alami, karena terbuat dari pangan lokal, yang terjamin. Apalagi pohon lontar ini bisa menyembuhkan penyakit yang dideritanya yakni maag. “Rasanya beda dengan dodol garut, atau lainnya,” kata Kanis.

DODOL LONTAR PANGANAN LOKAL NTT YANG TIDAK KONDANG

Oleh **NYONGKI MAULETI**

<http://nttonlinenow.com/berita-ntt/daratan-timor/6698-dodol-lontar-panganan-lokal-ntt-yang-tidak-kondang>

Kalau berbicara soal hasil yang dapat dari pohon lontar, tentu sebagian besar masyarakat NTT hanya mengenal, Gula Air, Gula Lempeng, dan Gula sabu. Yang ada dibenak masyarakat NTT cuma itu produk-produk yang dihasilkan dari pohon lontar.

Namun Sebenarnya Lontar punya banyak keunggulan untuk dijadikan berbagai produk panganan. Salah satunya adalah dodol lontar yang dibuat dengan bahan utamanya buah lontar. Dengan nama depan dodol, masyarakat tentu masih bertanya-tanya apakah produk itu merupakan produk hasil NTT atau bukan, mengingat nama dodol tentu masyarakat hanya tahu bahwa dodol merupakan panganan khas pulau Jawa seperti dodol garut dan beragam dodol lainnya. Namun mereka umumnya belum tahu bahwa cita rasa dodol lontar sangat enak. Selain itu dodol lontar juga mempunyai khasiat lain yakni, untuk menyembuhkan penyakit maag.

Produk ini mulai dikenalkan kepada para pengrajin oleh Profesor, Nyoman Mahayasa. pria asal Provinsi Bali ini yang pertama kali mengenalkan cara pengolahan dan pembuatan

dodol di Kelurahan Airnona, Kota Kupang pada tahun 2004 lalu.

Sesuai pengakuan David Djeke Mete, salah satu pembuat Dodol Lontar Binaan dari Profesor Komang Mahayasa, yang masih tersisa dari sekian banyak pembuat dodol yang mengikuti bimbingan pada saat itu mengatakan, Awal pembuatan dodol lontar, dirinya yang tergabung dalam beberapa kelompok binaan Profesor Mahayasa. Mereka mendapat pelatihan tentang pembuatan dodol dari buah lontar pada 2004 lalu.

Awalnya dibentuk dua kelompok yang beranggotakan lima orang setiap kelompoknya, kemudian setiap kelompok di beri peralatan berupa kuili besar dan sejumperalatan yang digunakan pembuatan dodol. Setelah mengikuti pelatihan selama beberapa minggu, dirinya beserta 9 orang dalam kelompok masing-masing mulai membuat dodol lontar untuk dijual.

Namun dalam perjalanan, sepertinya pembuatan dodol tidak membuat anggota kelompoknya beserta kelompok yang lain betah membuat dodol sehingga, sejak tahun 2005 usaha pembuatan dodol lontar tidak lagi bersama kelompok-kelompok binaan tetapi di masukan dalam usaha keluarga. hampir semua anggota dari dua kelompok yang dibentuk profesor Mahayasa, memilih untuk tidak lagi membuat dodol. Sehingga sampai tahun 2014 hanya dirinya saja yang masih membuat dodol lontar.

Dalam Perjalanannya sebagai pembuat dodol, aku David, banyak suka dukanya, namun ia memilih bertahan untuk menjalani kehidupannya sebagai pembuat dodol lontar, sebab dengan usaha sebagai pembuat dodol, dirinya mampu menghidupi keluarga dan menyekolahkan empat

orang anaknya hingga kini, bahkan diantara empat orang anaknya ada yang sudah menyelesaikan studinya disalah satu perguruan tinggi di Kota Kupang.

Untuk proses pembuatan dodol bermutu tinggi memerlukan waktu yang lama dan membutuhkan keahlian khusus. Bahan utama membuat dodol adalah, buah Lontar, Gula Air santan kelapa, tepung ketan.

Untuk bahan baku utama pembuatan dodol seperti buah lontar, dirinya harus mencari dibeberapa tempat seperti, di Kelurahan Bakunase, Batuplat. Bahkan terkadang dirinya harus mencari buah lontar hingga ke pelosok-pelosok wilayah di Kota Kupang. Namun bahan baku tersebut tidak mudah didapat saat musim penghujan tiba, sehingga pada bulan-bulan yang curah hujannya tinggi, dirinya tidak bisa membuat dodol karena kekurangan bahan baku. Disaat-saat lowong seperti itu dimanfaatkan untuk membuat camilan-camilan lain seperti emping singkong dan jagung.

Menurutnya, untuk setiap kali memproduksi dodol. Ia minimal harus mengumpulkan 50 buah lontar. Buah yang pakai membuat dodol bukan buah yang dipetik dari pohon, tetapi buah yang telah jatuh dari pohon. Untuk setiap kali memproduksi dodol lontar

Dari setiap kali produksi, dodol yang dihasilkan sebanyak 80 bungkus. Setiap bungkusnya dipasarkan kepada distributor seharga Rp. 3 ribu dan total uang yang didapatkan sebesar Rp. 240 ribu. setiap bulanya dari hasil membuat dodol lontar ia mendapatkan penghasilan lebih dari Rp. 1 juta rupiah. Jumlah tersebut telah dipotong ongkos produksi yang telah dikeluarkannya. Ia juga mengaku sempat memasarkan hasil produksi dodol lontar dibandara Eltari Kupang. Namun, dirinya ditegur oleh pemegang hak cipta, sehingga tiap kali

produksi dirinya hanya menjual kepada pemegang hak cipta dodol lontar, Profesor Komang Mahayasa

Sesuai pantauannya dodol lontar yang dibuatnya kebanyakan dipasarkan di Toko camilan Syukiran, Borneo dan masih banyak toko toko lain di Kota Kupang.

Ia mengaku Sempat ikut pameran camilan di ramayana dan medapat juara harapan satu. Dan dengan mendapat juara harapan satu, ia bantuan pemerintah dari Badan Bimbingan Masyarakat berupa uang tunai sebesar Rp. 5 juta.

Pria yang juga berprofesi sebagai penjual ikan di Pasar Oeba Kupang ini juga bertekad akan menggeluti usaha dodol lontar bersama Istrinya Astuti yang berasal dari Provinsi DI Yogyakarta.

BUAH LONTAR, SOKU GURU EKONOMI KELUARGA

Oleh **KANISIUS SEDA**

Tulisan telah dipublikasikan di *Harian Kota Kursor*, 18 Maret 2014

BUAH LONTAR, salah satu pangan lokal daerah Nusa Tenggara Timur (NTT) yang selama ini oleh mayoritas masyarakat NTT menganggapnya sebagai buah yang tidak bernilai ekonomis atau lebih pantas menjadi makanan ternak terutama babi. Lalu mengapa dari buah yang terbuang ini menjadi nilai ekonomis dan sebagai soku guru perekonomian keluarga?

Buah lontar berasal dari pohon lontar yang tumbuh dengan sendirinya di semua tempat di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) termasuk di Kota Kupang.

Pohonnya sendiri bisa digunakan sebagai bahan bangunan atau lata rumah. Sedangkan daunnya bisa digunakan untuk kerajinan tangan, tikar, nyiru dan musik sasando.

Buah lontar sendiri, lebih banyak manfaatnya seperti, sirup lontar, gula lontar, nira dan dodol buah lontar. Dodol buah lontar, saat ini menjadi makanan khas daerah NTT. Tetapi sayangnya, dari jutaan masyarakat NTT, yang bergelut dalam usaha dodol lontar ini bisa dihitung dengan jari.

Di Kota Kupang saja, hanya satu perajin dodol buah lontar. Itupun sifatnya perorangan/rumah tangga. Sebut saja, David Djeke Mata (48), warga Kuanino, asal Kabupaten Sabu Raijua.

Ilmu pengolahan dodol buah lontar ini didapatnya lewat edukasi kelompok yang dilakukan Prof. I Nyoman Widiartha Mahayasa sejak tahun 2004 lalu. Pasca pelatihan, kelompoknya tidak berjalan, sehingga ayah beranak empat ini memilih untuk produksi sendiri di rumahnya.

Di rumahnya, ia dibantu istrinya, Eni Astuti (43) bersama empat anaknya. Untuk mendapatkan buah lontar yang jatuh sendiri dari pohonnya, David harus berjalan keliling Kota Kupang dengan bermodalkan sepeda motor.

Setiap kali dirinya memungut buah lontar yang sudah jatuh dari pohonnya, ia selalu mendapat pertanyaan yang sama dari orang-orang ditemuinya di sekitar pohon lontar. Pertanyaan simple untuk apa buah lontar itu? Jawabannya hanya satu untuk makanan babi.

Untuk mendapatkan dodol buah lontar, ia hanya bermodalkan sebuah kompor hock, sebuah kuali dan minyak tanah. Untuk sekali pembuatan, dibutuhkan enam kg palp hasil olahan buah lontar, gula lontar enam liter, tepung ketan, setengah kg, santan kelapa dua buah dan garam secukupnya.

Proses pembuatannya, buah lontar masak yang jatuh sendiri dari pohon kemudian dikumpul sampai 50 buah. Dari buah lontar yang ada itu dikupas kulitnya lalu direndam selama dua sampai tiga jam dengan air kapur sirih untuk mematikan kumannya, sehingga lendirnya berkurang. Selanjutnya, dicuci dengan air bersih lalu diremas sampai palbnya (dalam bahasa perajinnya lemak) terpisah dari buah.

Setelah itu, disaring dengan menggunakan saringan santan lalu dimasukkan dalam ember dan dipindahkan lagi ke saringan kain untuk memisahkan air limbah, sehingga paldnya (lemak, red) tertinggal dalam kain.

Pald (lemak, red) yang tersisa itulah yg dibuat menjadi

sebuah dodol buah lontar. Proses pembuatannya sendiri memakan waktu kurang lebih empat jam. Komposisinya, dari 50 buah lontar menghasilkan enam kg pald (lemak), gula lontar enam kg, tepung ketan setengah kg, garam secukupnya dan santan kelapa dua buah.

Setelah matang, didiamkan selama satu hari. Selanjutnya, dimol menggunakan mesin kemudian dipotong dan dikemas dalam plastik. David Djeke Mata, perajin dodol lontar di Kuanini, Kota Kupang mengaku, dari usahanya ini sangat membantu ekonomi keluarganya. Ia ibaratkan, usaha dodol buah lontar sebagai soku guru perekonomian keluarganya.

Dari hasil usahanya itu, dia bisa menyekolahkan empat anaknya masing-masing, satu duduk kuliah, satu masih SMK, satu masih SMP dan satunya lagi masih duduk di bangku Taman Kanak-Kanak (TK). Seminggu, dua kali produksi atau satu kali masak menghasilkan 80 biji dodol buah lontar. Untuk sekali produksi memakan biaya kurang lebih Rp 150.000.

Kendalanya di bidang pemasaran, dimana hasil produksinya dibawa ke Prof.I Nyoman Widiartha Mahayasa, yang memiliki label dengan harga Rp 3000/bungkus (isinya sembilan biji).

Untuk mendapatkan buah lontar sangat susah, terutama pada musim hujan. Kendala lain, belum memiliki hak paten sendiri. Berkat ketekunannya dalam bidang usaha ini, David pernah mendapat penghargaan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT saat mengikuti pameran lomba makanan khas NTT yang diselenggarakan Badan Ketahanan Pangan NTT tahun 2007/2008 dengan mendapat uang tunai sebesar Rp 5 juta. Sedangkan dari Pemkot Kupang melalui Dinas Pertanian Kota Kupang hanya mendapatkan peralatan.

BERGUNA BAGI KESEHATAN

Dari sisi kesehatan, dodol lontar ini dapat menyembuhkan penyakit maag. Dodol lontar, sebagai makanan khas daerah NTT sudah terdaftar di Departemen Kesehatan (Depkes) RI dengan nomor : Depkes S.P.No.03/24.13/99.

Prof. I Nyoman Widiartha Mahayasa, yang biasa dijuluki sebagai profesor buah lontar ini, penemu dodol lontar di NTT telah memiliki hak paten dan pernah mendapat upakarti berupa piagam penghargaan dari Presiden RI tahun 2010 dalam bidang kategori jasa pengabdian.

Sebagai dosen Fakultas Pertanian Undana Kupang, I.N. Widiartha Mahayasa berdasarkan Tri Dharma Perguruan Tinggi ada 3 tugas bagi seorang dosen yaitu, pendidikan, penelitian dan yang dituntut dapat mengabdikan ilmunya untuk masyarakat. Dengan memberdayakan masyarakat menjadi wirausaha baru bidang industri kecil dan menengah.

Tahun 1997, mulai tertarik dan memfokuskan terhadap pemanfaatan tanaman pohon lontar dengan beberapa argumentasi pertama, NTT merupakan daerah populasi tanaman pohon lontar yang terbesar di Indonesia yang penyebarannya terdapat pada 566 pulau besar dan kecl. Adapun tiga daerah yang berpotensi penghasil lontar yakni, Kupang, Rote dan Sabu.

Kedua, tanaman pohon lontar yang selama ini tidak bernilai bagi masyarakat dengan pengelolaan/pemanfaatan pohon lontar tersebut dapat memiliki nilai tambah dan memberikan pendapatan masyarakat.

Tiga, hasil penelitian perguruan tinggi menjadi lebih bermakna bagi kehidupan masyarakat. Berdasarkan kemampuan dan kompetensi yang dimiliki, I.N.Widiartha Mahayasa dengan segala upaya dengan mengorbankan waktu,

dana dan tenaga untuk terus membina kelompok-kelompok komunitas yang ada di kabupaten/kota di NTT.

Profesor lontar ini, terus memberdayakan masyarakat melalui pengembangan IKM berbasis potensi sumber daya alam lokal yaitu pohon lontar. Dimana, seluruh bagian dari pohon lontar dapat berfungsi dan berguna, sehingga memiliki nilai ekonomi yang cukup menjanjikan meliputi, pengolahan sirup buah lontar, pengolahan serabut lontar diproduksi produk kerajinan (kemasan, tali dan keset, dll).

Selain itu, berguna untuk pengolahan selai buah lontar, teknologi budidaya pembibitan tanaman pohon lontar, pengolahan dodol buah lontar dan pengolahan kerupuk buah lontar.

Dalam pengolahan pemanfaatan pohon lontar dilakukan penciptaan wirausaha pengusaha/perajin IKM melalui bimbingan dan alih pengetahuan dan keterampilan kepada masyarakat dalam berwirausaha, sehingga terbentuk lima kelompok produktif.

Lima kelompok produktif yang pernah dibentuknya menyerapkan tenaga kerja 23 orang. I. N. W. Mahayasa juga melakukan pelatihan pengolahan pohon lontar di sekolah Tuna Netra Hibia, ibu PKK Kota Kupang, guru-guru SMK dan memberikan bimbingan kepada mahasiswa dalam penelitian sirup buah lontar.

Disamping itu, memfasilitasi mendesain dan mencetak kemasan produk , memfasilitasi permodalan IKM dan memfasilitasi pemasaran IKM. Upaya yang telah dilakukannya terhadap pengusaha/perajin IKM pengolahan pohon lontar menunjukkan perkembangan pada tenaga kerja bertambah dan lebih terampil dalam proses produksi, sehingga setiap tahun meningkat.

Pemasarannya masih berkisar lokal atau di toko-toko, supermarket dan swalayan di Kota Kupang dengan standart produk pangan semakin baik dan higienis.

Sebagai distributor tunggal dodol lontar dan sirup lontar, ia menjual ke pasaran dengan harga standar misalnya, dodol lontar satu kotak (isi 9 biji) Rp 5000 dan sirup lontar Rp 20.000/ botol.

Dodol lontar diambil dari palpnya dengan komposisi buah lontar, gula lontar, tepung ketan, garam dan santan kelapa. Di Kota Kupang sendiri, sudah banyak dilakukan pelatihan dalam bentuk kelompok, tetapi yang aktif hanya David Djeke Mata. Dan' itupun usahanya perorangan/rumah tangga bukan kelompok.

"Kalau hanya mengharapkan dari David Djeke Mata tidak cukup. Sehingga saya membuat sendiri dengan menggunakan tenaga dari tetangga rumah. Saya sudah selesai satu buku penelitian seputar buah lontar. Penelitian terakhir, buah lontar dapat membasmi rayap. Saya bersama-sama teman dosen di Undana tengah melakukan penelitian palp yang terkandung di dalamnya, sangat luar biasa kasiatnya seperti, mengandung oksida yang tinggi, bisa menyembuhkan kanker, mengandung vitamin C dan menyembuhkan maag," sebut Mahayasa.

Dari hasil penelitiannya itu, ditransferkan ke masyarakat. "Cuma itulah, kelompok yang begitu banyak sudah dibina, tidak ada satu kelompokpun menjalankan usahanya sampai hari ini. Walaupun tidak ada kelompok perajin, saya tetap bekerja sehingga hak paten saya tetap diberdayakan," kata Mayasa.

PERHATIAN PEMERINTAH MINIM

Bentuk perhatian pemerintah baik Pemerintah Provinsi

(Pemprov) NTT maupun Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang dalam usaha dodol lontar, sirup lontar dan sebagainya masih minim.

“Saya sudah menantang pemerintah untuk membuat sentra-sentra lontar, sehingga kalau Pemprov NTT/Pemkot Kupang membawa tamu dari luar NTT tidak pusing mencari makanan khas NTT. Misalnya, sentra makanan khas daerah NTT/pangan lokal NTT, tenunan dari berbagai etnis di NTT, dll,” kata Mahayasa.

Victor Umbu Manna, SE, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kupang membeberkan Usaha Kecil Menengah (UKM) dibawah binaanya di Kota Kupang sebanyak 10.000-an. Usaha mikro sudah mendekati pada kelompok pedagang kaki lima (PKL), karena menggunakan lahan sendiri atau lahan yang dipinjamkan. Tetapi, bentuk usahanya darurat seperti, dalam bentuk kios, dll termasuk para pedagang kecil yang berada di pasar-pasar tradisional dengan modal dibawah Rp 10 juta.

Untuk usaha kecil mikro, pemerintah sudah memberikan bantuan melalui paket pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dialokasikan anggarannya sebesar Rp 500 juta/kelurahan untuk semua jenis usaha produktif dengan besaran pinjaman Rp 25 juta ke bawah.

Hanya sayangnya, bantuan yang diluncurkan itu belum menyentuh pada perajin dodol lontar di Kota Kupang. Pengelolanya, dalam hal ini, Prof. I.N.W. Mahayasa sudah menerima upakarti tahun 2010 dari Presiden RI.

“Dalam pengamatan kami, persoalannya bukan modal. Persoalannya pada pemasaran dan produksi. Dalam pengawasan kami, ada komunikasi dan supervisi ke usahanya. Kami sangat apresiasi, kalau banyak masyarakat yang bergelut

dalam usaha ini” kata Manna.

Yang harus dijaga adalah pola produksinya, karena menyerap tenaga kerja banyak dibutuhkan ketekunan dan disiplin. Untuk perajin dodol lontar yang diusahakan David Djeke Mata, Umbu mengaku, belum memberikan bantuan modal, kecuali sebatas melakukan pendampingan.

“Kita juga membantu bersama-sama Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Kota Kupang untuk melakukan uji laboratorium dari sisi kesehatan dan kemasannya, sehingga layak dijual di pasaran, ” ujarnya.

Ia berharap, dodol lontar yang merupakan makanan khas daerah NTT dari segi kesehatan dan kemasannya tidak kalah saing dengan Dodol Garut asal daerah Jawa Barat. Kedepannya, Disperindag Kota Kupang melihat usaha dodol lontar dan sirup lontar ini sebagai usaha yang menjanjikan, sehingga perlu dibentuk kelompok-kelompok perajin binaan.

Lontar, salah satu komoditi unggulan pangan lokal yang terus dipertahankan dan kalau bisa perlu dilakukan pengakuan hak intelektual terhadap kekayaan potensi daerah yang bahan bakunya hanya ada di NTT seperti Kota Kupang, Kabupaten Rote Ndao dan Kabupaten Sabu Raijua. Produk yang ada akan berkembang berbagai macam produk-produk ikutan di dalamnya. Produk utamanya adalah minuman tradisional daerah yang bersentuhan dengan aspek budaya diikuti komoditi lainnya seperti, gula lontar, dodol lontar, sirup lontar, gula semut, dll.

Langkah strategis yang dilakukan ke depan, Pemkot Kupang maupun Pemprov NTT harus memiliki rumah kemas untuk membantu pengolahan semua komoditi pangan lokal. “Kelemahan kita pada kemasannya. Bagaimana dodol lontar NTT mau bersaing dengan Dodol Garut Jabar?

Dari kemasannya sendiri, kita punya tidak menarik. Semua barang olahan seperti daging sei, dodol lontar dan sebagainya, " sebutnya.

Untuk pembelian mesin kemasan, ia sendiri sudah berulang kali mengusulkan anggarannya. Tetapi, jawabannya selalu terkendala pada keterbatasan dana.

MENELISIK AKIBAT ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN DI KOTA KUPANG

LAHAN MENYEMPIT, PRODUKSI PANGAN DAN PENGHASILAN PETANI MEROSOT

Oleh **OBED GERIMU**

Timor Express

KOTA Kupang terus berkembang di segala bidang. Banyaknya aktivitas pembangunan, praktis membuat penggunaan lahan ikut meningkat. Pembangunan tempat tinggal, tempat melakukan usaha, pemenuhan akses umum dan fasilitas lain, menyebabkan lahan yang tersedia semakin menyempit

Alih fungsi lahan pertanian di Kota Kupang semakin tak terkendali, dan praktis mengancam kapasitas penyediaan pangan. Seiring pertumbuhan jumlah penduduk, lahan pun kian terbatas. Alhasil, lahan pertanian pun di-alih fungsikan untuk permukiman, industri dan jasa.

Kawasan persawahan di wilayah Oepoi, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, yang dahulu menjadi salah satu sentra produksi pangan Kota Kupang, kini semakin menyempit.

Lokasi yang dulunya merupakan kawasan persawahan dengan tingkat kesuburan yang cukup tinggi dengan

didukung irigasi, kini dipenuhi dibangun pusat perbelanjaan, kantor pemerintah/swasta, restaurant, dan rumah tinggal.

Alih fungsi lahan berdampak pada penghasilan petani yang cenderung menurun. Salah satu penyebabnya karena luas lahan pertanian yang dimiliki telah berkurang sehingga produksi pertanian juga akan berkurang dan berimbas pada pendapatan yang menurun. Kondisi ini jika tidak dikendalikan, maka akan berdampak pada kurang tersedianya bahan pangan sehingga menimbulkan ketergantungan pada pangan yang dipasok dari daerah luar.

Alih fungsi lahan pertanian dipengaruhi beberapa faktor, salah satunya karena tingginya harga jual, membuat pemilik terpaksa menjual lahan pertanian untuk mendapatkan uang yang banyak dalam waktu singkat.

Tapi ada juga yang menyisakan sebagian lahan pertanian, untuk menggantungkan usahanya di sektor pertanian. Walaupun sempit, petani di lokasi itu terus mengusahakan lahan itu ada usaha tani terus berlanjut. Kecenderungan meningkatnya kebutuhan akan lahan, menyebabkan alih fungsi lahan pertanian sulit untuk dibendung, dan berdampak pada keberlangsungan usaha pertanian.

Pesatnya pembangunan di Kota Kupang yang didominasi perumahan, gedung perkantoran, perhotelan, dan pusat bisnis, menjadi daya tarik tersendiri, karena letaknya yang strategis sebagai ibukota Provinsi NTT yang berbatasan dengan negara Timor Leste dan Australia.

Dan, di Oepoi paling sering terjadi penyempitan lahan sawah akibat alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian. Padahal sektor pertanian merupakan sektor yang amat penting sebagai penyedia bahan pangan terutama beras yang merupakan makanan pokok bagi sebagian

besar masyarakat di Kota Kupang.

Nikolas Lodowiq, petani sekaligus pemilik lahan di Oepoi, mengaku alih fungsi lahan dilakukan karena jumlah tanggungan keluarga yang semakin besar. Dan, agar dapat mencukupi kebutuhan hidup keluarganya, berbagai upaya dilakukannya, termasuk mengalihfungsikan lahan pertaniannya. Ini membuktikan, faktor penghasilan menjadi salah satu penyebab tingginya alih fungsi lahan pertanian.

Selain itu, faktor lain yang ikut berpengaruh terhadap alih fungsi lahan di Kupang yaitu harga jual lahan pertanian yang tergolong tinggi menjadikan daya tarik tersendiri. Termasuk letak strategis Oepoi bagi peruntukan penggunaan lahan non pertanian.

Faktor ekonomi merupakan salah satu penyebab terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian. Hal ini mendorong pemilik lahan pertanian khususnya sawah untuk menjual lahan yang dimilikinya karena terdesak kebutuhan hidup.

Iming-iming harga jual lahan yang tinggi menjadi daya tarik yang kuat, dan tidak sedikit pemilik lahan, karena terdesak kebutuhan yang segera untuk dipenuhi, sehingga terpaksa menjual sebagian lahannya karena tidak ada pilihan lain.

Berbagai aturan sudah banyak dibuat Pemda Kota Kupang pada dasarnya untuk mengantisipasi masalah yang diperkirakan akan timbul dari adanya alih fungsi lahan. Namun kenyataannya tidak berjalan efektif. Sejauh ini keterkaitan berbagai instansi dalam proses perizinan bukan memperkuat, tetapi justru memperlemah fungsi pengontrol yang ada.

Dengan demikian perlu adanya sikap proaktif dan konsisten

pelaksanaan dalam penetapan peraturan yang didukung berbagai upaya seperti pembenahan sistem administrasi pertanahan, peningkatan koordinasi antar lembaga terkait, sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman tentang kerugian akibat konversi lahan pertanian, dan pengendalian pemanfaatan lahan sesuai rencana tata ruang.

Walaupun dapat muncul kemungkinan bahwa pemilik lahan pertanian mengalihfungsikan lahannya dalam kurun waktu dekat apabila terdesak biaya kebutuhan. Namun besar harapan agar pemilik lahan pertanian tetap mempertahankan usaha pertaniannya agar dapat memberikan sumbangsih pemenuhan kebutuhan pangan, khususnya beras yang kebutuhannya akan terus meningkat.

Terpisah, Ketua Tim Peneliti Hibah Strategis Nasional, Karolus Kopong Medan, mengatakan pihaknya telah merekomendasikan kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk memperketat pemberian izin alih fungsi lahan persawahan ke pembangunan komersial.

“Bagi kami, memperketat izin ini penting guna mencegah maraknya alih fungsi lahan dengan sistem tukar guling yang berdampak pada turunnya hasil produksi pertanian, terutama beras,” kata Karolus.

Kopong Medan yang juga Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Undana Kupang itu mengatakan bangunan di atas areal persawahan yang telah ditukar guling, bertentangan dengan Perda Tata Ruang No.4 Tahun 2002, UU No 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Selain itu, bertentangan pula dengan UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, UU No.32 Tahun 2004, UU No.41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan dan PP No.1 Tahun 2011 tentang Penetapan

dan Alih Fungsi Lahan Pertanian dan Tanaman Pangan Berkelanjutan.

Menurut dia, pembangunan SPBU di atas areal persawahan yang sudah dikomersialisasi, umumnya tidak didahului dengan sosialisasi serta kajian Amdal oleh Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) setempat. Dalam hubungan dengan itu, kata dia, pemerintah daerah harus segera mengambil tindakan tegas dengan memperketat izin alih fungsi lahan untuk mencegah turunnya hasil produksi beras.

“Idealnya peralihan fungsi lahan pertanian ke non pertanian hanya diperutukkan bagi irigasi non teknis seperti lahan persawahan tadah hujan, karena pemanfaatannya tergantung pada curah hujan setiap tahun, ” katanya mencontohkan.

Di luar irigasi non teknis, menurut dia, harus dilarang keras untuk melakukan tukar guling atau konversi lahan pertanian ke non pertanian untuk kepentingan pemukiman, jasa perusahaan atau industri lainnya. Dan, larangan peralihan lahan pertanian ke non pertanian sudah diatur dalam UU No.7 Tahun 2004 tentang Pemanfaatan Sumber Daya Air.

Sementara itu, data Dinas Pertanian dan Perkebunan NTT menunjukkan lahan irigasi teknis di NTT saat ini mencapai 127.308 hektare, sedangkan non teknis termasuk lahan kering di NTT mencapai 2.379.005 hektare.

Dari total areal tersebut, pemanfaatan lahan basah baru mencapai 52 persen, sedangkan lahan kering baru mencapai 65, 41 persen dan jika dilihat dari potensi lahan yang ada, potensi lahan kering lebih luas ketimbang lahan basah, karena karakteristik daerah NTT lebih didominasi musim kemarau.

LAJU ALIH FUNGSI LAHAN SULIT DIBENDUNG

Oleh **PALCE AMALO**

<http://www.lintasntt.com/laju-alih-fungsi-lahan-sulit-dibendung/>

ALIH fungsi lahan pertanian di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur sulit dibendung karena persoalan ekonomi dan belum ada peraturan daerah yang membatasi hal tersebut.

Pasalnya kebutuhan lahan untuk pembangunan rumah cenderung terus meningkat seiring pertambahan jumlah penduduk dan perkembangan struktur perekonomian. Di sisi lain, masyarakat pemilik lahan pertanian adalah penduduk yang sebagian besar terkendala masalah keuangan.

Ketua RW 09 Kelurahan Oebufu, Kota Kupang Michael Magnus mengatakan alih fungsi lahan pertanian di kelurahan tersebut sulit dibatasi. Selama 20 tahun terakhir, alih fungsi lahan pertanian di wilayah itu mencapai puluhan hektare. Bahkan lahan tempat rumah Michael dibangun, dulunya sawah. "Sawah-sawah di kelurahan ini dijual karena kebutuhan ekonomi pemiliknya," ujarnya.

Sesuai catatan Michael, lahan sawah yang terjual selama 20 tahun tersebut meliputi dua wilayah rukun tetangga (RT). Kini di atas tanah tersebut telah dibangun rumah penduduk, kios, bengkel, toko, gedung milik pemerintah, ruko, rumah makan, dan apotek. Dua RT itu ialah RT 35 yang ditempati 52

keluarga, dan RT 36 yang ditempati 42 keluarga.

Menurutnya sampai 2014, alih fungsi lahan pertanian masih berlangsung. Misalnya seorang pemilik tanah memilih menjual sawahnya ke pengembang untuk membangun ruko dan rumah makan. Ia mengatakan alih fungsi lahan secara besar-besaran dimulai sejak 1990an yakni ketika persawahan besar di wilayah Kelurahan Oebufu dijual untuk pembangunan pusat pembelanjaan mewah.

Harga jual lahan sawah ketika itu mencapai miliaran rupiah kemudian mendorong petani lainnya berbondong-bondong menjual sawah. Akibatnya lahan pertanian dijual kepada pihak lain dengan harga Rp750.000 per meter persegi. Harga itu naik drastis dari harga sebelumnya yakni Rp300 per meter persegi. "Saat ini masih ada lahan sawah yang dijual yang dipatok hingga Rp10 miliar," kata Dia.

Tingginya alih fungsi lahan di kompleks perumahan Oebufu tersebut, menjadikan wilayah yang dulunya sejuk kini mulai panas. "Kami tidak bebas lagi menghirup udara segar," kata Dia.

Alasan lain penjualan lahan sawah menurut Dia, ialah adanya peralihan sumber daya manusia yang beralih kerja menjadi pegawai negeri dan meninggalkan pertanian. Ada juga pendapat yang menyebut rendahnya produksi gabah sehingga lahan dijual.

Kepala Bidang Sarana dan Prasarana, Dinas Pertanian dan Hortikultura Nusa Tenggara Timur Adi Wiratma mengatakan, pihaknya telah mengajukan rancangan peraturan daerah tentang alih fungsi lahan ke DPRD untuk dibahas.

Peraturan daerah (Perda) alih fungsi lahan antara lain akan membatasi warga menjual sawahnya kepada pengusaha maupun investor. Perda juga akan memuat sanksi

kepada petani yang menjual areal persawahannya untuk pembangunan gedung.

Warga memilih menjual areal persawahannya kepada investor karena tergiur harga beli yang cukup tinggi. Hal itu menurut Wiratma, tidak bisa dibatasi karena petani juga membutuhkan uang. "Jika ada perda dan tata ruang wilayah, tentu alih fungsi lahan dibatasi," katanya.

Ia mengatakan pembuatan perda alih fungsi lahan didasarkan pada empat perda yakni Perda Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Perda Nomor 12 Tahun 2012 tentang Inisiatif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Perda Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dan Perda Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

BUAH LONTAR PUN BISA JADI DODOL

Oleh **ASTRID TEHANG**

Harian *Victory News*

TANAHNYA tandus dan berkarang dengan suhu di atas 28 derajat celsius. Itulah gambaran kondisi Kota Kupang. Dengan kondisi ini, tak heran bila musim kemarau lebih lama dibanding musim hujan, sembilan bulan berbanding tiga bulan. Dengan kondisi ini pula, masyarakat terutama petani dituntut aktif dan kreatif memanfaatkan lahan kering yang dimiliki sebagai sumber ekonomi keluarga. Termasuk memanfaatkan tanaman lontar, tanaman khas NTT yang bernilai ekonomis.

Tanaman lontar sering dipandang sebelah mata. Padahal, akar, batang, daun, bisa menjadi handmade yang bernilai seni tinggi. Bahkan, buahnya pun dapat dikreasikan menjadi snack atau makanan ringan dan juga sirup yang dipercaya bisa menjadi obat untuk kesehatan. Menariknya, buah lontar yang oleh masyarakat setempat disebut 'buah saboak' ini bisa diolah menjadi dodol.

Pengagas Prof Dr Ir I Nyoman Widiartha Mahayasa MP yang pertama memperkenalkan manfaat buah lontar yang luput dari perhatian masyarakat ini. Selain melalui penelitian, Prof Mahayasa memberdayakan warga di wilayah yang memiliki lahan lontar terbanyak di Kota Kupang, seperti

di Kelurahan Kolhua, Airnona, Lasiana, bahkan sampai ke Kabupaten Rote Ndao.

Kepada masyarakat, Mahayasa mengajarkan pengolahan buah lontar sebagai bahan pelengkap pada es buah, cake, selai, kerupuk. Tidak hanya itu, buah lontar pun bisa diolah menjadi dodol, ya dodol lontar.

Dodol lontar mempunyai rasa yang tidak jauh berbeda dengan dodol bermerk dari Pulau Jawa. Bedanya, kandungan gizi dalam dodol lontar lebih tinggi dibanding dodol dari daerah lain di Indonesia. Dodol lontar mengandung antioksidan yang dapat mencegah kanker, juga mengandung vitamin C. Selain itu, dodol lontar bisa dijadikan obat herbal untuk menekan diare dan obat anti maag.

Dalam pengembangannya, Prof Mahayasa mengaku mengalami kendala karena kelompok masyarakat yang dilatoh dan dibina, tidak memanfaatkan dan mengembangkan ilmu dan keahlian yang mereka peroleh. Di antara sekian kelompok binaan, terdapat satu kelompok yang bertahan dan mengembangkan kreasi buah lontar, termasuk menolaknya menjadi dodol.

Karena kecintaan dan ketekunannya mengajarkan pengolahan buah lontar, Prof Mahayasa dipanggil dengan profesor lontar. Prof Mahayasa yang pernah meraih penghargaan Upakarti tahun 2010 karena jasa pengabdianya kepada masyarakat ini, mengakui bahwa pengembangan dan produksi pohon lontar belum mendapat perhatian di mata pemerintah.

Selain pengembangan usaha mikro dengan kreasi pangan, pembibitan apalagi produksi, masih jauh dari lirik pemerintah. Padahal, jika dikembangkan dengan baik, barang-barang hasil kreasi dari pohon lontar siap bersaing dengan

produk lain, bahkan bisa menjadi sumber energi biotanol, bahan bakar terbaru pengganti bensin.

Usaha Dodol Kelompok binaan yang masih konsen mengembangkan produk lontar berada di Kelurahan Airnona Kecamatan Kota Raja. Kelompok ini diketuai oleh David Djeke Mata (43). David bersama lima kepala keluarga (KK) memulai produksinya pada 2004. Namun dalam perjalanannya usaha mereka macet sehingga dialihkan menjadi usaha rumah tangga yang dikerjakan bersama istrinya Eny Astuti (43).

Hasil usaha David berupa dodol lontar kemudian dipasarkan sendiri oleh Prof Mahayasa. David menuturkan bahwa membuat dodol butuh ketekunan.

“Saya bahkan harus mencari buah lontar keliling area di Kota Kupang yang memiliki lahan lontar. Tidak perlu naik pohon itu dan ambil buahnya karena yang dibutuhkan adalah buah lontar matang yang justru jatuh dengan sendiri dari atas pohonnya, ” tutur David.

Proses pembuatan dodol lontar juga cukup sulit dan membutuhkan waktu hingga satu hari. Untuk membuat dodol yang dibutuhkan adalah pulp atau sari buah lontar. Pulp lontar ini kemudian diproses hingga menghasilkan sari dan dimasak kurang lebih empat jam.

Setelah dimasak, dodol didiamkan sehari untuk mendapatkan tekstur keras, lalu dipotong dan dikemas. Jadilah, dodol lontar yang siap dipasarkan. Bagi Anda yang penasaran dengan rasa rasa dodol lontar, bisa membelinya di pusat oleh-oleh Toko Soekiran, Mitra Agung, dan Toko Sudi Mampir. Dodol lontar ini bisa dijadikan cemilan atau oleh-oleh khas dari NTT. Harga dodol lontar pun terjangkau, satu dos tidak lebih dari Rp 10.000.

SPBU NOELBAKI BERDIRI DIANTARA RATUSAN HEKTAR SAWAH

Oleh **ERAS POKE**

Wilayah Noelbaki dan sekitarnya telah ditetapkan sebagai daerah Pertanian berdasarkan Perda Kabupaten Kupang Nomor 4 Tahun 2002 lalu. Namun kehadiran Station Pengisihan Bahan Bakar Umum (SPBU) yang berlokasi di Noelbaki Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang sepertinya tidak dapat dibendung.

Terbukti, walaupun saat ini SPBU tersebut belum mulai beroperasi namun sekira 2000 m² lahan pertanian diwilayah tersebut tidak dapat digarap lagi karena saat ini SPBU milik Agustinus Jemi Soleman telah berdiri kokoh diantara ratusan hektar sawah yang sedang digarap masyarakat disana.

Sekretaris Daerah kabupaten Kupang, Hendrik Paut ketika dikonfirmasi mengenai hal ini, Sabtu (5/4/2014) mengaku, penjualan lahan tersebut tidak melibatkan Pemkab Kupang. Namun ketika lahan itu hendak digunakan untuk pembangunan SPBU barulah pihaknya menurunkan tim untuk melakukan pengecekan lapangan.

Dikatakan, setelah menurunkan tim maka pihaknya telah meminta agar pemilik SPBU tidak melanjutkan pembangunan. Alasannya, pembangunan tersebut harus menunggu hasil

revisi dari Perda Tata Ruang dan tata wilayah yang prosesnya kini tinggal menunggu kesediaan waktu para wakil rakyat Kabupaten Kupang untuk membahasnya.

“Kita tunggu hasil revisi Perdanya dulu. Nanti kita lihat kalau dalam Perdanya disebutkan wilayah itu merupakan zona campuran maka baru kita bersikap,” kata Paut.

Pembangunan SPBU Noelbaki sendiri pernah diributkan oleh Perhimpunan Petani Pemakai Air (P3A) dan Kelompok Tani Rindu Sejahtera (KTRS). Bahkan 3-4 Agustus 2011 lalu mereka pernah mendatangi para wakil rakyat Kabupaten Kupang menyampaikan keinginan mereka agar pembangunan SPBU milik dari PT Piala Jaya segera dihentikan.

Dalam dengar pendapat yang dihardiri DPRD Kabupten Kupang, pemerintah, Pertamina dan Investor kala itu, para petani mendesak agar pembangunan SPBU oleh investor segera dihentikan. Alasan para petani ketika itu, kehadiran SPBU tersebut sangat berdampak pada persawahan, yang imbasnya mata pencaharian petani akan berkurang.

“Kami minta kepada dewan dan pemerintah agar mendengar keluhan kami, jika SPBU tetap dibangun di area persawahan akan merugikan kami sebagai petani, ” tegas salah seorang anggota kelompok tani saat dengar pendapat di gedung DPRD Kabupaten Kupang.

Pihak Pertamina dalam rapat dengar pendapat ini mengaku sudah mengantongi 18 kriteria yang diajukan oleh pihak investor dalam pembangunan SPBU. Sayangnya Pertamina sendiri enggan memberikan hasil kepada Dewan maupun kepada pemerintah setempat.

Sedangkan Agustinus Jemi Soleman sebagai pemilik SPBU Noelbaki dalam penjelasannya kepada para wakil rakyat Kabupaten Kupang dan petani mengatakan, pembangunan

SPBU telah diajukan ke Pertamina sejak tahun 2009 lalu dengan dua lokasi yang berbeda yaitu Asam tiga Naibonat dan Noelbaki. Untuk Noelbaki lahan yang dipakai 2000 meter persegi.

“Berdasarkan pengakuan warga setempat, lahan itu tidak pernah digarap dan merupakan lahan kosong dan kami sudah menguasainya sejak tahun 1995 dan saat telah memiliki sertifikat, ” kata Soleman.

Anggota DPRD Kabupaten Kupang Matheos Liu dalam pertemuan ini mengaku dirinya sempat mendapatkan hasil kopian pembangunan SPBU yang telah ditanda tangani oleh pemerintah. “Saya sudah dapat hasil copian yang sempat ditandatangani oleh Bupati Kupang, ” tutur Theos Lius.

Sedangkan Ketua Fraksi Golkar, Robby Manoh meminta kepada pihak investor kalau memang mereka memiliki bukti yang cukup, terkait dengan pembangunan SPBU segera ditunjukkan agar persoalan ini dapat selesai secara arif dan bijaksana, ” pinta Robby Manoh.

Ketua DPRD Kabupaten Kupang, Octory Gazpers yang kalau itu masih menjabat sebagai Ketua Komisi B, menambahkan berdasarkan Advis plan yang dikeluarkan oleh Bappeda Kabupaten Kupang bukan untuk pembangunan SPBU tetapi lokasi pertanian lahan basah dan pelebaran/ pembukaan jalan desa.

Mendengar penjelasan tersebut, Jemi Soleman dengan tenang mengatakan pihaknya tetap menerima saran dan masukan jika dalam pembangunan SPBU ini masih ada persyaratan yang belum diselesaikan, untuk itu pihaknya siap untuk memenuhi segala aturan yang ada. “Saya sudah berusaha, kalau memang masih ada persyaratan yang belum saya penuhi saya siap untuk melaksanakan sesuai dengan

petunjuk yang ada, pintanya. Untuk itu Jemi Soleman juga berjanji pihaknya akan mendatangi masyarakat Noelbaki sekaligus mensosialisasikan kepada masyarakat setempat.

Harus diakui bahwa penjualan tanah milik masyarakat memang tidak perlu melibatkan Pemda setempat. Namun Pemda perlu bersikap tegas ketika peraturan daerah yang dibuat bersama para wakil rakyat tidak diindahkan para pengusaha.

Dalam kasus pembangunan SBPU Noelbaki, Pemda terlihat baru bersikap ketika ada sekelompok masyarakat yang mendatangi para wakil mereka di gedung DPRD Kabupaten Kupang. Hasilnya memang pembangunan tersebut saat ini belum dapat diteruskan namun lahan didaerah tersebut uga tidak dapat lagi dikelola para petani. Sebab disana ratusan areal persawahan telah ditutup dan kini sebuah SPBU telah berdiri kokoh. Lalu siapa yang dapat disalahkan ketika hal ini telah terjadi? Rasanya sudah terlambat jika harus mencari pihak yang harus dipersalahkan. Sebab masyarakat pemilik lahan tentu akan mengaku jika mereka terpaksa menjual lahan tersebut karena ada satu kebutuhan yang mendesak dan memerlukan uang. Karena itu mereka pasti tidak akan mau dipersalahkan begitu saja.

Begitu juga dengan Pemda setempat. Mereka pasti akan berdalih jika penjualan aset masyarakat tidak melibatkan dewan. Karena itu, yang perlu dijadikan pelajaran dalam kasus ini adalah kewaspadaan dan melek aturan dari aparat desa setempat serta kedewasaan dari para investor dalam melihat setiap aturan atau regulasi yang dikeluarkan Pemerintah daerah. Dengan begitu, walaupun seorang investor mampu membeli ribuan hektar lahan namun peruntukannya tidak akan menyalahi aturan yang dikeluarkan Pemerintah.

SEMAKIN SEMPITNYA LAHAN PERTANIAN DI KOTA KUPANG

Oleh **LABU NGGIKU MBUHANG**

Dipublikasikan di Media Online : www.nttonlinenow.com pada 19 Maret 2014.

Akhir-akhir ini kita merasakan terik matahari yang semakin panas menyengat. Tidak terdengar lagi kicauan burung – burung, tidak terlihat lagi hamparan sawah menghijau, dan suara petani yang mengusir burung – burung di sawah. Semua digantikan dengan bisungnya suara kendaraan bermotor dan hiruk pikuknya para pemberi dan penerima jasa menawarkan jasa dan meminta jasa khususnya sepanjang jalan WJ.Lalamentik, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang.

Sebelum tahun 1999 lahan pertanian yang berada di dekat perkotaan khususnya di lokasi tertentu boleh dikatakan masih banyak lahan pertanian yang kosong, baik sawah maupun bukan sawah. Belum tampak bangunan berdiri diatas lahan kosong tersebut. Di musim hujan kita masih bisa melihat tanaman padi sawah dan jagung. Demikian pula yang terjadi jika musim kemarau, kita hanya melihat hijaunya daun kangkung dan sesawi.

Tetapi sejak tahun 1999, pemandangan sawah yang dulu masih terlihat hijauÂ daun kangkung dan sesawi juga buliran

padi yang menguning mulai terlihat berkurang. Peralpnya, sudah berganti dengan gedung – gedung perkantoran, ruko – ruko dan dan swalayan.

Begitu pula di sepanjang jalan Timor Raya yang dahulu disebut jalan Tim – Tim. Dimulai dari Kelurahan Pasir Panjang hingga Kelurahan Lasiana.

Jhon Lende Dendo, salah seorang pengelolah tanah milik Pemerintah NTT yang belum difungsikan merasa kwatir empat hingga lima tahun kedepan lahan pertanian yang terletak di dekat perkotaan akan segera difungsikan oleh Pemerintah Provinsi NTT. Maka dirinya sebagai petani akan kehilangan salah satu mata pencaharian. “Saya tidak mempunyai lahan pertanian untuk bercocok tanam lagi”, keluh Jhon.

Sejak tahun 1996 sampai dengan sekarang, Jhon Lende Dendo masih mengelola tanah milik Pemerintah Provinsi NTT yang terletak di depan GOR Oepoi. Tanah seluas 23 are ini, selama 15 tahun ditanami padi (1996 – 2012) dengan hasilnya mencapai kurang lebih satu ton. Padi dari hasil panen sawah seluas 23 are ini saat dijualnya mencapai kurang lebih Rp 6 juta satu kali panen. Kemudian di tahun 2013, dia mencoba menanam sayur kangkung. Hasil yang diperolehnya lebih besar dibandingkan saat ditanami padi, yaitu berkisar Rp 10 juta hingga Rp 11 juta setiap kali panen.

Demikian pula lahan di median jalan El Tari, tepatnya di depan Kantor Konsulat Timor Leste. Dahulu masih hijau dengan pepohonan dan semak – semak, kini jadi rebutan warga untuk dimanfaatkan menanam sayur. Di lokasi itu sebanyak 11 orang yang mengolah lahan tersebut untuk menanam sayur bayam. Lahan tersebut disewakan oleh keluarga Yunus Pandie selaku pemilik lahan. Sewa pun tergantung kesepakatan antara yang sewa lahan dengan pemilik lahan, ada yang kontrak satu

tahun hingga dua tahun, ada pula yang sewa bulanan.

“Kalau ada tanah pemerintah yang dipercayakan ke warga untuk kelola, kami siap kerja. Sekali pun hutan, kami siap kerja. Karena kami sendiri tak punya lahan pertanian”, kata Mesak dan Aris.

Menurut Aris dan Mesak, sebelum tanam sayur di median jalan El Tari, mereka juga pernah mengolah lahan bukan sawah di depan kantor Gubernur NTT, lahan milik Bank Indonesia (BI).

Waktu itu kurang lebih 50 orang yang memanfaatkan lahan tersebut. Tetapi karena BI saat ini sudah membangun gedung maka kami pindah di lokasi median jalan El Tari.

“Kami khawatir jika kedepan di median jalan ini pemerintah berencana melakukan pelebaran badan jalan, maka kami akan kehilangan mata pencaharian. Yang walaupun tanah ini milik warga, tetapi jika pemerintah meminta untuk kepentingan umum seperti contohnya untuk pelebaran jalan kita tidak bisa menolak”, kata Aris.

Menanggapi hal ini, Kadis Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kota Kupang Ir. Nuri Songkoeno yang ditemui Warta Flobamora di ruang kerjanya Senin 3 Februari 2014 mengatakan, “Areal pertanian yang mempunyai saluran irigasi biasanya kami tidak ijinkan untuk alih fungsi.”

“Selama ini dari Badan Pertanahan Kota Kupang, jika ada yang mau membeli tanah dari pemilik lahan, biasanya mereka konfirmasi terlebih dahulu kepada kami. Jika itu dirasakan masih bisa dipertahankan, maka kita pertahankan sesuai dengan tata ruang”, kata Nuri.

Kembali dikatakan Nuri, lahan pertanian difokuskan di tiga kecamatan yaitu Kecamatan Kota Raja, Maulafa dan Alak. Di tiga wilayah ini merupakan daerah fokus pertanian dan

peternakan. Sementara di kecamatan Oebobo, Kota Lama, dan Kelapa Lima merupakan kawasan campuran, yang didalamnya ada perkantoran dan pertokoan.

Data yang sudah dilaporkan khusus Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kota Kupang telah menunjukkan lahan pertanian khususnya sawah di Kota Kupang dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 memiliki lahan sawah sekitar 383, 60 hektare (Ha). Namun di tahun 2013 luas lahan sawah mulai berkurang dari 383, 60 menjadi 368, 00 Ha.

Sementara lahan pertanian bukan sawah, tahun 2011 seluas 8.250, 90 Ha, kemudian di tahun 2012 luas lahan pertanian bukan sawah 7.575, 80 Ha, tahun 2013, 8.693, 18 Ha. Begitu pula lahan bukan pertanian, tahun 2011, 9.392, 50 Ha, tahun 2012, 10.066, 00 Ha, tahun 2013, 9.052, 82 Ha.

Dari luas lahan pertanian tersebut, berdampak pada hasil pertanian. Dalam hal ini produksi padi sawah tahun 2011 mencapai 989 ton. Kemudian di tahun 2012, produksi padi sawah menurun menjadi 854, 12 ton, begitu pula produksi padi sawah tahun 2013, juga produksi menurun yaitu 798, 79 ton.

Demikian pula data produksi padi ladang, pada tahun 2011 mencapai 26 ton. Sementara di tahun 2012, produksi padi ladang naik menjadi 35, 28 ton. Kemudian di tahun 2013 produksi padi ladang kembali menurun yaitu 16, 71 ton. Sementara itu data produksi jagung di tahun 2011 mencapai 1.873, 00 ton. Namun dua tahun terakhir ini produksi jagung di Kota Kupang terus menurun, yaitu tahun 2012, 1.250, 42 ton, tahun 2013, 1.201 ton.

Kabid Tata Ruang Dinas Perumahan Rakyat dan Tata Ruang Kota Kupang, Ir. Herold Devy E. Look, MT mengatakan

areal pertanian di Kota Kupang tidak lagi sama dengan 10 tahun silam. “ Kenapa, karena perkembangan kota cukup padat seiring dengan pertumbuhan ekonomi.” Kemudian berkaitan dengan areal pertanian dari tahun ke tahun semakin sempit akibat adanya pembangunan perumahan toko, rumah makan dan kantor. Itu tidak bisa dibendung karena memang hak pribadi orang, baik yang menjual tanah maupun yang membeli.

Kenapa areal pertanian semakin sempit? Karena memang Kota Kupang bukan daerah pertanian. Kalau dahulu masih areal persawahan karena ada upaya dari nenek moyang kita. Jaman berganti, anak cucu yang mewarisi tidak lagi sebagai petani. Cucu menjual kepada orang lain karena cucu sebagai pewaris tidak lagi petani, orientasinya sudah berbeda.

Kepala Badan Pelayanan dan Perijinan Terpadu Kota Kupang, Bernadus Thomas Balukh, SH, pihaknya hanya mengeluarkan IMB. Tetapi yang menentukan suatu kawasan terbangun atau tidak, dan atau terbangun sebagai apa, itu adalah kewenangan dari institusi lain dalam hal ini Dinas Perumahan Rakyat dan Tata Ruang Kota Kupang.

“Sepanjang rekomendasi dari Dinas Perumahan Rakyat dan Tata Ruang Kota Kupang yang kami peroleh, jika persyaratan formal itu telah terpenuhi maka Badan Pelayanan dan Perijinan Terpadu akan menerbitkan IMB. Sebaliknya, jika tanpa adanya rekomendasi teknis dari Tata Ruang, maka kami tidak akan mengeluarkan IMB”, tambahnya.

Pengurusan IMB harus memenuhi beberapa persyaratan antar lain sertifikat tanah, informasi tentang peruntukan kawasan dari Tata Ruang, gambar rencana konstruksi bangunan, rencana anggaran bangunan diatas satu lantai.

“Jadi tugas pokok dan fungsi kami adalah penyelenggaraan

adminstrasi perijinan. Hal – hal yang sifatnya teknis, ijin yang memerlukan kajian teknis, harus ada rekomendasi dari unit teknis ” Thomas Balukh.

Sedangkan yang menyangkut industri, tanda daftar industri, ijin usaha industri, atau pergudangan, semua itu harus ada rekomendasi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kupang. Demikian pula bangunan – bangunan atau usaha – usaha yang diduga berdampak pada lingkungan, juga harus ada rekomendasi dari Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Kupang.

Sejak tahun 2010 hingga 2013, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Kupang telah mengeluarkan ijin sebanyak 2.804 ijin, yaitu tahun 2010 sebanyak 1.721 ijin, tahun 2011, 524 ijin, tahun 2012 sebanyak 693 ijin, dan tahun 2013 hanya 536 ijin.

Khususnya di tahun 2010 mencapai 1.721 ijin, dikarenakan pada saat itu adanya kebijakan dari Pemerintah Kota Kupang pemutihan sebanyak 1.100 ijin.

Pengamat Hukum Agraria Universitas Nusa Cendana (Undana), Dr. Umbu Lily Pekuwali, SH, M.Hum mengatakan Pemerintah Kota Kupang segera melakukan pengendalian alih fungsi lahan pertanian. Sebab kalau tidak, kedepan kedaulatan pangan akan merosot tajam. Kenapa? Karena sekarang ini masyarakat petani sudah mendominasi. Karena negara kita adalah negara agraris, sehingga sumber pendapatan masyarakat masih bergantung pada sumber lahan pertanian. Maka dari itu lahan pertanian harus tetap dijaga.

“Pengalaman saya ketika menyusun Peraturan Daerah (Perda) di Kabupaten Sumba Tengah, yang berkaitan dengan Perlindungan Lahan Pertanian Basah, itu didasari atas pertimbangan bahwa dari tahun ke tahun lahan pertanian yang ada di sepanjang pinggiran jalan semakin merosot.

Diharapkan kita dari Pemerintah Kota Kupang ini, bisa melakukan pengendalian alih fungsi lahan pertanian”, kata Umbu Lily.

BILA ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN, APA PENGARUHNYA PADA KETAHANAN PANGAN?

Oleh **MAXI MARHO**

Dimuat pada Pos Kupang.Com Edisi Rabu, 19 Maret 2014

Seorang petani bernama Mathias Sigi, tekun bekerja membajak sawah menggunakan hand tractor di lokasi persawahan Oepoi belakang rumah jabatan Gubernur NTT, Selasa (18/3/2014) sekitar pukul 10.00 WITA.

Pria ini bekerja sendirian di salah satu petak sawah. Sementara dua petani lainnya terlihat menanam padi pada lokasi lahan sawah yang agak jauh dari tempat Mathias Sigi berada.

Kepada wartawan ketika ditemui saat sedang bekerja, Mathias mengatakan, sebenarnya ia bertempat tinggal di Camplong, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang. Beberapa hari sebelumnya, ia diminta saudaranya bernama Ses Faot untuk datang ke Kupang dan membantu membajak sawah di lokasi tersebut jika pekerjaan membajak sawah miliknya di Camplong telah selesai.

Dikatakan Mathias, lokasi persawahan itu sebenarnya adalah lahan milik Pemerintah Propinsi NTT. Karena lahan belum digunakan pemerintah terutama sebagai lokasi

perkantoran, maka lahan persawahan ini dimanfaatkan saudaranya, Ses Faot untuk menanam padi.

Bagaimana prosesnya sehingga pemerintah mengizinkan Ses Faot memanfaatkan lahan persawahan tersebut, Mathias tidak mengetahuinya. Apalagi, Ses Faot sebenarnya bertempat tinggal di Metani, sekitar sepuluh kilometer dari lokasi persawahan.

Sesuai pantauan wartawan selama ini, kompleks lahan mulai dari belakang rumah jabatan Gubernur NTT, berjejer hingga ke belakang DPRD NTT dan belakang kantor Gubernur NTT, sebenarnya sejak dulu merupakan areal persawahan tadah hujan yang juga memanfaatkan tambahan sumber air dari sebuah sungai kecil di dekat kawasan itu. Namun dalam perkembangannya, terjadi perebutan dalam pemanfaatan lahan pertanian ini, sehingga terjadi pengalihan fungsi lahan secara pelan-pelan dari lahan pertanian menjadi lahan perkantoran dan pemukiman.

Bahkan, kompleks bisnis Ramayana Flobamora Mall, kantor pusat Bank NTT dan terakhir ada kantor Pengadilan Tinggi Agama, awalnya dibangun diatas lahan kawasan persawahan ini.

Pemukiman penduduk dan ruko serta usaha bisnis lainnya juga ada yang dibangun di sekitar kawasan ini sehingga lahan persawahan menjadi makin sempit. Padahal, sejak dulunya pemerintah juga sudah membangun saluran irigasi dari sungai kecil di kawasan persawahan milik masyarakat dan juga berbatasan dengan lahan pemerintah itu.

Perkembangan Kota Kupang dan pertumbuhan usaha bisnis serta pertumbuhan penduduk telah membuat lahan pertanian terpaksa harus beralih fungsi. Usaha pertanian memang lebih cocok di kawasan pedesaan di banding

perkotaan yang padat penduduknya. Warga kota yang ingin bercocok tanam, hanya bisa memanfaatkan sisa lahan yang belum difungsikan untuk bangunan atau memanfaatkan pekarangan.

Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi NTT, Ir. Yohanes Tay Ruba, MM yang ditemui di ruang kerjanya, Kamis (13/3/2014) siang, mengatakan, dalam bidang pertanian tidak dikenal istilah perebutan lahan tetapi dikenal dengan istilah alih fungsi lahan. Ada lahan pertanian yang dialih fungsi menjadi lokasi pemukiman atau bangunan perkantoran, lokasi bisnis, atau juga beralih fungsi sebagai areal perkebunan atau areal kehutanan dan perikanan atau kolam ikan atau tambak ikan.

Karena itu, menurut Tay Ruba, alih fungsi lahan tidak hanya terjadi di kota tetapi banyak juga terjadi di desa-desa. Alih fungsi lahan ini tentu berdampak pada tingkat produksi tanaman pertanian baik padi, jagung atau lainnya, dan kemudian berdampak pada ketahanan pangan masyarakat. Alih fungsi lahan ini terkadang terjadi akibat kebijakan pemerintah yang terkesan tumpang tindih dari berbagai sektor pembangunan.

Oleh karena itu, kata Tay Ruba, jalan keluar yang mestinya diambil adalah pembukaan lahan pertanian baru dan pola pertanian ekstensifikasi yang harus berubah menjadi pola pertanian intensifikasi. Petani harus berubah dari cara bertani tradisional kepada cara bertani yang modern, yang menggunakan benih tanaman yang unggul, pengolahan lahan yang baik, sistem pemberian pupuk yang benar, upaya pengatasan hama dan penyakit tanaman yang tepat serta pelaksanaan panen dan pasca panen yang juga tepat.

Jika hal ini dilaksanakan, kata Tay Ruba, tingkat produksi

tanaman pertanian akan tetap tinggi meskipun luas areal lahan pertanian menjadi sedikit berkurang karena adanya alih fungsi lahan. Peran pemerintah terutama dinas pertanian dan tenaga penyuluh pertanian di lapangan tentu sangat dibutuhkan.

Apalagi jika menghadapi iklim wilayah NTT dengan lama musim hujan yang Cuma 3-4 bulan dan selebihnya adalah musim kemarau dan pada saat musim hujan justru curah hujannya terkadang melampaui batas sehingga mengakibatkan banjir dan merendam serta merusak tanaman pertanian.

Dekan Fakultas Pertanian Universitas Kristen Artha Wacana (UKAW) Kupang, Zet Malelak mengatakan, perlu ada pemikiran-pemikiran baru untuk membangun pertanian yang kokoh dan berkelanjutan. Untuk mengatasi persoalan kekurangan pangan dan ketergantungan pada import perlu dipikirkan pembangunan pertanian jangka panjang.

Sejumlah hal tentu harus menjadi perhatian pemerintah termasuk pengalihan fungsi lahan, pola pertanian dan lainnya.

Hal ini dikatakan Malelak ketika tampil sebagai pemateri pada kegiatan Short Course "Peningkatan Kapasitas Jurnalis Dalam Mendukung Kampanye Grow," yang diselenggarakan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) bekerja sama dengan LSM Oxfam di Hotel Grenia Kupang, Sabtu (15/2/2014) siang. Menurut Malelak, perlu ada semangat wirausaha jika ingin hasil produksi pertanian meningkat dan daerah ini menjadi lumbung pangan.

Karena itu, Malelak mengusulkan perlunya kegiatan menanam tanaman pertanian di musim tanam kedua setelah musim tanam pertama selesai masa panen sebagai salah satu solusi. Petani harus bisa memanfaatkan sisa curah hujan setelah tiga bulan musim hujan berjalan, dan mengairi lahan-lahan pertanian di daerah sekitar aliran sungai atau di kompleks

persawahan.

Sebab, ciri hujan lahan kering NTT, dengan intensitas hujan tinggi serta angin Barat yang bertiup kencang di bulan Februari dan Maret, akan berdampak buruk kepada tanaman pangan di musim tanam pertama.

Materi Thesis mahasiswa pasca sarjana institut teknologi bandung, Muhamad Nur afandi berjudul "Pengaruh alih fungsi lahan pertanian terhadap ketahanan pangan di Jawa Barat (the impact of the functional shift of agricultural land on the food sustenance west Java)" yang dimuat di Perpustakaan Digital ITB (<http://digilib.itb.ac.id/index.php>) bisa dijadikan contoh bagi pemerintah Propinsi NTT.

Dalam thesisnya, Nurafandi menyatakan, alih fungsi lahan sudah sejak lama menjadi masalah. Khususnya di Jawa Barat, alih fungsi lahan pertanian produktif, terutama lahan sawah menjadi lahan non pertanian telah berlangsung dan sulit dihindari sebagai akibat pesatnya laju pembangunan antara lain digunakan untuk pemukiman, industri, sarana infrastruktur dan lainnya. Akibatnya, penurunan produksi padi di Jawa Barat yang menyediakan 17,84 % produksi beras nasional terjadi karena penciutan lahan sawah sebagai dampak alih fungsi lahan dan pelandaian tingkat produktivitas di daerah-daerah itensifikasi.

Usaha yang dilakukan pemerintah untuk mempertahankan swasembada pangan di Jawa Barat adalah peningkatan mutu program itensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi dan rehabilitasi lahan pertanian. Hal ini penting dilakukan guna mengantisipasi kebutuhan pangan khususnya beras yang terus meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan penciutan lahan sawah khususnya di Jawa Barat.

Hasil analisis Nurafandi, menunjukkan perubahan alih

fungsi lahan sawah ke lahan non sawah pada periode tahun 1995-2006 di Jawa Barat sebesar 225.292 hektar atau sebesar -1.82 persen. Dengan demikian setiap tahun Jawa Barat mengalami mutasi lahan sebesar -18.774 hektar.

Sementara produksi padi tahun 1995-2006 di Jawa Barat mengalami penurunan akibat alih fungsi lahan pertanian sebesar -1, 304, 853 ton atau sebesar -1.09 persen. Dengan demikian setiap tahun Jawa Barat mengalami pengurangan produksi padi sebesar -108.738 ton.

Kenyataan seperti ini mesti diantisipasi pemerintah dan masyarakat Propinsi NTT. Meskipun tingkat kepadatan penduduk masyarakat NTT saat ini belum sebanding dengan masyarakat di Jawa Barat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, alih fungsi lahan merupakan masalah tersendiri yang sering dialami dan dapat mengganggu tingkat produksi tanaman pertanian di samping faktor-faktor lainnya. Hendaknya, masalah alih fungsi lahan pun tidak dianggap sepele tetapi menjadi perhatian bersama.

CURAH HUJAN, BERPENGARUH BAGI PETANI KABUPATEN KUPANG

Oleh **RIFLAN HAYON**
Erende Pos

BERBICARA perubahan iklim sangat berpengaruh pada seluruh bidang kehidupan terutama kegiatan pertanian. Peristiwa banjir, longsor dan kekeringan adalah dampak nyata dari penyimpangan tersebut dan telah menjadi rutinitas tahunan yang seolah sulit dikendalikan. Secara tidak langsung, perubahan iklim bisa menurunkan produksi pertanian khususnya pangan terlebih pada lahan-lahan tadah hujan (lahan kering). Hal ini terbukti dengan perubahan iklim di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT), ternyata sangat mempengaruhi para petani di NTT, khusus di wilayah Kelurahan Oesao Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang.

Rata-rata lahan persawahan yang dimiliki masyarakat merupakan lahan tadah hujan dengan sistem pengairan irigasi, sehingga para petani masih memiliki rasa kuatir jika perubahan iklim yakni musim pengahujan dengan intensitas hujan yang tinggi dapat mempengaruhi terjadinya gagal panen.

Kekuatiran petani Kelurahan Oesao akan pertumbuhan dan produksi tanam padi dengan iklim yang intensitas hujan

yang terjadi cukup tinggi ini sesuai perbandingan hasil produksi mereka pada dua tahun terakhir yakni pada tahun 2011-2012.

Salah seorang petani asal Kelurahan Oesao, Anderias Saba, yang ditemui di lokasi persawahan Oesao menuturkan, persoalan yang menjadi kekuatiran dengan perubahan iklim yakni musim penghujan yang terjadi cukup tinggi pada musim tanam adalah hasil prosuksi.

“Kami para petani di Oesao tentunya kuatir akan perubahan iklim pada musim hujan yang terjadi cukup tinggi dengan hasil produksi yang didapat. Karena, dengan kondisi hujan yang terjadi cukup tinggi, area persawahan yang sudah ditanami padi akan terendam banjir,”katanya.

Ia mengaku, terbukti tahun 2011 curah hujan yang terjadi cukup tinggi mengakibatkan lahan pertanian yang siap panen direndam banjir. Sehingga, daya tampung bendungan yang ada pada bagian hulu yakni di desa Pukdale jebol sehingga semua saluran irigasi yang ada, tidak mampu menampung air. Air meluap merendam ratusan hektar tanam padi yang siap panen, sehingga saat panen tiba hasil yang didapat sangat menurun.

“Musim tanam 2011 hasil produksi menurun , karena rata-rata sawah siap panen sebanyak 200 hektar di wilayah Oesaoa terendam banjir.Biasa satu hektar jika kondisi hujan tidak terlalu tinggi dan pengaturan air irigasi bagus untuk luas lahan 1 hektar hasil gabah keriang (padi) yang didapat sangat lumayan mencapai tiga ton lebih , tetapi pada tahun 2011 untuk luas lahan 1 hektar hasil yang didapat hanya 1 ton lebih , ”kata Anderias membandingkan hasil produksi yang diperolehnya.

Sementara masuk musim tanam tahun 2012 dengan

kondisi hujan yang terjadi pada bulan Desember dan Januari normal, sehingga kondisi air irigasi masih bisa diatur untuk mengairi persawahan yang diwilayah ini.

“Pada tahun 2012 hasil yang didapat masih terbilang cukup bagus dengan kondisi curah hujan yang terjadi pada bulan Desember dan Januari tidak terlalu tinggi. Untuk luas lahan satu hektar hasil yang didapat bisa mencapai 3,70 ton,” katanya.

Hal senada juga disampaikan salah seorang petani asal Naibonat, Yohanes Wadu, perubahan iklim yang terjadi dengan intensitas tinggi tentunya sangat mempengaruhi hasil produksi pertanian.

Musim tanam tahun 2011, rata-rata petani di wilayah Oesao, Pukdale, dan Naibonat yang masih masuk wilayah Kcamatan Kupang Timur mengalami gagal panen, akibat semua area persawahan terendam banjir.

“Banjir tahun 2011 melanda semua area persawahan yang ada di wilayah. Pemilik areal persawahan yang terendam banjir, masing-masing Onal Pala seluas tiga hektar, Semi Mahuri satu hektar, Ardu Gia setengah hektar, dan lahan milik Universiats Undana yang digarap oleh orang setengah hektar, serta lahan persawahan milik Sinode GMIT satu hektar juga terendam banjir,” katanya.

Ia menambahkan, salah satu penyebab terjadinya banjir pada tahun 2011 sehingga terjadi gagal panen karena curah hujan yang terjadi sangat tinggi. Hal ini menyebabkan air dari beberapa Kali yakni Kali Oesao dan Kali Pukdale di Kampung Felakdale meluap.

Berdasarkan persoalan yang dialami para petani di atas maka tentunya periode musim hujan dan musim kemarau tidak dapat lagi diramalkan secara pasti. Beberapa kali

terjadi kesalahan dalam menentukan saat tanam karena perubahan cuaca dan iklim yang mengalami penyimpangan berkepanjangan. Sehingga kondisi hujan yang tinggi membuat beberapa tanaman tidak dapat berproduksi secara optimum sehingga menurunkan hasil panen.

Untuk itu peran Pemerintah Daerah tentunya sangat diperlu melalui kebijakannya serta pola pikir mereka yang kreatif, serta peran pemerintah dalam kebijakan anggaran, terhadap petani tidak teralalu maksimal dalam memenuhi kebutuhan pangan. Sesuai hasil survei Lembaga Swadaya Masyarakat PIKUL yang memiliki kepedulian soal kebutuhan pangan nasional yang disampaikan oleh Deputy Direktur LSM PIKUL, Torry Kuswardono saat membawa materi tentang kedaulatan pangan dan pangan lokal kepulauan Nusa Tenggara Timur pada acara peningkatan kapasitas jurnalis dalam mendukung kampanye global yang bertajuk Grow yang dilakukan oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Kupang bersama Oxfam, organisasi internasional non government yang peduli pada kondisi ketahanan pangan dunia yang semakin kritis saat ini, di Hotel Grenia Kupang, Sabtu (22/2). Ia mengatakan, sesuai hasil laporan analisis kecenderungan anggaran kedaulatan pangan Propinsi NTT pada tahun 2010 - 2013 Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) pada tahun 2010 - 2013, pemerintah menempatkan ketahanan pangan sebagai prioritas nomor 5 dari 11 prioritas, setelah reformasi birokrasi dan pemerintah, pendidikan, kesehatan dan pengurangan kemiskinan. Hal ini menyebabkan kecilnya anggaran yang dialokasikan untuk ketahanan pangan ini.

Ia mencontohkan, dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (RAPBN) 2013, alokasi untuk ketahanan pangan sebesar Rp. 83 triliun, terdiri dari Rp 64, 3 triliun

untuk program ketahanan pangan dan 18.7 triliun untuk infrastruktur. "Walau anggaran untuk ketahanan pangan mencapai 5%, tetapi tidak jelas apakah juga mencakup anggaran untuk bibit, pupuk dan adaptasi iklim," katanya.

Ia mengaku, Untuk alokasi anggaran ketahanan pangan jauh dibawah alokasi untuk pendidikan yang mencapai 20% dan subsidi energi sebesar 13% dari total anggaran. Alokasi untuk ketahanan pangan ini mencakup juga revitalisasi pertanian menuju swasembada pangan, meningkatkan daya saing produk pertanian, meningkatkan pendapatan petani, dan melestarikan lingkungan dan sumberdaya alam. Mengingat lebihdari setengah rumahtangga miskin tinggal di desa dan tergantung pada pertanian, maka anggaran 5% masih jauh dari cukup.

"Sementara itu, di NTT, tahun demi tahun diisi dengan informasi dan berita tentang krisis pangan atau rawan pangan. Bila terjadi kekeringan, NTT diberitakan kekurangan pangan. Bila terjadi kebanyakan hujan, demikian juga dampaknya. Belum lagi faktor periodik lain seperti angin kencang dan hama tanaman. Sehingga tidak mengherankan bila pemerintah NTT diharapkan mengembangkan program yang inovatif dan mengalokasikan anggaran yang signifikan untuk mengatasi kondisi ini," katanya.

Terlebih lagi untuk menciptakan kondisi yang lebih aman dan stabil , Torry mengatakan, anggaran bagi hampir 90% penduduknya yang petani lahan kering, sebagai prioritas pembangunan dan penganggaran daerah.

Sedangkan berkaitan dengan peran Pemerintah Daerah tentunya sangat diperlu melalui kebijaknya serta pola pikir mereka yang kreatif melalui SKPD terkait hingga petugas penyuluh pertanian di tingkat kecamatan hingga tingkat desa

, sehingga para petani bisa didorong dalam meningkat hasil produksi guna bisa adanya pemunahan akan pangan ditingkat petani.

Dekan Fakultas Pertanian Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, Zet Malelak ketika tampil sebagai pemateri pada short course “Peningkatan kapasitas Junarlis dalam mendukung kampanye grow, yang diselenggarakan Aliansi Junarlis Independen (AJI) - Oxfam di Hotel Grenia, Sabtu (15/2), mengatakan keberhasilan dibidang pertanian adalah bagaimana peran pemerintah dalam membangun semangat berusaha, berwirasusaha dalam meningkatkan hasil produksi pertanian sehingga bisa disebut sebagai lumbung pangan.

Menurutnya, dengan berbagai fenomena dan perilaku kegiatan pertanian di Indonesia dan NTT khususnya maka perlu ada pemikiran-pemikiran baru untuk membangun pertanian yang kokoh dan berkelanjutan. Maka untuk mengatasi persoalan kekurangan pangan dan ketergantungan pada import perlu dipikirkan pembangunan pertanian jangka panjang.

Dengan curah hujan yang terjadi di NTT tiga bulan dalam setahun tentunya dengan demikian menghasilkan sungai mengalir sepanjang tahun serta sungai terputus (intermiten) sebagai sumber air irigasi. Untuk pelaksanaan kegiatan proses penanaman harus dilakukan dimusim tanam ke dua yang dapat mengairi lahan-lahan pertanian di daerah aliran sungaijangan dilakukan pada musim tanam pertama.

Untuk pola penanaman seperti yang harus diperhatikan pemerintah guna bisa proses produksi bisa berhasil dan persoalan pangan bisa teratasi.“Selama ini semua ini belum dikembangkan secara baik untuk strategi stok pangan nasional dan pasar ekspor di NTT.

Dengan siraman curah hujan ke tiga bulan dan terputus putus maka pertanian NTT mestinya difokuskan dimusim tanam kedua. Sebab dengan ciri hujan lahan kering NTT dengan intensitas tinggi serta AnginBarat yang kencang di bulan Februari dan Maret akan memberikandampak buruk kepada tanaman pangan di musim tanam pertama,” katanya.

Ia menambahkan, Hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah, agar empat zona agroekosistemlahan kering NTT bisa berjalan sebagai pasar ekspor dalam menyiapkan potensi stok pangan rakyat di Timor Leste, Maluku dan Papua.Jika tidak maka NTT akan tetap seperti ini.Karena pangan jagung merupakan pangan utama yang selalu dibanggakan Pemda NTT yang selalu memberikan resposibilitas tinggi kepada kebutuhan energy pertumbuhan tubuh orang NTT.

Namun dalam perjalanan sejarah panjang komoditi ini mengalami degradasi yang cukup serius sehingga komoditi ini hanya dibicarakan dalam sejarah pangan tetapi tidak dibicarakan dalam perpektif pangan maupun perspektif ekonomi.

“Dengan begitu banyak persoalan dan kendala yang dihadapi dalam pengembangan jagung ini, maka sulit untuk kita membangun kembali jagung sebagai komoditi unggulan yang tinggi di NTT.Untuk dengan berbagai kendala tersebut maka kita mesti perlu mencari strategi yang tepat yang dapat meningkatkan produktifitas dibidang pertanian didaerah ini,”katanya.

BINDE KIKI, SI KECIL YANG TERLUPAKAN

Oleh **GERILYAWAN PUTRA**

<http://degorontalo.com/binde-kiki-si-kecil-yang-terlupakan/>

Salim Hiliwa baru saja turun dari sepeda ontel. Usai mengayuh sepeda tua itu, ia mendekati dinding samping rumahnya. Ontel kesayangannya setia berlabuh di situ. Di rumah sederhananya di Desa Padengo, Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo.

Sore itu, panas masih menyengat. Bulir-bulir keringat masih bergelantungan di wajahnya. Salim baru saja kembali dari kebun. Saban pagi dan sore hari, ia berkebun. Di tempat itu pula ia mempertaruhkan keberlanjutan hidupnya, dan juga dua orang anaknya. Jagung menjadi tanaman utama. Selain jenis pangan lainnya.

Mun, sang istri, menyambut kepulangan sang suami. Senyum menghangat dari kedua pipinya. Sambil membereskan pakaian di tali jemuran, keduanya bercakap-cakap. Tak lama setelah istrinya masuk ke dalam rumah, saya menghampiri Salim Hiliwa, seraya memperkenalkan diri.

Salim bercerita. Tak jauh dari tempat tinggalnya, ia memiliki lahan yang luasnya kurang lebih satu hektar. Ia mengolah lahan tersebut dengan menanam jagung. Jenis jagung yang ditanamnya adalah jagung hibrida yang sudah sangat sering ditemukan di pasaran. Pupuk-pupuknya pun

banyak di jual.

“Sekarang usianya sudah dua bulan lebih. Panen jagung biasa diusia seratus hari lebih,” ungkap Salim.

Jenis jagung hibrida ini sudah lama ia tanam. Hasil panen Salim jual sendiri di pasar. Terkadang, ada juga penadah yang datang langsung di rumahnya untuk membeli jagungnya.

Ketika ditanya mengenai peran pemerintah dalam usaha perkebunannya, istri Salim yang tadinya berada dalam rumah, tiba-tiba ikut menjawab pertanyaan saya. Sepertinya sedari tadi dia mendengar percakapan kami.

“Beberapa waktu lalu pernah ada yang datang dan mau membantu. Tapi ketika kami tunggu, orang itu tidak datang juga. Orang itu juga janji pada saat penanaman, eh, tiba waktu penanaman orangnya malah tidak muncul.”

Selama ini Salim dan keluarganya hanya bekerja sendiri. Mulai dari pencarian bibit, hingga penjualan hasil panen. Dan, jagung merupakan tanaman utama yang ditanam di lahannya. Sementara *binde kiki*, jagung lokal Gorontalo yang dahulu begitu diidolakan, kini jarang ditanam.

Binde kiki, atau dalam bahasa Indonesia dapat diartikan ‘jagung kecil’ merupakan varietas tanaman jagung lokal yang ada di Gorontalo. Namun, keberadaannya kini semakin tergerus akibat banyaknya jagung-jagung hibrida yang mulai menguasai pasar jagung di Gorontalo.

“Pertama kali saya menanam di kebun itu justru binde kiki. Tapi saya hanya menanam sekali saja, setelah itu datang serbuan jagung hibrida. Kalo binde kiki biasa cuma dimakan sendiri. Tidak dijual. Binde kiki itu sebenarnya lebih bagus, beda dengan yang biasa. Harganya juga beda. Binde kiki harganya sekitar Rp3.000 per Kg. Sementara jagung biasa harganya Rp2.740 per Kg,” ungkap Salim.

Binde kiki mempunyai ciri fisik yang khas, antara lain: tongkolnya yang kecil dan bewarna putih. Rasanya yang cukup manis biasanya dimanfaatkan oleh orang Gorontalo untuk dijadikan sup jagung atau dalam bahasa lokal biasa disebut *binde biluhuta* atau lebih umum *milu siram*.

Binde kiki sangat sulit ditemui di wilayah Kota Gorontalo. Padahal, di tahun 1990-an jagung lokal ini seperti menjadi bintang di pasaran. Binde kiki dengan mudahnya ditemui di rumah-rumah warga yang biasanya menjual binde biluhuta.

Ketika itu, setelah magrib, binde kiki yang sudah dijadikan binde biluhuta dijual dan dijamin semuanya bakal laris manis. Sekarang, jagung manis yang lebih besar dan banyak mengandung bahan kimia banyak bertebaran di pinggir jalan. Sinar binde kiki pun seolah meredup, dan mulai ditendang dari panggung pasar.

Menurut Nelson Pomalingo, Rektor Universitas Muhammadiyah Gorontalo (UMG), jagung lokal yang dikenal dengan binde kiki jauh lebih unggul. Salah satunya masa panen terbilang singkat yakni hanya 2 bulan 10 hari, tahan wereng, kadar air rendah sehingga sekali jemur sudah kering. Binde kiki ini juga padat dan tahan lama meski disimpan berbulan-bulan.

“Berbeda dengan jagung hibrida, yang masa panennya hingga 120 hari, kadar air yang banyak dan tidak tahan wereng,” ungkap Nelson.

Kini keberadaan si kecil binde kiki ini semakin sulit dicari. Hanya segelintir orang yang masih mau menjualnya di pasaran. Itupun hanya ketika hari-hari tertentu saja. Kalah jauh dari si jagung hibrida yang hampir setiap hari mudah untuk ditemui.

Peran serta pemerintah Gorontalo dinilai berpengaruh

dalam hilangnya si kecil dari pasaran. Dengan alasan demi meningkatkan produktivitas, pemerintah rela mendatangkan bibit-bibit jagung hibrida dari luar Gorontalo, dan mulai menyisihkan si keci binde kiki.

Secara terpisah, Alim Niode, dosen pertanian Universitas Negeri Gorontalo (UNG), yang kini menjabat sebagai Kepala Ombudsman Gorontalo berpendapat bahwa saat ini tidak semua orang merasa berkepentingan untuk melestarikan benih-benih lokal. Tak bisa dipungkiri memang, kata Alim, hal-hal yang bersifat lokal terkadang menjadi selalu sulit untuk bersaing dengan hal-hal baru akibat dampak modernisasi jaman.

“Sekarang pada level petani saja, petani selalu mencari mana yang menguntungkan dia. Dia tidak memiliki kepekaan terhadap kekayaan benih yang harus dilestarikan sebagai sebuah kekayaan lokal. Mereka selalu memikirkan yang praktis saja, hanya mencari untung,” ujar Alim.

Provinsi Gorontalo dengan luas wilayah 11.967, 64 km persegi merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki potensi besar dalam bidang pertanian. Berdasarkan besaran tersebut, terdapat potensi lahan sebesar 443.140, 28 hektar yang terdiri dari lahan kering 383.769 hektar dan sawah 28.260 hektar.

Gorontalo diawal terbentuknya provinsi, semenjak dipimpin secara definitif oleh Fadel Muhammad, mulai mencanangkan program agropolitan berbasis jagung. Sejak itu pula kampanye Gorontalo sebagai Kota Jagung mulai populer. Program agropolitan yang juga didukung oleh pemerintah pusat ini merupakan penjabaran dari revitalisasi pertanian yang juga akan mengarah kepada pembangunan pertanian di

era modern.

Dengan lahan potensi untuk pengembangan jagung sebesar 220.406 hektar, program tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani, meningkatkan produksi jagung. Dan untuk menunjang program tersebut, pemerintah provinsi Gorontalo telah melakukan langkah-langkah yang dianggap tepat, seperti menjamin ketersediaan benih unggul (hibrida dan komposit) dan pupuk dengan harga yang diklaim terjangkau.

Selain itu, pemerintah provinsi Gorontalo juga mengalokasikan dana untuk pembangunan jalan dan alat pemipil jagung sebagai sarana dan prasarana pendukung. Semua itu dilakukan oleh pemerintah Gorontalo untuk meningkatkan produktivitas hasil jagung di Gorontalo.

Untuk tahun 2014 ini, pemerintah provinsi Gorontalo mengaku optimis bisa mencapai angka satu juta ton produksi jagung sebagai targetnya. Hal ini seperti diungkapkan oleh Wakil Gubernur Idris Rahim, saat membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Program Pertanian, Januari lalu.

“Kami yakin permasalahan yang ada seperti bibit, pupuk, dan masalah lain bisa terselesaikan tahun ini, ” kata Idris Rahim.

Dari berbagai target dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah provinsi Gorontalo itu, banyak yang berharap agar pemerintah berlaku bijak untuk tidak melupakan dan tetap melestarikan produk-produk lokal di Gorontalo. Seperti halnya dalam melindungi varietas si kecil binde kiki yang kini semakin terlupakan. Yang tak menutup kemungkinan binde kiki akan benar-benar hilang ditelan jaman.

DEMI GORR SAWAH LADANG PUN DIBELAH

Oleh **RIVOL PAINO**

<http://gorontalotoday.com/detail.php?act=berita&kategori=pilihan&judul=emi-gorr-sawah-ladang-pun-dibelah#.U0-WkFWSxe9>

“**K**ami tidak setuju tanah ini dilewati jalan GORR, 100 persen kami menolak, Janganbakore tanah.” Kata-kata itu tertulis di hampir di sepanjang jalan Desa Pilohayanga Barat, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo.

Tulisan bernada protes berat itu, terpampang tidak lama setelah warga mendengarkan sosialisasi awal sebelum Ramadhan 2013 lalu. Pertemuan itu digelar di kantor desa Pilohayanga.

Melalui layar tancap, masyarakat diperlihatkan sebuah video animasi pembangunan Jalan lingkaran luar atau disebut Gorontalo Outer Ring Road (GORR). Bukannya gembira, usai menyaksikannya warga malah pulang dengan wajah muram. Padahal biasanya, bulan ramadhan senantiasa disambut penuh suka cita dengan acara bersih-bersih, mengecat rumah atau pagar.

Tapi kali ini tradisi itu tidak mereka lakukan lagi, sejak pertemuan di kantor desa itu, kini yang terbayang di kepala setiap orang adalah rumah-rumah juga lahan pertanian mereka yang akan tergusur oleh pembangunan jalan.

Pilohayanga Barat sebuah kampung di pinggiran kota, yang memiliki luas lahan sebesar 200 ha/m², dengan luas wilayah menurut penggunaannya yaitu luas persawahan 85 ha/m², luas perkebunan 25 ha/m² dan luas pemukiman 3 ha/m².

Salah satu potensi sumberdaya alam tambang yang potensial ada di Pilohayanga Barat seperti batu, pasir, tanah timbun dan lain-lain.

“Saya akan jual bila pemerintah tetapkan harga sesuai, kami mau ganti rugi karena sawah adalah harta berarti bagi kami.” ujar Siko Paris, salah satu warga.

Dia mengucapkan kata-kata itu dengan emosi, perempuan kurus yang sudah uzur ini akan kehilangan sawah di kampungnya. Dia mengatakan sejak acara sosialisasi awal tentang jalan lingkar luar itu, membuat dirinya susah tidur.

“Karena sawah dan rumah saya hilang” tegasnya lebih lanjut.

Tak hanya Siko Paris yang galau, di Pilohayanga Barat, sedikitnya 81 kepala keluarga yang berprofesi petani, terancam tak lagi menuai padi jika GORR mulai dibangun. Rumah warga, tanah, sawah produktif, sekolah, dan kuburan terancam hilang karena wilayah paling banyak diambil untuk jalan lingkar luar. Setidaknya begitu data yang tercatat di kantor desa Pilohayanga Barat.

“Banyak yang mengeluh ke saya, bahwa mereka hanya memiliki satu-satunya sawah sebagai sumber kehidupan, lalu bagaimana jika GORR mulai jalan? Mau ke mana kita? Apa harus tinggal di kolong jembatan?” Kata Kepala urusan pembangunan di kantor desa Pilohayanga Barat, Mustafa Mootalu.

Menurutnya, megaproyek pembangunan jalan itu bisa mengancam lahan pertanian yang perlahan akan habis,

banyak lahan bakal digunakan untuk pembangunan kantor, perumahan. Tanah-tanah produktif malah ditanami cor dan beton.

Banyak warga menolak rencana pembangunan ini, bagi mereka tak mudah membangun solidaritas sesama warga yang sudah terjalin begitu lama, jika dipindahkan ke lokasi lain, maka adaptasi harus dijalin lagi dari awal.

Lain di warga, lain lagi di mulut Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie, “Kalau bukan sekarang kapan lagi Gorontalo memiliki jalan tol, Gorontalo 10-20 tahun pasti macet, pemerintah tak mengiginkan mencari solusi nanti sudah macet” tukasnya mantap, sebagaimana dikutip dari Gorontalopost edisi Jumat (28/2).

Sementara itu dalam video Pemerintah Provinsi Gorontalo tentang “Study Kelayakan Ruas Jalan Lingkar Luar Gorontalo atau Feasibility Study GORR” yang disusun oleh PT. Maratama Citra Mandiri selaku General Consultant dijelaskan manfaat ekonomi secara teknis, mulai dari pendekatan konsumen surplus, yang dihitung dari pendekatan biaya operasi kendaraan dan nilai waktu manfaat jalan.

Sedangkan produksi surplus mengacu pada keadaan di mana perbaikan prasarana transportasi mengakibatkan produksi pertanian, perkebunan, perikanan, industri dan pariwisata.

Selain itu, proyek itu juga mendukung prioritas pembangunan nasional dalam penguatan konektivitas antar daerah (domestic connectivity), serta sebagai bentuk implementasi Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) Koridor Sulawesi.

GORR adalah kebijakan pemerintah daerah, untuk mengakomodasi pergerakan masyarakat dan komoditas yang

membuka akses pertanian, memperlancar angkutan produksi pertanian, peternakan, perikanan, serta memperlancar arus barang dari bandara Djalaludin ke kota Gorontalo sebagai ibu kota provinsi.

Jalan lingkar luar yang tampak mentereng dalam video presentasi berdurasi kurang lebih 18 menit itu, direncanakan sepanjang 45 Kilometer, dengan lebar 60 meter yang memiliki sistem transportasi dua arah berjarak 10 meter, bahu jalan 4, 5 meter dan tergantung ketersediaan lahan yang membutuhkan 60 meter sepanjang 45 Km yang diupayakan selesai 2017.

Sebagai langkah awal pemerintah menyiapkan 25 miliar dan pengadaan lahan Pemerintah Provinsi mengacu pada undang-undang nomor 2 tahun 2012. Sementara itu, pada sebuah dialog publik bertajuk “Penyelesaian Konflik Agraria dan Masa Depan Reforma Agraria Gorontalo” di Gorontalo awal februari 2014 lalu, Sekretaris Jendral (Sekjen) Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Iwan Nurdin mengatakan bahwa Undang- undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 1960 yang seharusnya jadi acuan, tidak pernah dilaksanakan oleh negara.

Akibatnya, pembangunan pedesaan dan pertanian tidak diprioritaskan. Konflik agraria terus berlangsung, perampasan tanah oleh negara dan perusahaan, menyebabkan kemiskinan di pedesaan.

“Kalau konflik terjadi terkait dengan lahan, warga bisa melakukan protes kepada pemerintah mengenai penetapan” ucap Iwan

Knowledge and Capacity Building Coordinator, Oxfam, Taufiqul Mujib dalam materi “Kampanye Keadilan Pangan” saat Journalist Camp di Gorontalo, menunjukkan bahwa di Indonesia terjadi alih fungsi lahan 110.000 ha per tahun.

Jika luas lahan baku tahun 2002 seluas 7.748.840 ha, maka tahun 2011 lahan baku tinggal 6.758.840 ha, dan tahun 2014 lahan baku tersisa 6.428.840. “Jika lahan terus berkurang, penduduk naik 1,4 persen, maka tahun 2020 Indonesia akan kekurangan pangan,” tukasnya.

Data evaluasi kinerja Pemda provinsi Gorontalo oleh BAPPENAS dan Universitas Negeri Gorontalo (UNG) tahun 2013 juga menunjukkan, ketahanan di Gorontalo belumlah memadai, karena pengelolaan SDA yang tidak ramah lingkungan, alih fungsi lahan pertanian untuk keperluan lain semakin meningkat, inovasi petani dalam berusaha tani rendah, serta kepemilikan lahan usaha tani yang kecil.

Data itu juga mengkonfirmasi, permodalan petani masih terbatas, serta penyuluhan pertanian masih terkonsentrasi pada bidang pertanian, kelembagaan sektor pertanian juga umumnya belum mandiri, produk pertanian yang dihasilkan memiliki nilai tambah yang kecil, mutu produk pertanian masih rendah, ditambah lagi petani pada umumnya tidak menguasai informasi pasar.

GORR DAN MP3EI

GORR hanyalah proyek kecil penunjang MP3EI yang merupakan proyek besar Indonesia, akan meningkatkan hasil produksi pangan di Gorontalo, pemerintah daerah mengambil kebijakan program pembangunan ketahanan pangan dalam empat prioritas yaitu pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan ekonomi kerakyatan.

Dalam laporan MP3EI disebut-sebut sebagai terobosan bersejarah yang memiliki slogan “locally integrated, globally connected” dengan menggunakan pendekatan percepatan transformasi ekonomi, bukan pendekatan business as usual.

Dalam Peraturan Presiden No.32 tahun 2011, Indonesia dibagi menjadi enam koridor ekonomi, yaitu koridor ekonomi Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali- Nusa Tenggara, Papua-Maluku.

Tiap koridor ekonomi memiliki tema sesuai dengan potensinya, koridor Ekonomi Sumatera sebagai “Sentra Produksi dan Pengolahan Hasil Bumi dan Lumbung Energi Nasional”; Koridor Ekonomi Jawa sebagai “Pendorong Industri dan Jasa Nasional”; Koridor Ekonomi Kalimantan sebagai “Pusat Produksi dan Pengolahan Hasil Tambang & Lumbung Energi Nasional”.

Sedang Koridor Ekonomi Sulawesi direncanakan menjadi □Pusat Produksi dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Migas dan Pertambangan Nasional”; Koridor Ekonomi Bali – Nusa Tenggara sebagai □Pintu Gerbang Pariwisata dan Pendukung Pangan Nasional; dan Koridor Ekonomi Papua-Kepulauan Maluku sebagai “Pusat Pengembangan Pangan, Perikanan, Energi, danPertambangan Nasional”.

Dewan nasional KPA wilayah Indonesia Timur Irwan Frans Kusuma berkata bahwa proyek besar MP3EI pada gilirannya nanti, mematkan jenis-jenis pekerjaan yang beragam serta mematkan potensi budidaya tanaman pangan.

“Lapangan kerja pada tiap wilayah akan terspesialisasi, masyarakat lokal dari berladang atau bertani menjadi buruh pertambangan” jelas Irwan lebih lanjut.

Sesuai data Kementerian Perekonomian, total proyek MP3EI yang telah groundbreaking sampai Juli 2013, tercatat sebanyak 240 proyek dengan nilai investasi Rp647, 462 triliun. Dimana 94 proyek dengan nilai investasi sebesar Rp364, 458 triliun berasal dari sector rill dan 146 proyek dengan nilai

investasi sebesar Rp283, 004 triliun.

Pemerintah juga berusaha menggaet investor luar negeri. Selain para investor ASEAN, investor Amerika Serikat, Rusia dan Australia turut ramai menanamkan modalnya pada proyek-proyek tersebut, termasuk infrastruktur.

Irwan juga mengatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhyono mengundang investor dari luar negeri untuk berbondong-bondong masuk ke Indonesia.

Hal ini terlihat dalam pidato SBY pada APEC CEO Summit 2012, Far Eastern Federal University, Vladivostok, Rusky Island, Rusia, 8 September. Seperti dilansir www.setkab.go.id edisi 11 September 2012, "Presiden Undang Investor APEC Sukseskan MP3EI".

"Saya mengundang Anda sebagai mitra kami untuk melaksanakan rencana tersebut. Kami telah mengembangkan skema public-private partnership untuk memfasilitasi minat investasi Anda. Ini adalah kerangka win-win. Di satu sisi, Indonesia akan mendapatkan keuntungan dari investasi dan kerjasama dengan Anda. Di sisi lain, investasi Anda akan kembali dan tumbuh". tutur SBY dalam pidatonya.

KASUBI, PANGAN YANG TERPINGGIRKAN OLEH BERAS

Oleh **SALEH IQBAL**

<http://degorontalo.com/kasubi-pangan-yang-terpinggirkan-oleh-beras/>

Kasubi, atau singkong yang dulunya menjadi salah satu santapan khas masyarakat Gorontalo, kini mulai terpinggirkan seiring masuknya beras sebagai makanan utama. Padahal kasubi banyak dijadikan sebagai pangan utama untuk membuat aneka penganan, seperti onde-onde dan kue khas sabongi.

Hal ini juga diakui oleh Wawan Tolinggi, dosen dari Universitas Negeri Gorontalo (UNG). Menurutnya kasubi adalah makanan khas Gorontalo yang sudah lama di konsumsi masyarakat, sementara perkembangan kasubi di pasaran nilai jualnya lebih rendah ketimbang beras. Diperlukan kebijakan pemerintah agar bisa serius dengan masalah ini.

Wawan mengatakan, ketersediaan pangan masih cenderung berorientasi pada tanaman padi dan jagung. Sementara kasubi menjadi terpinggirkan. Sebab oleh pemerintah, jagung dan beras dianggap sebagai pangan yang strategis.

“Kenapa petani jarang menanam kasubi? Karena salah satu faktornya adalah harga pasaran yang tidak mendukung. Sehingga petani lebih memilih tanaman lain yang bisa

menghasilkan dan diterima di pasaran, seperti jagung, beras, rica dan taman lainnya, ” ungkap Wawan Tolinggi, ketika menjadi pembicara dalam Journalist Camp yang digelar AJI Kota Gorontalo bekerjasama dengan Oxfam Indonesia, pertengahan Februari 2014 lalu.

Tanggapan yang sama juga disampaikan oleh Sugeng Sutrisno. Aktivist lingkungan dari Perkumpulan Japesda (Jaring Advokasi Pengelolaan Sumber Daya Alam) ini mengatakan, masyarakat tidak lagi tertarik dengan tanaman kasubi atau singkong sebagai produk yang akan dipasarkan. Karena ada beberapa faktor yang menyebabkannya, yaitu harga pasaran yang tidak mendukung dan kasubi juga tidak mendapat tempat di pasaran, seperti pangan lainnya di Gorontalo.

Menurut Sugeng, pemerintah diharapkan bisa menaruh perhatian terhadap kasubi agar produk lokal tidak hilang dan bisa di kembangkan. Sementara diberbagai tempat, misalkan di Jawa, kasubi diolah menjadi kerupuk, ada juga menjadi tepung, atau bahan bakar hayati atau *biofuel*.

“Sehingga kasubi punya nilai di pasaran. Sedangkan di Gorontalo belum ada yang memfasilitasi untuk mengembangkan kasubi. Jangan heran kalau kasubi di Gorontalo tidak ada nilai jualnya di pasaran, ” ungkap Sugeng.

Taufik Suleman, salah seorang warga di Kecamatan Bongomeme mengatakan, selama ini menanam kasubi menyesuaikan dengan cuaca. Jikalau musim hujan, katanya, ia lebih memilih menanam kasubi. Sebab kasubi lebih butuh kadar air yang secukupnya dalam proses perawatan.

“Untuk proses perawatan kurang lebih satu bulan masa pertumbuhannya. Perawatan yang di butuhkan tidak seperti tanaman lain yang begitu banyak membutuhkan pupuk dan lainnya. Kalau kasubi hanya butuh air yang secukupnya, ”

kata Upik, panggilan akrab Taufik Suleman, seraya berharap pemerintah punya perhatian khusus kepada petani yang khusus menanam kasubi.*

PESTISIDA, MIMPI BURUK KEDAULATAN PANGAN DI GORONTALO (I)

Oleh **SYAM TERRAJANA (SYAMSUL HUDA M. SUHARI)**

<http://degorontalo.com/pestisida-mimpi-buruk-kedaulatan-pangan-di-gorontalo-1/>

Tita setengah berteriak ketika melihat Rajeb, putranya, hendak meraih buah apel ranum yang yang baru saja dibelinya dari sebuah supermarket.

“Cuci yang lama dulu pake air kran,” katanya. Kekuatiran itu, nampaknya bukan hanya milik Tita seorang. Bagaimana tidak, dalam kehidupan sehari-hari, kita dikepung oleh aneka jenis pangan yang mengandung pestisida kimia; buah, sayur mayur, bahkan beras yang kelak jadi nasi di piring santapan kita.

“Mau bagaimana lagi, seolah-olah tidak ada pilihan lain, mau tidak kita harus menerimanya meski dengan perasaan was-was, masak mau menanam semuanya sendiri,” kata Ibu rumah tangga itu berkeluh kesah.

Muljady Mario, kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pusat Informasi Jagung Provinsi Gorontalo di tempat berbeda mengatakan, sebagai langkah untuk memastikan keamanan pangan (Food Safety) di wilayah itu, mulai tahun ini pihaknya akan turun ke pasar-pasar tradisional dan supermarket, untuk memeriksa pangan yang mengandung bahaya kimia.

“Pemeriksaan difokuskan pada bahan pangan segar asal tanaman, seperti buah-buahan dan sayur-sayuran, kita akan ambil sampelnya secara acak, ” kata dia di ujung telepon seluler, Minggu, (16/3).

Sampel -sampel itu, lanjutnya, nanti diperiksa di laboratorium untuk memastikan, apakah mengandung bahan berbahaya bagi kesehatan atau tidak. Jika terbukti mengandung bahan berbahaya, maka pihaknya akan merekomendasikan kepada pihak kepolisian untuk menindakinya.

“Tidak hanya buah impor, produk pangan segar asal tanaman yang berasal dari lokal Gorontalo juga akan kita periksa, ” kata dia.

Selain itu, menurutnya langkah preventif lainnya yakni dengan melakukan sosialisasi ke masyarakat, mengenai bahaya tanaman pangan yang mengandung pestisida, berikut langkah pencegahannya.

Pihaknya mengaku baru berkesempatan melakukan semua itu, karena persoalan anggaran, setelah instansi yang dipimpinnya itu digabung, dari Badan Pusat Informasi Jagung menjadi Badan Ketahanan Pangan dan Pusat Informasi Jagung per 2014 ini.

Namun begitu jauh bertahun-tahun sebelumnya, inisiatif untuk menjaga keamanan pangan ini sebenarnya sudah dimulai namun justru bukan oleh pemerintah, melainkan oleh Tonny Mohammad, 50, seorang petani di desa Toto Utara, Kecamatan Tilongkabila.

Memanfaatkan ladangnya yang hanya seluas seperempat hektar persegi, secara swadaya dia mulai bereksperimen, membuat berbagai formula pupuk ramah lingkungan.

Bahan-bahannya pun berasal dari alam, murah dan mudah didapat, air kencing ternak, daun-daunan, kentang,

cabe, kunyit dan aneka rempah serta bebuahan lainnya.

Salah satu produk yang dihasilkannya adalah biourin, pupuk semprot perangsang tanaman yang sekaligus berfungsi sebagai penghalau hama.

“Air kencing manusia dan segala jenis hewan bisa dimanfaatkan sebagai bahan bio urin,” katanya tersenyum.

Selain itu, dengan segala keterbatasan dia juga membuat dan mengembangkan sendiri berbagai agens hayati, organisme pengendali hama tanaman; rhyzobacteri, corinebacteri, trichoderma sp yang berfungsi melumpuhkan berbagai hama tanaman dengan cara yang ramah, tak membahayakan kesehatan manusia.

Sayang, produk agens hayati yang dikembangkannya itu masih berlabel “dipakai untuk kalangan sendiri” artinya, belum bisa diproduksi secara massal. Agar bisa diproduksi massal, maka dirinya diharuskan mengurus ijin resmi terlebih dahulu, produknya juga harus melalui uji laboratorium, butuh merogoh kocek yang dalam untuk bisa melakukannya.

“Daripada buang-buang uang, mendingan menularkan pengetahuan yang saya punya pada sesama petani, banyak kawan-kawan yang saya kasih resep membuat sendiri pupuk organik dan agens hayati,” kata dia.

Sejauh ini, seingatnya, paling tidak sudah ada 7.000 hektar lahan pertanian yang berhasil dikendalikan hamanya dengan cara murah dan ramah lingkungan itu.

“Sejauh ini juga, *Alhamdulillah*, belum ada sepeserpun uang pemerintah daerah yang diberikan untuk membantu,” gelaknya. Pria kalem ini memang mengaku anti menadahkan tangan, berharap bantuan pemerintah.

“Kalau dikasih, syukur, tidak juga tak mengapa, saya tak pernah meminta,”

Lagi pula, menurutnya bantuan pemerintah cenderung membuat petani manja, tidak kreatif bahkan pada banyak kasus, jarang berujung pada hasil akhir yang memuaskan.

Pasalnya, program bantuan itu kebanyakan tendensius, tidak dilandasi niat yang benar. Malahan, kata Tonny, banyak petani di wilayah itu yang justru tidak ikhlas, sakit hati menerima bantuan itu.

“Bagaimana tidak sakit hati, misalnya bantuan modal yang seharusnya diberikan 5 juta, tapi yang sampai di tangan petani, kurang dari itu, karena sudah dipotong,” ujarnya.

Karena itu, memanfaatkan sepenggal halaman rumahnya, dirinya bernisiatif mendirikan pusat pelatihan pertanian dan pedesaan swadaya (P4S), dibantu sejumlah donor non pemerintah plus merogoh kocek sendiri, dia membangun bangunan tempat pelatihan yang cukup representatif.

Kini pusat pelatihan yang menggunakan nama “Mega Tani Mandiri” itu menjadi tempat berbagi pengetahuan oleh berbagai kalangan mulai dari petani, pelajar, mahasiswa, dosen dan peneliti.

Tempat itu, juga kerap dikunjungi oleh para pejabat atau instansi pemerintahan. Kalau sudah begitu, ungkap Tonny, tak jarang bapak-bapak dan ibu-ibu terhormat itu mengaku pada tamu yang dibawanya, bahwa hasil jerih payahnya selama ini merupakan hasil dari “binaan” mereka....

PESTISIDA, MIMPI BURUK KEDAULATAN PANGAN DI GORONTALO (2)

Oleh **SYAM TERRAJANA (SYAMSUL HUDA M. SUHARI)**
<http://degorontalo.com/pestisida-mimpi-buruk-kedaulatan-pangan-di-gorontalo-2/>

Kembali ke pestisida. Masih menurut Tonny, pemerintah juga bersikap ambigu. Di satu sisi mengkampanyekan “Back to nature” dalam pengolahan lahan pertanian, namun di sisi lain, terus saja memberikan bantuan pupuk pestisida.

Kata Tonny, Itu juga yang membuat penggunaan bahan-bahan organik ramah lingkungan, masih belum populis. Sebagian besar petani Gorontalo terus saja terjerat daya pikat pestisida, yang menjanjikan pengendalian hama dalam tempo sesingkat-singkatnya.

Padahal menurutnya, para orang tua di Gorontalo sudah sejak lama mewariskan cara bertani yang berpangkal pada kearifan lokal daerah itu.

Dia mengungkapkan, petani Gorontalo pada masa lalu, tahu kapan air akan pasang atau surut, kapan hujan atau hama akan datang menyerang, hanya dengan membaca gejala alam, lewat angin, rembulan atau dengan mengamati pergerakan burung terbang di udara.

“Kenapa hal itu tidak kita gunakan lagi, banyak orang

yang modern, tapi isi kepalanya tidak, " tukasnya.

Dia mengatakan, penggunaan pestisida yang berlebihan pada sebagian besar lahan pertanian di Gorontalo, telah banyak memusnahkan pengendali alami hama tanaman, akibatnya, hama tanaman pun kian massif.

Kepinding tanah misalnya, kini bukan hanya menyerang lahan pertanian saja, tapi juga ikut menyergap setiap rumah-rumah penduduk, pada saat bulan terang, hama beraoma sangit yang bermukim dalam tanah itu keluar, mencari cahaya-cahaya terdekat, yakni lampu-lampu penerangan penduduk.

Dirinya menduga, fenomena itu juga ada kaitanya dengan penggunaan pestisida yang berlebihan.

Di tempat terpisah, Nadjib Pakaya, fungsional pengendali organisme pengganggu tumbuhan dari Balai Pengembangan Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPPTPH) Provinsi Gorontalo juga mengakui, penggunaan pupuk dan bahan pestisida pada lahan pertanian di wilayah itu masih lebih populis.

Namun begitu, dirinya tidak berani memprosentasikan seberapa besar penggunaannya. Pihaknya hanya mengklaim, toh dalam lima tahun terakhir ini, belum ada lahan pertanian yang gagal panen atau puso di Provinsi Gorontalo.

Dari data BPPTPH, kurun Januari-Desember 2013, sedikitnya ada 4360, 41 hektar lahan padi sawah yang terserang hama di enam kabupaten/kota setempat, dengan kategori ringan sampai sedang.

Pihaknya mencatat, penggerek batang merupakan hama yang paling banyak melakukan serangan, seluas 1.239, 78 hektar.

Sedang untuk tanaman jagung, tercatat lahan yang diserang berbagai jenis hama, seluas 5.986 hektar , juga denga

kategori ringan hingga sedang.

“Selain menggunakan agens hayati, kami juga aktif memberikan penyuluhan kepada petani, terkait kapan waktu yang tepat untuk melakukan penanaman, berdasarkan siklus pertumbuhan hama,” katanya.

Menanggapi hal itu, Iqbal Bahua, dosen fakultas pertanian, Universitas Negeri Gorontalo, mengatakan pihak BPPTPH, seharusnya membuka data yang lebih jauh kepada publik, misalnya, dengan mengumumkan secara rinci dan terbuka, ada berapa luas lahan yang terserang hama, karena disebabkan oleh pemakaian pestisida yang berlebih.

Menurutnya, hal itu penting diketahui publik sebagai bahan catatan seberapa besar tingkat sekuritas pangan di Provinsi Gorontalo.

Bahkan berdasarkan hasil penelitian sejumlah dosen dan mahasiswa pertanian UNG baru-baru ini, terungkap bahwa pada kurun 2013 hingga Maret 2014, tingkat penggunaan pestisida di lahan pertanian di Gorontalo, meningkat tajam hingga 10 persen.

Angka itu, menurutnya sudah terbilang tinggi, idealnya penggunaan pestisida hanya pada kisaran 1-4 persen.

Menurutnya hal ini terjadi karena petani di Gorontalo berupaya mencari cara tercepat menanggulangi hama tanaman, mengingat anomali cuaca selama setahun terakhir yang serba tidak menentu.

Padahal, selain merusak unsur hara dalam tanah dan berbahaya bagi kesehatan, penggunaan pestisida juga dikenal lebih berbiaya tinggi. Tak heran, banyak petani yang kemudian terjerat utang pada para rentenir, lintah darat yang memanfaatkan situasi itu.

“Petani kita sudah lama terbiasa dengan cara cepat

menggunakan pestisida, selain faktor perilaku yang sulit diubah, hal ini juga disebabkan oleh program pemerintah yang masih banyak berbasis pestisida," kata dia.

Jika dirunut ke belakang, program "Pestisidasentris" yang masih saja diusung pemerintah itu, menurutnya, sudah berlangsung puluhan tahun.

Dulu, ungkapnya, ketika rezim orde baru masih berkuasa, Indonesia sempat "naik kelas" dengan swasembada beras, tapi di balik kisah sukses yang sampai sekarang masih berulang-ulang diceritakan itu, menurutnya ada kisah yang pilu dan miris.

"Pada masa itu, petani dipaksa menanam padi, untuk memastikannya, bahkan ABRI pun dikerahkan masuk ke desa-desa, untuk mengkatrol produktivitas padi, pemerintah pun membagi-bagikan pestisida kepada petani, banyak kearifan lokal dalam pengelolaan pertanian yang hilang," terangnya.

Akibatnya, sampai sekarang petani serba instan dalam mengelola pertanian, lebih banyak mengandalkan pestisida.

Di samping itu, ungkapnya lagi, tak bisa dipungkiri, ada rantai bisnis yang sudah mapan terbentuk antara pemerintah dengan produsen pestisida. Sebuah mata rantai yang sulit diputus seketika.

Di Gorontalo sendiri, terobosan pertanian di bidang pertanian, misalnya jagung pada masa Gubernur Fadel Mohammad, menurutnya sarat dengan nuansa politis, meski diakui, program yang dibungkus dengan nama "Agropolitan" itu cukup populis.

"Tapi populis itu saja tidak cukup, pemerintah harus berpikir jangka panjang, terutama pada soal keberlanjutan lingkungan, sebagian besar lahan yang ditanami jagung itu menggunakan pestisida," katanya.

Penggunaan pestisida, tidak hanya bisa menimbulkan berbagai penyakit serius dalam tubuh manusia, tapi lama kelamaan juga membuat lahan pertanian produktif akan beranjak mandul.

Satu contoh misalnya, satu lahan jagung yang sudah terserang hama bulai, akibat penggunaan pestisida yang berlebihan, hanya bisa diolah kembali, paling cepat lima tahun kemudian.

“Kalau tanah sudah tidak produktif, lama kelamaan tamatlah riwayat pertanian di Gorontalo” tutupnya.

JENIS TANAMAN INI MAMPU BERADAPTASI DENGAN IKLIM DI NTT

Oleh **SILVER SEGA**

http://www.portalkbr.com/nusantara/nusatenggara/3161217_4265.html

Dinas Pertanian dan perkebunan Nusa Tenggara Timur (NTT) meminta para petani agar menanam jagung dan kacang-kacangan.

Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan NTT Yohanis Tay Ruba mengatakan, jagung dan kacang-kacangan mampu beradaptasi dengan iklim di NTT. Ia juga mengatakan, jenis jagung yang bisa beradaptasi dengan iklim NTT adalah jagung composit.

“Ada tanaman juga yang bisa beradaptasi baik. jagung itu kenapa kita terus kita meminta untuk petani tanam jagung, tanam kacang-kacangan. Karena tanaman itulah yang beradaptasi baik dengan kondisi iklim kita di Nusa Tenggara Timur. Kita terus mendorong jagung yang benihnya ya apa yang kita sebut dengan jagung komposit. Itu dia beradaptasi dengan lingkungan kita,” kata Yohanis Tay Ruba di Kupang, Jumat (7/3).

Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan NTT Yohanis Tay Ruba menambahkan, jagung dan kacang-kacangan sangat perlu untukantisipasi rawan pangan. Dia mengatakan, beberapa daerah di NTT yang tidak turun hujan tahun ini, lahannya

CUACA BURUK, STOK PANGAN NTT MASIH AMAN

Oleh **SILVER SEGA**

http://www.portalkbr.com/nusantara/nusatenggara/3119875_4265.html

Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan (BKPP) Nusa Tenggara Timur (NTT) minta setiap pemerintah kabupaten melaporkan kerusakan tanaman pertanian akibat cuaca buruk.

Kepala BKPP NTT Haji Husen mengatakan, BKPP NTT sudah dua kali menyurati pemerintah kabupaten agar melaporkan kondisi ketahanan pangan di daerahnya masing-masing akibat cuaca buruk.

“Dan hari ini sudah surat kedua kami minta agar supaya bisa menyampaikan permasalahan yang ada di desa atau kecamatan kabupaten masing-masing. Sehingga dengan tingkat analisis mereka, apa ini gagal panen atau lainnya, sehingga kita bisaantisipasi, ” tutur Haji Husen di Kupang, Rabu (5/2).

Haji Husen menambahkan, meski cuaca buruk melanda NTT dalam tiga pekan ini, pihaknya belum menerima laporan soal rawan pangan atau kerusakan tanaman pertanian. Menurut dia, warga masih memiliki persediaan pangan yang cukup. Sebab, warga sudah berpengalaman, bila memasuki musim seperti ini, dengan menyiapkan persediaan pangan.

HUJAN DAN ANGIN KENCANG

Sementara, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) stasiun Meteorologi Kupang NTT memprediksikan hujan dan angin kencang masih akan terjadi di NTT.

Kepala Stasiun Metrologi Kupang Atmaji Putro mengatakan, kondisi angin kencang disertai hujan masih akan terjadi hingga akhir Pebruari.

“Potensi angin ini di periode ini masih akan terjadi hingga akhir Februari terutama anginnya memang masih angin barat kemudian dengan kecepatannya rata-rata 10 knot. Pada sore menjelang malam bisa kecepatan angin itu meningkat kurang lebih 20 hingga 25 knot itupun waktunya hanya sesaat tidak berlangsung secara terus menerus. Namun secara umum dibandingkan dengan bulan Januari kemarin kecepatan angin itu sudah mulai melemah. Tentunya dengan kecepatan angin mulai berkurang menurun tentu saja akan mengikuti ketinggian gelombang.”

Atmaji Putro menambahkan meski cuaca berangsur membaik, namun warga diminta tetap waspada. Karena hujan dengan intensitas ringan hingga sedang disertai angin kencang masih akan terjadi.

PROSPEK MENJANJIKAN, PETANI BERALIH KE JAGUNG MANIS

Oleh **IRWANTO ACHMAD**

Mimoza TV, Jumat, 14 Februari 2014

LEAD IN //

MARAKNYA PERKEMBANGAN JAGUNG MANIS DALAM BEBERAPA TAHUN TERAKHIR INI / TIDAK LEPAS DARI PROSPEK YANG SANGAT MENJANJIKAN / BAIK DARI SEGI KWALITAS MAUPUN KWANTITAS / MAUPUN PENDAPATAN // SEHINGGA BANYAK PETANI YANG SEBELUMNYA BERCOCOK TANAM JAGUNG HIBRIDA / BERALIH KE JAGUNG MANIS //

PKG //

DALAM TIGA TAHUN TERAKHIR INI / BANYAK TERLIHAT MASYARAKAT YANG MENGKONSUMSI DAN MENJUAL JAGUNG MANIS / DIBEBERAPA SUDUT JALAN YANG ADA DI KOTA GORONTALO // MARAKNYA PEREDARAN JAGUNG MANIS INI / TIDAK LEPAS DARI PROSPEK YANG MENJANJIKAN / BAIK DARI SEGI KWALITAS / KWANTITAS / HINGGA PENDAPATAN UNTUK PETANI //

SEPERTI YANG DI LAKUKAN OLEH ROMY / YANG SEBELUMNYA DIRINYA MENANAM JAGUNG JENIS HIBRIDA / NAMUN KARENA MELIHAT PROSPEK

DAN HASIL YANG MENJANJIKAN DENGAN BERTANI JAGUNG MANIS / DIRINYA PUN BERALIH //

ROMY YANG SUDAH DUA TAHUN TERAKHIR INI BERALIH MENJADI PETANI JAGUNG MANIS MENGATAKAN / LEBIH MEMILIH JAGUNG MANIS KARENA PENDAPATAN LEBIH BESAR / DIBANDINGKAN DENGAN HASIL YANG DI DAPAT DARI MENANAM JAGUNG HIBRIDA // DAN MASA PANEN JAGUNG MANIS HANYA TUJUH PULUH HARI UNTUK SEKALI PANEN / SEMENTARA JAGUNG HIBRIDA BISA MENCAPAI SERATUS DUAPULUH HARI / ATAU EMPAT BULAN //

SYNC / ROMY / PETANI JAGUNG //

HAL SENADA JUGA DISAMPAIKAN OLEH ROLLY AHMAD / SELAKU DISTRIBUTOR JAGUNG DI KABUPATEN BONE BOLANGO / BAHWA PROSPEK UNTUK JAGUNG MANIS LEBIH MENJANJIKAN / HAL INI TERBUKTI DENGAN BERALIHNYA SEBAGIAN BESAR PETANI / DARI JAGUNG HIBRIDA KE JAGUNG MANIS // DENGAN HASIL PANEN MENCAPAI DUAPULUH RIBU TONGKOL PER HARI //

SYNC / ROLLY AHMAD / DISTRIBUTOR JAGUNG //

DIRINYA JUGA MENAMBAHKAN / UNTUK BIBIT YANG DI GUNAKAN SAAT INI MASIH HARUS MENGGUNAKAN BIBIT DARI LUAR GORONTALO / TEPATNYA BERASAL DARI PURWOKERTO / YANG MEMANG COCOK DENGAN IKLIM DAN TANAH DI GORONTALO //

IRWANTO ACHMAD MIMOZA TV MEWARTAKAN //

SWASEMBADA DAGING DI GORONTALO TERBENTUR KORUPSI

Oleh **ARLANK PAKAYA**
Mimoza TV

LEAD///

RENCANA GORONTALO MENUJU SWASEMBADA DAGING 2015 HINGGA KINI BELUM ADA TANDA-TANDA AKAN TERWUJUD// PROGRAM INI TERBENTUR PADA PERSOALAN KORUPSI/ SETELAH KEJAKSAAN TINGGI MENETAPKAN SATU TERSANGKA DALAM KASUS PENGADAAN SAPI FIKTIF DI DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN// KASUS INI KINI TERUS DIDALAMI KEJAKSAAN TINGGI GUNA Mencari siapa yang paling bertanggung jawab dalam kasus yang merugikan negara milyaran rupiah ini///

PKG///

KEINGINAN UNTUK MENCAPAI SWASEMBADA DAGING DI GORONTALO MASIH JAUH TUNGGU DARI API/ PROGRAM YANG DICETUSKAN UNTUK MENYAMA RATAKAN KONSUMSI DAGING HINGGA KE LAPISAN MASYARAKAT BAWAH BELUM JUGA TERWUJUD///

HARGA DAGING DI PASARAN MASIH MENCAPAI 90 RIBU RUPIAH PER KILOGRAMNYA// HARGA YANG

TERBILANG MAHAL BAGI MEREKA YANG HANYA BERPROFESI SEBAGAI PENGEMUDI BENTOR/ TUKANG CUCI PAKAIAN MAUPUN BURUH KASAR LAINNYA// MASYARAKAT YANG MENGKONSUMSI DAGING TERGOLONG EKONOMI MENENGAH KE ATAS///

PADAHAL/ GUBERNUR GORONTALO RUSLI HABIBIE MENARGETKAN/ PADA TAHUN 2015 NANTI/ GORONTALO SUDAH MENCAPAI TINGKATAN SWASEMBADA DAGING/ DENGAN PROGRAM PENGADAAN SAPI DAN PETERNAKAN BAGI MASYARAKAT KECIL///

NAMUN SAYANG/ BELUM JUGA PROYEK PENGADAAN SAPI INI SELESAI/ KEJAKSAAN TINGGI SUDAH MENETAPKAN SATU TERSANGKA YAKNI KONTRAKTOR PROYEK PENGADAAN SAPI//

KONTRAKTOR INI DITANGKAP KEJAKSAAN TINGGI KARENA DI DUGA MELAKUKAN PROYEK PENGADAAN SAPI FIKTIF///

BAHKAN DALAM PENGELEDAHAN YANG DILAKUKAN KEJAKSAAN TINGGI DI DINAS PETERNAKANDAN PERKEBUNAN PROVINSI/ PENYIDIK MENEMUKAN 12 CAP PERUSAHAAN BERBEDA DI SALAH SATU RUANGAN YANG TIDAK BISA DI MASUKI SEMBARANGAN ORANG///

SYNC : M SUNARTO - ASS PIDSUS KEJATI GORONTALO

SEMENTARA MENURUT KUASA HUKUM TERSANGKA/ MUHLIS HASIRU/ KLIENNYA HANYA MENJADI KORBAN DALAM KASUS INI/ PROYEK SENILAI 3,7 MILYAR INI HANYA DICAIRKAN 20 PERSEN ATAU SENILAI 600 JUTA// SEMENTARA UANG ITU

MENURUTNYA MASUK KE SEJUMLAH PEABAT DAERAH
DI GORONTALO///

SYNC : MUHLIS HASIRU - KUASA
HUKUM TSK

HINGGA KINI KASUS INI MASIH BERPROSES DI
KEJAKSAAN TINGGI/ SEJUMLAH SAKSI TERKAIT
SUDAH DI PERIKSA UNTUK MENYELIDIKI SIAPA SAJA
YANG TERLIBAT DALAM PENYELEWENGAN DANA
MILYARAN RUPIAH INI///

AKIBAT KASUS INI/ RENCANA UNTUK
MEWUJUDKAN GORONTALO MENUJU SWASEMBADA
PANGAN BELUM BISA TERWUJUD//

ARLANKPAKAYA//MIMOZA TVMEWARTAKAN///